



RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH RPJM KABUPATEN DHARMASRAYA 2006 - 2010



Pulau Punjung, Januari 2006



BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Kabupaten Dharmasraya merupakan kabupaten hasil pemekaran dari Kabupaten Sawahlunto/Sijunjung, yang dibentuk berdasarkan UU No. 38 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Dharmasraya, Kabupaten Solok Selatan dan Kabupaten Pasaman Barat di Propinsi Sumatera Barat dan diresmikan pada tanggal 7 Januari 2004.

Aktifitas Pemerintahan Kabupaten Dharmasraya secara resmi telah beroperasi sejak dilantiknyanya Penjabat Bupati Dharmasraya pada tanggal 10 Januari 2004 dan sejak tanggal 12 Agustus 2005 Kabupaten Dharmasraya telah memiliki Bupati Definitif hasil Pilkada Langsung.

Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah pasal 150 dan Undang-Undang nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional pasal 5 ayat (3) mengamanatkan penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah sebagai penjabaran visi, misi dan program Kepala Daerah.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah merupakan arah pembangunan yang ingin dicapai daerah dalam kurun waktu 5 (lima) tahun masa bhakti Kepala Daerah terpilih yang disusun berdasarkan visi, misi, dan program Kepala Daerah, dimana program dan kegiatan yang direncanakan sesuai urusan pemerintah yang menjadi batas kewenangan daerah dengan mempertimbangkan kemampuan/ kapasitas keuangan daerah.

1.2. Maksud dan Tujuan

Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah Kabupaten Dharmasraya merupakan pedoman bagi Pemerintah kabupaten dalam merumuskan kebijakan, program dan kegiatan pembangunan yang terpadu, yang



dituangkan didalam dokumen perencanaan pembangunan periode 5 (lima) tahun dan perencanaan tahunan daerah bagi seluruh pelaku pembangunan.

Secara umum Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah disusun bertujuan untuk : (1) Menjadi acuan resmi bagi seluruh jajaran Pemerintah Kabupaten dan DPRD serta masyarakat dalam menentukan prioritas program dan kegiatan tahunan yang akan dibiayai dari APBD Kabupaten, APBD Propinsi, APBN dan sumber pembiayaan lainnya; (2) Tolok ukur dalam melakukan evaluasi kinerja tahunan setiap satuan kerja perangkat daerah; (3) Jabaran tentang kondisi umum daerah saat ini dalam konstelasi regional dan nasional sekaligus memahami arah dan tujuan nasional yang ingin dicapai dalam rangka mewujudkan visi dan misi daerah; (4) Kemudahan bagi seluruh jajaran aparatur pemerintahan dan DPRD dalam mencapai tujuan dengan cara menyusun program dan kegiatan secara terpadu, terarah dan berkelanjutan; dan (5) Kemudahan bagi seluruh jajaran aparatur pemerintahan dan DPRD untuk memahami dan memulai arah kebijakan dan program serta kegiatan operasional tahunan dalam rentang waktu 5 (lima) tahun.

1.3. Landasan Hukum

Peraturan Perundang-undangan yang menjadi landasan rujukan penyusunan RPJMD yaitu :

- 1) UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
- 2) UU No. 38 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Dharmasraya, Kabupaten Solok Selatan dan Kabupaten Pasaman Barat di Propinsi Sumatera Barat;
- 3) UU No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
- 4) UU No. 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara;
- 5) UU No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
- 6) UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;



- 7) UU No. 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
- 8) Peraturan Pemerintah No. 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom;
- 9) Peraturan Pemerintah No. 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
- 10) Peraturan Pemerintah No. 56 Tahun 2001 tentang Pelaporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;

1.4. Hubungan RPJM Daerah Dengan Dokumen Perencanaan Lainnya

RPJM Daerah merupakan dokumen pemerintah daerah untuk menjabarkan visi, misi dan program Kepala Daerah yang penyusunannya memperhatikan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Pemerintah Pusat dan Pemerintah Propinsi. RPJM Daerah dijabarkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) setiap tahunnya yang merupakan kompilasi kritis dari Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja SKPD) dan merupakan bahan utama dalam Musrenbang yang dilaksanakan secara berjenjang mulai dari nagari, kecamatan, kabupaten dan propinsi. Hasil Musrenbang digunakan sebagai pedoman dalam penyusunan RAPBD antara Pemerintah Kabupaten dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) untuk ditetapkan menjadi APBD.

Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra SKPD) memuat visi, misi, tujuan, strategi kebijakan, program dan kegiatan pembangunan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi dari perangkat daerah yang bersifat indikatif dengan berpedoman pada RPJMD. Renstra SKPD disusun sebagai landasan operasional untuk menggerakkan sumber daya dalam organisasi pemerintah daerah sehingga seluruh unsur dapat dimanfaatkan secara optimal melalui keterpaduan dalam program yaitu melibatkan seluruh unit satuan kerja perangkat daerah dalam pelaksanaannya.

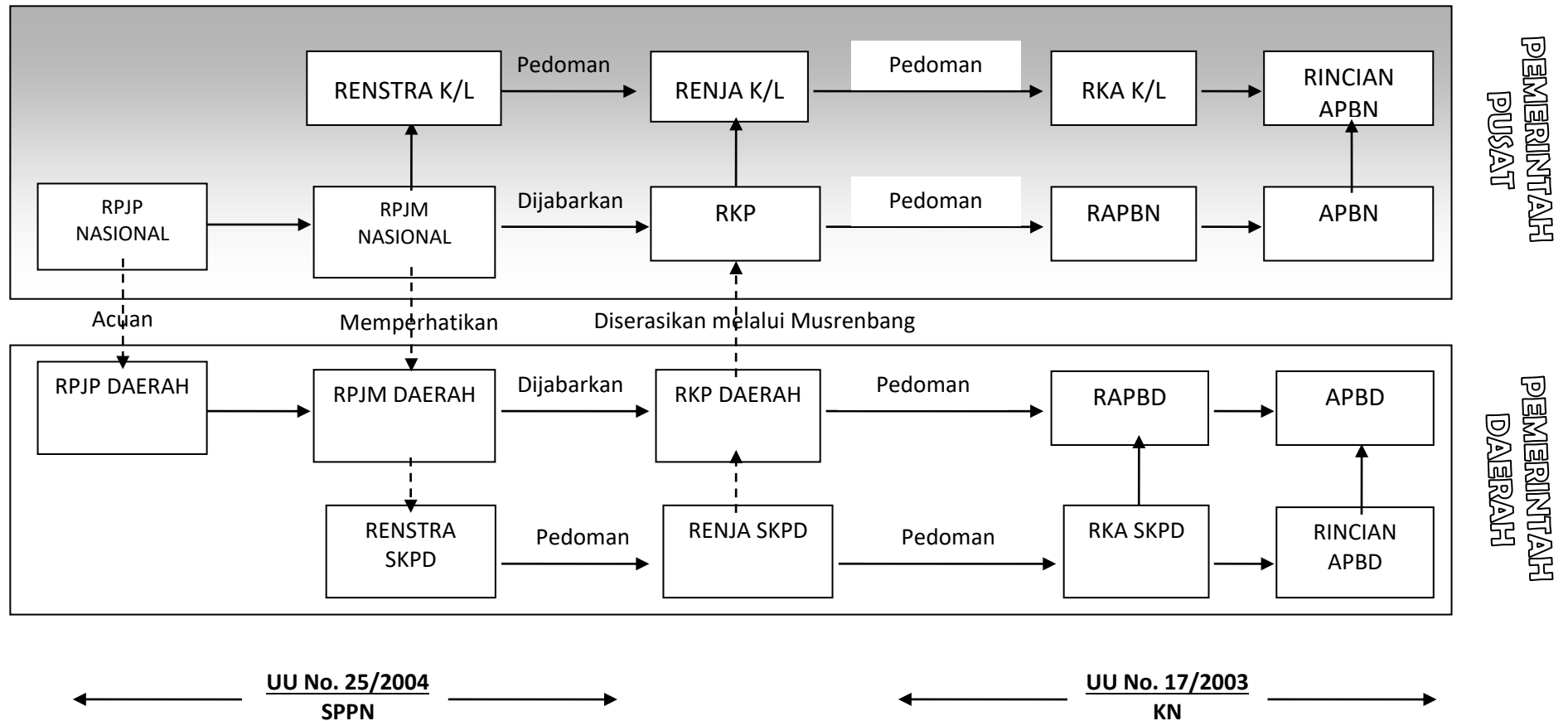


Renja SKPD merupakan penjabaran dari Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra SKPD) yang digunakan sebagai pedoman dalam menyusun Rencana Kerja Anggaran Satuan Kerja Pemerintah Daerah (RKA-SKPD) yang akan dituangkan dalam APBD.

Untuk memudahkan pemahaman terhadap substansi dasar dari RPJM Daerah ini serta arah kebijakan yang ditempuh dalam rangka mewujudkan visi dan misi maka disusun pola pikir sebagaimana disajikan pada gambar 1 dan gambar 2 berikut.

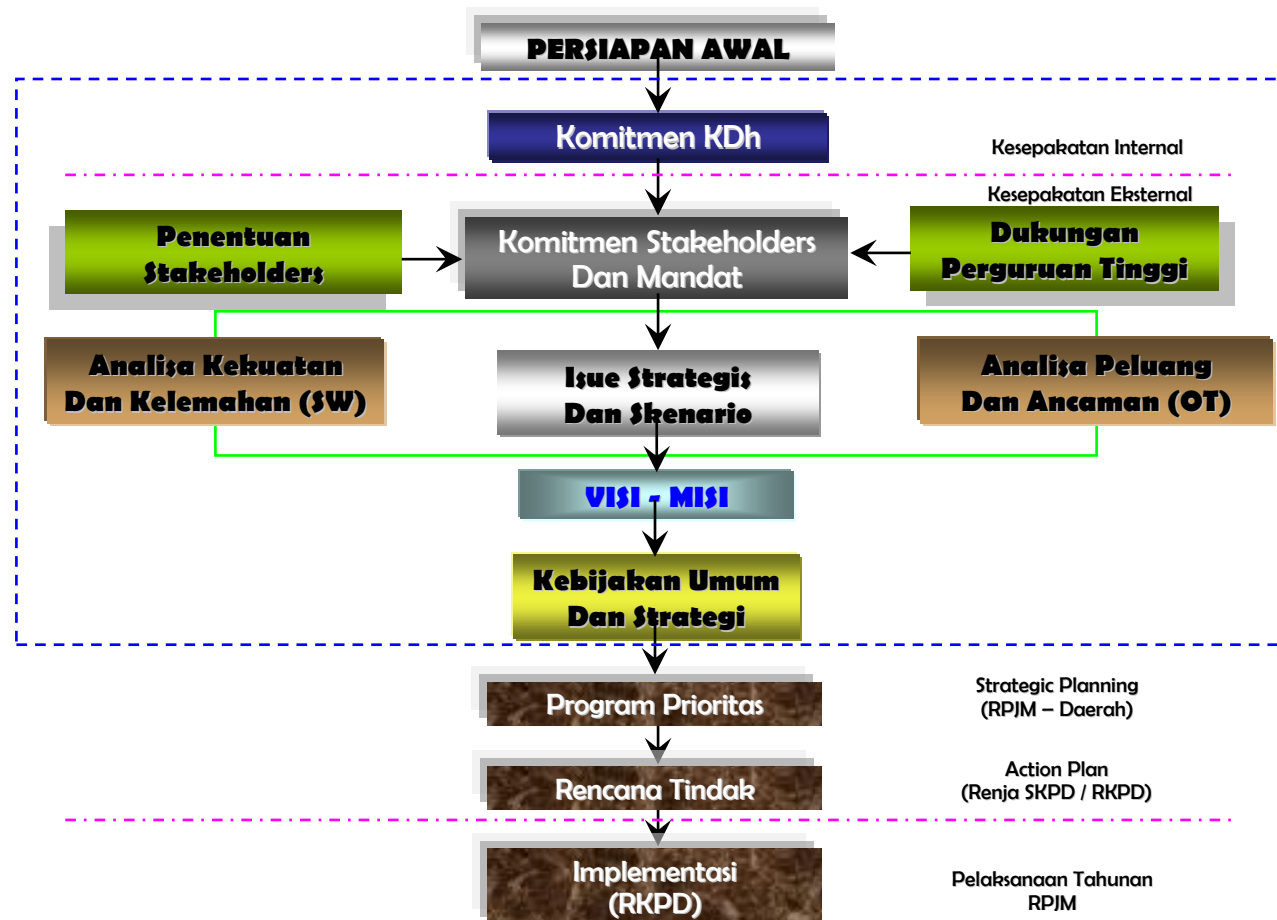


Gambar 1
Kerterkaitan Dokumen Perencanaan Nasional dan Daerah





Gambar 2
Pola Pikir dan Proses Penyusunan RPJM Daerah





1.5. Sistematika

Sesuai dengan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri No. 050/2020/SJ tanggal 11 Agustus 2005, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah ini disusun dengan sistematika penulisan sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN.

Bab ini berisi tentang latar belakang penyusunan RPJM, maksud dan tujuan penyusunan, landasan hukum, hubungan dengan dokumen perencanaan lainnya, dan sistematika penulisan.

BAB II GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH.

Bab ini menguraikan statistik dan gambaran umum kondisi daerah saat ini yang mencakup kondisi geografis, perekonomian daerah, sosial budaya daerah, prasarana dan Sarana Daerah serta pemerintahan umum.

BAB III VISI DAN MISI

Bab ini menguraikan visi, misi, arah kebijakan dan prioritas pembangunan daerah yang ditempuh dalam rangka mengubah kondisi masa sekarang ke arah kondisi yang di harapkan lima tahun mendatang.

BAB IV STRATEGI PEMBANGUNAN DAERAH

Bab ini menjelaskan tentang strategi pembangunan daerah yang menyangkut kebijakan dalam mengimplementasikan program Kepala Daerah sebagai payung pada perumusan program dan kegiatan pembangunan dalam mewujudkan visi dan misinya.



BAB V ARAH KEBIJAKAN KEUANGAN DAERAH.

Bab ini menjelaskan analisis keuangan daerah sebagai dasar dalam perumusan arah kebijakan keuangan daerah yang mencakup kebijakan bidang pendapatan, belanja dan pembiayaan serta capaian kinerja program dan kegiatan untuk melindungi dan meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat dengan memperhatikan Standar Pelayanan Minimum (SPM) yang telah ditetapkan. Secara rinci, bab ini menjelaskan tentang arah pengelolaan pendapatan daerah, arah pengelolaan belanja daerah dan kebijakan umum anggaran.

BAB VI ARAH KEBIJAKAN UMUM

Bab ini menjelaskan tentang kebijakan yang berkaitan dengan program Kepala Daerah sebagai arah bagi SKPD maupun lintas SKPD dalam merumuskan kebijakan guna mencapai kinerja yang sesuai dengan tugas dan fungsinya.

BAB VII PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH

Bab ini menjelaskan tentang Program Pembangunan Daerah yang mencakup program SKPD, Program Lintas SKPD dan Program Kewilayahan serta Rencana Kerja yaitu Rencana Kerja Kerangka Regulasi dan Rencana Kerja Kerangka Pendanaan.

BAB VIII PENUTUP

Untuk menjamin keberlanjutan pembangunan, bab ini menjelaskan program transisi yaitu rancangan program indikatif 1 (satu) tahun ke depan setelah RPJM berakhir serta kaedah-kaedah pelaksanaan yang digunakan.



BAB II

GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

2.1. Kondisi Geografis dan Kependudukan

Kabupaten Dharmasraya merupakan salah satu dari 3 kabupaten baru hasil pemekaran di Sumatera Barat berdasarkan Undang-Undang Nomor 38 tahun 2003. Kabupaten ini lahir dari pemekaran Kabupaten Sawahlunto/Sijunjung yang terdiri dari 4 kecamatan dengan luas 2.961, 13 Km atau 296.113 Ha. Secara geografis kabupaten Dharmasraya berada pada posisi $00^{\circ} 47' 7''$ LS - $1^{\circ} 41' 56''$ Lintang Selatan (LS) dan $101^{\circ} 9' 21''$ BT - $101^{\circ} 54' 27''$ Bujur Timur (BT). Kabupaten Dharmasraya dilalui oleh jalur lalu lintas Sumatera dan berbatasan dengan:

- ✚ Sebelah Utara dengan Kab. Sawahlunto/Sijunjung dan kab. Kuantan Singingi Propinsi Riau
- ✚ Sebelah Selatan dengan Kab. Bungo dan Kab. Kerinci Provinsi Jambi
- ✚ Sebelah Timur dengan Kab. Tebo dan Bungo Propinsi Jambi
- ✚ Sebelah Barat dengan Kab. Solok dan Solok Selatan.

Suhu berkisar antara 21° C - 33° C dengan rata-rata hari hujan 14,35 hari per bulan dan rata-rata curah hujan 265,36 mm per bulan. Kondisi topografi Kabupaten Dharmasraya bervariasi antara berbukit, bergelombang dan datar dengan variasi ketinggian dari 98,3 M sampai 1.525 M dari permukaan laut. Sebagian besar jenis tanah di kabupaten Dharmasraya berjenis Podzolik Merah Kuning (PMK) yang didominasi oleh hutan hujan tropik dan perkebunan. Hutan seluas 133.186 Ha (44,98 %), perkebunan seluas 118.803 Ha (40,12 %) dan lain-lain sebesar (14.90 %).

Penduduk Kabupaten Dharmasraya menurut data tahun 2004 berjumlah 169.871 jiwa, terdiri dari 87.334 jiwa laki-laki dan 82.357 jiwa perempuan. Tingkat pertumbuhan penduduk jika dibandingkan dengan kondisi tahun 2003 (163.056 jiwa) meningkat 3,31 % dengan kepadatan 105 jiwa/km² dan merupakan salah satu daerah tujuan transmigrasi



di Propinsi Sumatera Barat. Hal ini dapat dilihat dari komposisi penduduk menurut suku bangsa diperoleh data Suku Minang 62,93%, Suku Jawa 32,96%, Suku Sunda 1,49%, Suku Batak 0,88%, Melayu 0,71% dan Suku lainnya 1,03%. Berdasarkan distribusi penduduk menurut tingkat usia, diperoleh data angkatan kerja (15-59 tahun) sebanyak 104.123 jiwa (61,30%) dengan tingkat ketergantungan 63,15%.

Dari data di atas terlihat bahwa secara kuantitas di Kabupaten Dharmasraya terdapat jumlah penduduk usia produktif lebih besar dari usia non produktif. Namun jika dikaitkan dengan tingkat ketergantungan terlihat bahwa dari setiap 100 orang penduduk usia produktif menanggung 630 orang penduduk usia non produktif.

Pada sisi lain menurut tingkat kesejahteraan keluarga sesuai dengan kriteria yang ditetapkan BKKBN pada tahun 2004 terdapat 35.347 kepala keluarga dengan tingkat klasifikasi menurut tingkat kesejahteraan keluarga sebagai berikut :

- | | |
|-----------------------|-------------|
| 1) Pra Sejahtera | : 3.237 KK |
| 2) Sejahtera I | : 7.371 KK |
| 3) Sejahtera II | : 16.904 KK |
| 4) Sejahtera III | : 4.788 KK |
| 5) Sejahtera III Plus | : 1.342 KK |

Dari data diatas, secara kuantitatif tingkat kemiskinan penduduk relatif masih cukup besar yaitu sejumlah 10.608 KK (30,01%) dari kelompok penduduk Pra Sejahtera dan Sejahtera I, sementara sisanya 24.739 KK (69.99%) berada pada kelompok Sejahtera II, III dan III Plus.



2.2. Perekonomian Daerah

2.2.1. Kondisi Umum

Kabupaten Dharmasraya memiliki potensi perekonomian yang cukup besar disektor produksi dan jasa. Perkembangan pasar saat ini cenderung menunjukkan jumlah masyarakat yang berbelanja ke luar kabupaten Dharmasraya cukup tinggi akibat belum terpenuhinya kebutuhan konsumen serta perbedaan harga pasar yang cukup signifikan dibandingkan daerah lainnya. Adapun sarana perdagangan yang ada saat ini terdiri dari pasar tradisional 3 buah, pasar lokal sebanyak 14 buah dan minimarket 5 buah.

Untuk mengetahui kondisi perekonomian suatu wilayah dalam periode tertentu, salah satu indikator penting yang digunakan adalah data PDRB (Produk Domestic Regional Bruto). Dengan menggunakan tahun 2000 sebagai tahun dasar baru, pada tahun 2004 perekonomian Kabupaten Dharmasraya berhasil tumbuh sebesar 4,66 persen. Pertumbuhan ekonomi tahun 2004 sedikit lebih tinggi dibandingkan dengan pertumbuhan tahun 2003 yang tumbuh sebesar 4,47 persen. Cukup tingginya pertumbuhan ekonomi pada tahun 2004 menunjukkan semakin baiknya pertumbuhan perekonomian yang terjadi di daerah ini yang tidak terlepas dari dampak pemekaran daerah dan recovery perekonomian secara nasional.

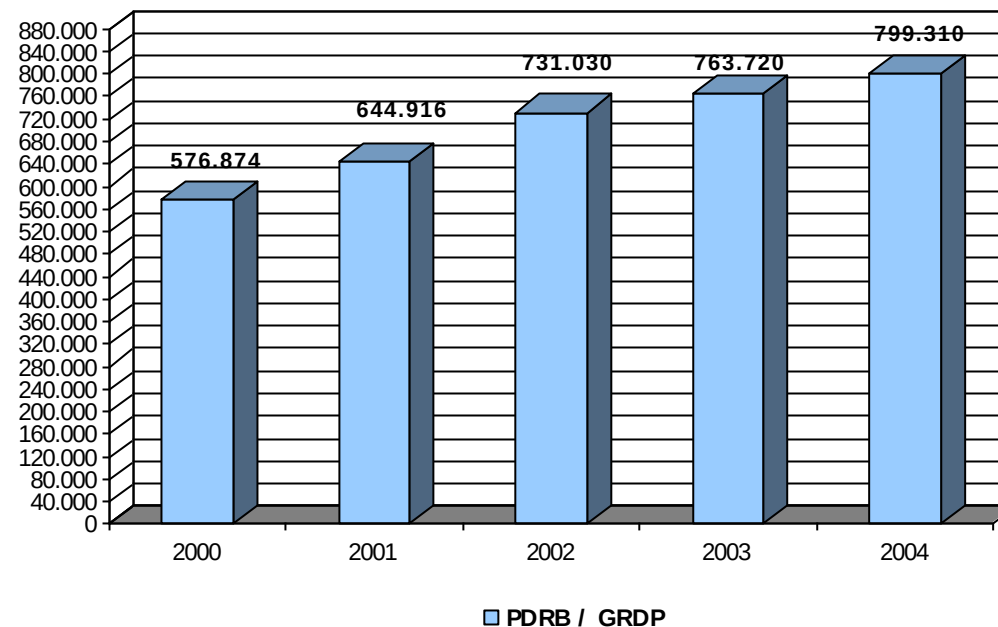
Secara nominal, nilai PDRB Kabupaten Dharmasraya menurut harga berlaku tahun 2004 tercatat sebesar Rp. 1,9 Triliyun yang mengalami peningkatan sebesar 12,78 persen dibandingkan dengan nilai PDRB tahun 2003. Sedangkan secara riil perekonomian Kabupaten Dharmasraya yang ditunjukkan oleh nilai PDRB berdasarkan harga konstan tahun 2000 mencapai Rp. 799,31 milyar tahun 2004 yang mengalami peningkatan 4,66 persen dari tahun 2003, dimana pada tahun 2003 nilai PDRB mencapai Rp. 763,72 milyar.

Sedangkan PDRB regional perkapita, yang dapat menunjukkan perkiraan rata-rata pendapatan penduduk juga mengalami peningkatan. Pada tahun 2003 pendapatan regional perkapita tercatat sebesar 5,73 juta rupiah



dan pada tahun 2004 meningkat menjadi 6,42 juta rupiah, atau meningkat sebesar 12,12 persen. Pertumbuhan PDRB Kabupaten Dharmasraya dari tahun 2000 sampai dengan tahun 2004 dapat dilihat pada Grafik 2.1. sebagai berikut:

Gambar 2.1
Perkembangan Nilai PDRB
Atas Dasar Harga Konstan Tahun 2000 (2000-2004) dalam Juta



Perekonomian Kabupaten Dharmasraya masih didominasi oleh sektor pertanian, sub sektor perkebunan merupakan sub sektor andalan dalam sektor pertanian beberapa tahun terakhir ini mengalami peningkatan. Peningkatan ini disebabkan karena adanya peningkatan pada produksi Kelapa Sawit. Kontribusi / nilai tambah



yang dapat disumbangkan oleh sektor pertanian ini dalam pembentukan PDRB Kabupaten Dharmasraya pada tahun 2004 sebesar 39,14 persen, dimana sedikit mengalami penurunan dibandingkan dengan tahun 2003 yakni sebesar 39,23 persen.

Sektor Jasa menempati urutan kedua terbesar yang memberikan nilai tambah dalam pembentukan PDRB Kabupaten Dharmasraya. Kalau dilihat dari masing-masing sub sektor, terlihat bahwa sub sektor Pemerintahan dan Pertanahan memberikan kontribusi yang paling besar yakni 12,13 persen, tetapi sedikit lebih rendah dibandingkan tahun 2003 yang memberikan 12,87 persen.

Sektor Perdagangan, hotel dan restoran termasuk yang cukup besar memberikan sumbangan dalam perekonomian Kabupaten Dharmasraya, yakni sebesar 11,72 persen pada tahun 2004. Nilai tersebut lebih besar ditunjang oleh kinerja sub sektor Perdagangan Besar dan Eceran yang tercatat sebesar 10,66 persen, yang sedikit lebih besar peranannya dibandingkan tahun 2003 yakni sebesar 10,50 persen.

Sektor lain yang juga cukup besar sumbangannya dalam perekonomian Dharmasraya adalah sektor bangunan. Meningkatnya peranan sektor ini telah mendorong meningkatnya produksi dan peranan sub sektor lain yakni sub sektor penggalan. Tahun 2004 sumbangan sektor bangunan dalam memberikan nilai tambah terhadap PDRB Dharmasraya adalah 11,88 persen dan lebih tinggi dari tahun 2003 yang mencapai 10,64 persen.

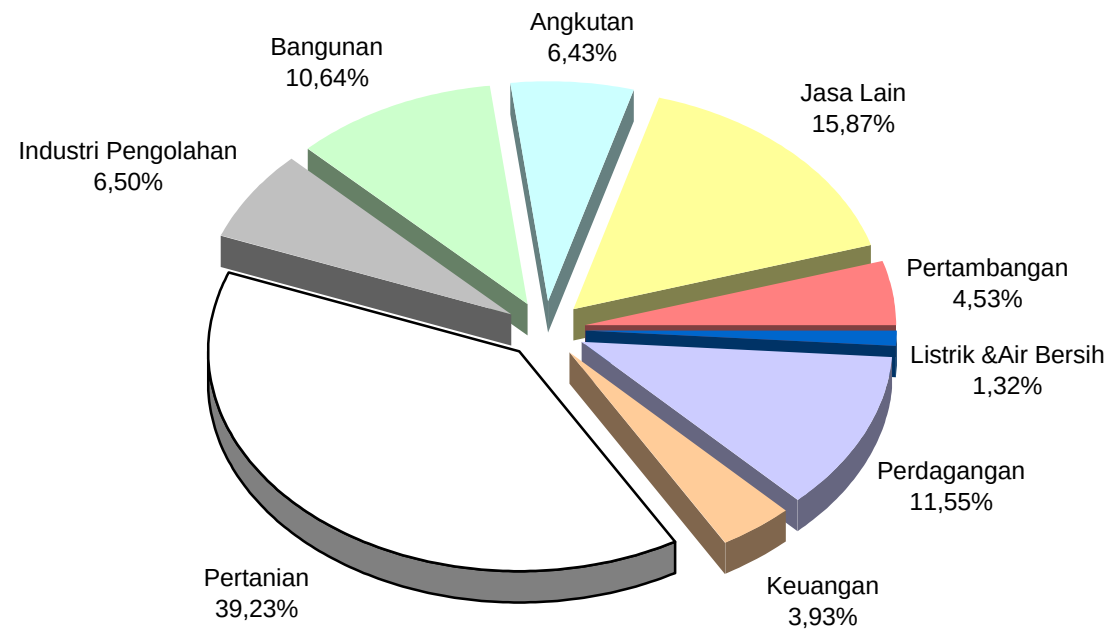
Sektor Angkutan dan Komunikasi juga merupakan sektor yang mempunyai andil cukup besar dalam pembentukan nilai PDRB. Pada tahun 2004 kontribusi yang disumbangkan oleh sektor ini sebesar 7,11 persen, yang berasal dari sub sektor Angkutan Darat 5,86 persen, sedangkan sub sektor Komunikasi hanya menyumbang sebesar 0,36 persen



Sektor-sektor lainnya seperti Industri Pengolahan, sektor Lembaga Keuangan dan sektor Listrik dan Air Bersih serta sektor pertambangan hanya memberikan sumbangan terhadap PDRB dibawah 10 persen. Rincian kontribusi masing-masing sektor dapat dilihat pada Grafik 2.2 sebagai berikut:

Gambar 2.2

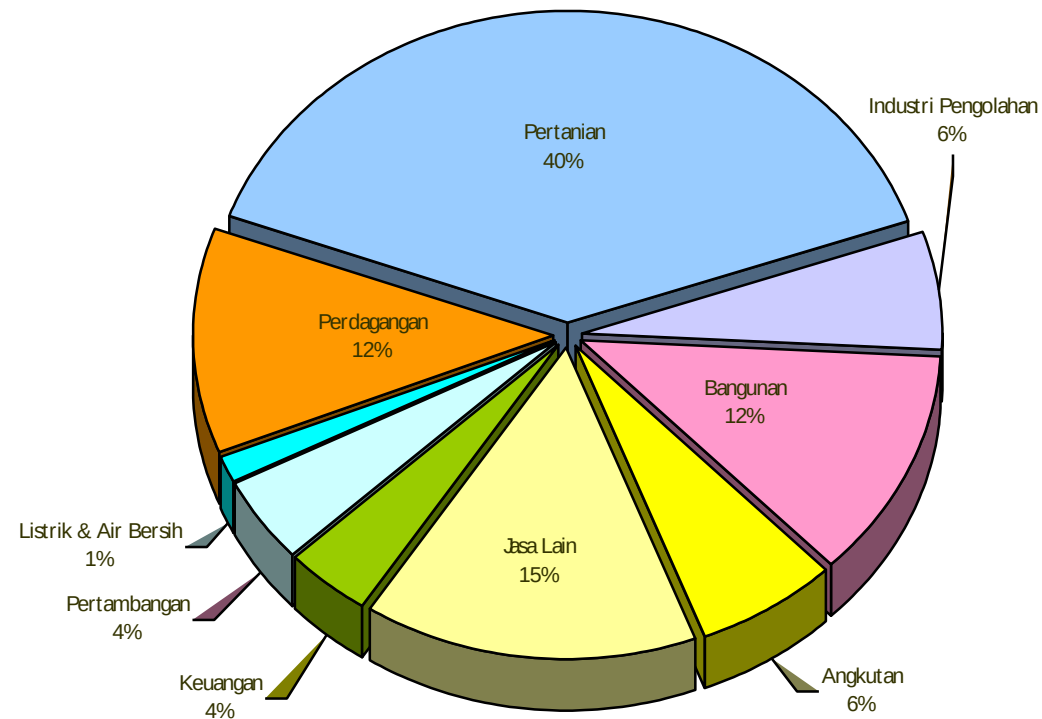
**KONTRIBUSI SEKTOR TERHADAP PDRB KAB. DHARMASRAYA
TAHUN 2003**





Gambar 2.3

KONTRIBUSI SEKTOR TERHADAP PDRB KAB. DHARMASRAYA TAHUN 2004



2.2.2. Pertanian

Sektor pertanian merupakan lapangan usaha yang memberikan nilai tambah yang cukup besar dalam pembentukan Produk Domestic Regional Bruto (PDRB). Sektor ini juga sebagai sektor yang terbesar menyerap tenaga kerja terutama bidang perkebunan, diikuti bidang lain seperti tanaman pangan dan hortikultura. Perkebunan yang berkembang cukup pesat adalah perkebunan kelapa sawit, karet dan coklat.



Berdasarkan luas lahan yang dikelola sebagai lahan pertanian seluas 53,16 % yaitu perkebunan 40,12 %, lahan sawah 2,56 %, lahan kering 6,28 %, pekarangan 2,04 %, kebun campuran 2,16 %. Produksi padi di kabupaten Dharmasraya tahun 2004 mencapai 38.591 ton, dengan porsi padi sawah 34.391 ton dan padi ladang 4.200 ton. Produksi ini turun 20,51 % dari tahun sebelumnya. Untuk mendorong upaya peningkatan produksi tanaman pangan dilakukan lanjutan Proyek Irigasi Batang Hari atau BHIP (*Batang Hari Irrigation Project*) yang direncanakan dapat meningkatkan luas sawah lebih kurang 16.000 Ha. Seiring dengan penyelesaian BHIP diharapkan dapat meningkatkan produksi dan kualitas produksi tanaman pangan.

Luas lahan sawah pada tahun 2004 adalah 7.563 Ha. Permasalahan dalam pengelolaan irigasi adalah tidak seimbangnya pasokan dengan kebutuhan, keberlanjutan daya dukung air terancam, lemahnya koordinasi kelembagaan dan tata laksana pengelolaan sumberdaya air, belum maksimalnya perpaduan lintas sektor dalam menjamin ketersediaan air, kurang optimalnya tingkat layanan irigasi, dan belum optimalnya pelaksanaan operasi dan pemeliharaan jaringan irigasi.

Dengan adanya BHIP diharapkan tidak hanya peningkatan produksi padi tapi juga dapat meningkatkan produksi tanaman palawija. Hal ini sangat penting mengingat telah terjadi penurunan produksi palawija pada tahun 2004. Sebagai contoh, produksi ubi kayu tahun 2003 sebesar 327.413 ton, pada tahun 2004 turun menjadi 68.610 ton, dan produksi jagung pada tahun 2003 sebesar 3.637 ton turun menjadi 3.241 ton pada tahun 2004.

Produksi buah-buahan di Kabupaten Dharmasraya pada tahun 2004 bervariasi ada yang mengalami kenaikan dan ada yang menurun. Buah-buahan yang produksinya turun antara lain buah - buahan populer seperti durian, duku dan nanas. Produksi durian turun dari 9.675,6 ton pada tahun 2003, turun menjadi 7.394 ton pada tahun 2004. Pada saat yang bersamaan produksi duku turun dari 636,5 ton menjadi 230,5 ton. Sedangkan buah nanas turun dari 16,1 ton menjadi 6,18 ton atau turun sebesar 62,5% dibandingkan tahun 2003.



Buah-buahan yang mengalami kenaikan produksi antara lain jeruk siam dari 406 ton pada tahun 2003 menjadi 2.259,25 ton pada tahun 2004 dan rambutan dari 1.081 ton menjadi 1.675 ton. Produksi buah-buahan lain yang mengalami peningkatan adalah pisang dan pepaya. Produksi pisang meningkat dari 306 ton menjadi 343 ton, meskipun luas panen turun sebesar -21,75%; sedangkan Produksi pepaya naik dari 17 ton menjadi 18 ton.

2.2.3. Peternakan

Populasi ternak besar/kecil pada tahun 2004 mengalami penurunan dibandingkan dengan tahun 2003. Populasi kerbau turun dari 15.473 pada tahun 2003 menjadi 7.824 ekor pada tahun 2004. Populasi kambing turun dari 10.143 ekor menjadi 8.359 ekor. Kedua ternak tersebut berbeda dengan sapi yang mengalami peningkatan dari 25.720 ekor menjadi 25.756 ekor. Peningkatan populasi ternak sapi ini pada tahun 2004 disebabkan oleh menurunnya tingkat konsumsi sapi. Demikian pula dengan penurunan populasi kerbau, justru diikuti oleh peningkatan jumlah ternak yang dipotong. Sementara untuk ternak unggas populasi naik sekitar 1.68 % untuk ayam kampung, 7,33 % untuk ayam ras dan 4,76 % untuk itik. Sedangkan untuk perikanan terjadi peningkatan produksi budi daya perikanan yaitu dari 772,52 ton menjadi 776,48 ton pada tahun 2004 terutama perikanan kolam. Sedangkan produksi ikan keramba, ikan sawah dan ikan sungai terjadi penurunan produksi.

Ditinjau dari sisi ekonomi peternak yang populasinya tergolong tinggi terutama di tingkat regional, kurang menguntungkan akibat ketidakjelasan pasar. Hal ini disebabkan oleh belum tersedianya pasar ternak yang mampu menampung produksi ternak di wilayah Kabupaten Dharmasraya, pada akhirnya peternak terpaksa menjual ternaknya melalui pedagang perantara.



Tabel 2.8
Populasi Ternak Ungas di Kabupaten Dharmasraya
Tahun 2001-2004

Tahun	Ayam Buras	Ayam Ras	Itik
2004	192.200	145.750	9.956
2003	189.013	135.800	9.504
2002	235.073	206.560	9.580
2001	162.292	157.860	12.852

Sumber : Kabupaten Dharmasraya dalam Angka Tahun 2004

2.2.4. Perkebunan

Perkebunan setiap tahunnya cenderung meningkat terutama coklat, kelapa dan pinang. Keadaan ini didorong oleh investasi swasta dan semakin tingginya minat masyarakat terhadap pengembangan komoditas ini. Komoditi perkebunan umumnya merupakan komoditi ekspor, sehingga peningkatan produksi mengakibatkan peningkatan ekspor. Dari 15 jenis tanaman perkebunan rakyat yang tercatat, 3 komoditi mengalami peningkatan produksi yang cukup tinggi pada tahun 2004, yaitu kelapa dari 702,5 ton menjadi 721,07 ton atau naik 2,64 %, pinang dari 2 ton menjadi 3,5 ton atau naik 75 %, dan coklat dari 29,8 ton menjadi 54,02 ton atau naik 84,1 %. Sedangkan komoditi lain seperti karet, kopi dan kelapa sawit sebagai komoditi utama mengalami penurunan. Seperti karet turun dari 59.431 ton menjadi 49.261,24 ton tahun 2004 atau - 17,11%, kopi dari 463,50 ton menjadi 439,46 ton atau - 5,19 %, dan sawit dari 482.504 ton menjadi 303.891 ton atau - 37,02 %.

Permasalahan bidang perkebunan adalah belum tersedianya bibit unggul yang terjamin dalam jumlah yang cukup, kualitas dan mutu yang rendah, harga yang rendah, rendahnya pengetahuan petani tentang penanganan pasca panen, tidak berkembangnya industri pengolahan dan tidak adanya kepastian pasar.



2.2.5. Kehutanan

Dari jumlah luas Dharmasraya, 45% adalah lahan hutan yang terdiri dari lahan hutan produksi terbatas seluas 45.226 atau 15,27 %, hutan produksi 12.907 Ha atau 4,36 % sedangkan hutan suaka alam seluas 5.696 Ha atau 1,92 %. Melihat kondisi hutan di Kab. Dharmasraya hal ini perlu menjadi perhatian untuk pengelolaannya terutama untuk mempertahankan keanekaragaman sumberdaya hayati dan kelestarian lingkungan.

Eksplorasi hasil hutan yang berlebihan pada akhirnya akan mengakibatkan kerugian pada masyarakat sendiri. Kabupaten Dharmasraya yang sebahagian besar wilayahnya masih merupakan kawasan hutan, maka tidak heran ditemui pelanggaran hukum dalam bentuk pembalakan liar (*illegal logging*). Lemahnya pengawasan dan penegakan hukum dalam pengelolaan sumber daya alam khususnya sumber daya kehutanan merupakan salah satu faktor masih tingginya pelanggaran hukum di bidang kehutanan selain faktor ekonomi masyarakat yang memiliki ketergantungan kepada hutan sebagai sumber mata pencahariannya. Namun pada dasarnya keberadaan *illegal logging* yang pada akhirnya akan merugikan masyarakat dapat dikurangi dengan meningkatkan pengawasan dan konsistensi dalam penegakan hukum.

2.2.6. Keuangan Daerah

Sebagai kabupaten baru yang dalam masa transisi, selama tahun 2004 belum banyak dana yang dikelola oleh pemerintah daerah kabupaten Dharmasraya, karena sebagian dana tersebut masih dikelola melalui Kabupaten Swl/Sijunjung. Pada tahun 2005 Kabupaten Dharmasraya telah memiliki APBD tersendiri dengan jumlah anggaran Pendapatan sebesar Rp. 106.644.649.214 yang terdiri dari Pendapatan Asli Daerah sebesar Rp. 7.732.781.000, Dana Perimbangan sebesar Rp. 93.218.763.714 dan Pendapatan Lain-lain yang sah sebesar Rp. 5.693.104.500,- dengan jumlah Belanja sebesar Rp. 106.814.649.214,- yang mengalami defisit sebesar Rp.



170.000.000,-. Dari uraian di atas terlihat bahwa Pendapatan Asli Daerah hanya 7,24% dari APBD Kabupaten Dharmasraya Tahun 2005.

Pendapatan yang berasal dari pendapatan asli daerah sebesar Rp. 7.732.781.000 terdiri dari penghasilan pajak daerah sebesar Rp. 2.251.500.000,- Retribusi Daerah Rp. 3.432.881.000,- Bagian Laba Hasil Usaha Daerah sebesar Rp. 45.000.000,- dan Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sebesar Rp. 2.003.400.000,- Dari potensi daerah sangat memungkinkan peningkatan pendapatan dari Pendapatan Asli Daerah melalui intensifikasi dan ekstensifikasi objek pajak dan retribusi daerah.

Pendapatan dari dana perimbangan sebesar Rp. 93.218.763.600 berasal dari :

- a. Bagi hasil pajak dan bukan pajak sebesar Rp. 9.109.732.600,-
- b. Dana Alokasi Umum sebesar Rp. 73.672.000.000,-
- c. Dana Alokasi Khusus sebesar Rp. 4.000.000.000,-
- d. Dana Perimbangan dari Propinsi sebesar Rp. 6.437.031.114.

2.2.7. Perbankan

Kabupaten Dharmasraya merupakan salah satu daerah yang menarik bagi dunia perbankan. Hal ini terlihat dari keberadaan cabang-cabang bank besar. Sampai tahun 2005 terdapat cabang Bank Mandiri, Bank BNI, Bank BRI, Bank BPD/Bank Nagari dan BPR. Di luar BPR dan Bank Mandiri, jumlah nasabah perbankan mencapai 24.360 nasabah, sebanyak 23.992 nasabah atau 98,48 % merupakan nasabah tabungan, sisanya dalam bentuk giro dan deposito. Dari nasabah ini terkumpul dana sebesar 34,197 milyar. Dari jumlah tersebut 26,667 milyar atau 78 % pada tabungan dan 5 milyar lebih atau 15 % berupa giro.



2.2.8. Koperasi

Secara umum jumlah koperasi yang ada pada tahun 2004 mengalami peningkatan dibandingkan tahun 2003, yaitu dari 103 unit menjadi 115 unit koperasi. Dari jumlah tersebut 45 unit berupa KUD, sedangkan Non KUD sebanyak 71 unit dari 58 unit pada tahun 2003. Peningkatan ini tidak terjadi pada keanggotaan. Jumlah anggota KUD turun dari 24.754 pada tahun 2003 menjadi 23.689 anggota tahun 2004. Sedangkan jumlah anggota Non KUD mengalami penurunan dari 7.962 anggota pada tahun 2003 menjadi 7.463 anggota pada tahun 2004.

Penurunan jumlah keanggotaan KUD berdampak langsung pada neraca keuangan KUD. Jumlah simpanan turun dari 2,04 milyar menjadi 1,863 milyar. Dana cadangan turun dari 898 juta menjadi 663 juta tahun 2004. Begitu juga volume usaha turun menjadi 4,452 milyar dari 143 milyar tahun 2003. Namun sisa hasil usaha (SHU) meningkat dari 643 menjadi Rp. 816 juta.

Untuk koperasi Non KUD turunnya keanggotaan relatif tidak mempengaruhi jumlah modal, dana simpanan, dan dana cadangan. Peningkatan yang cukup signifikan terjadi pada volume usaha dan SHU. Volume usaha meningkat dari 2,06 milyar menjadi 2,229 milyar. Peningkatan ini diiringi dengan peningkatan SHU dari Rp. 200 juta menjadi Rp. 829 juta.

2.2.9. Perindustrian

Industri kecil dan rumah tangga yang formal di kabupaten Dharmasraya pada tahun 2004 berjumlah 62 unit. Usaha industri kecil dan rumah tangga yang formal tersebut 32 unit (51,61 %) bergerak dalam usaha industri logam, mesin dan kimia yang bergerak dalam usaha hasil pertanian sebanyak 14 unit (22,58 %) dan yang lainnya sebanyak 16 unit usaha berupa industri aneka. Investasi secara keseluruhan mencapai 619 juta rupiah, di mana logam mesin dan kimia memakai 443 juta rupiah (71,5 %), industri pertanian sebesar 66 juta rupiah



(10,65 %) dan industri aneka mencapai 100,4 juta rupiah (17,8 %). Semua kegiatan industri tersebut baru memberikan lapangan usaha kepada 228 orang tenaga kerja yang tersebar secara merata pada semua industri. Penyerapan tenaga kerja di bidang ini lebih banyak pada anggota keluarga dan masyarakat terdekatnya. Pembinaan industri kecil dan menengah serta peningkatan investasi terutama pada industri hasil pertanian dan kehutanan dan industri logam, mesin dan kimia yang menyerap tenaga kerja lebih banyak perlu menjadi perhatian yang lebih serius.

Perkembangan industri perdagangan di kabupaten Dharmasraya tahun 2004 terdiri dari industri perdagangan kecil sebanyak 32 unit usaha, perdagangan besar 5 unit, perusahaan industri besar 4 unit, industri perdagangan menengah 5 unit.

2.3. Sosial Budaya Daerah

2.3.1. Kependudukan

Jumlah penduduk kabupaten Dharmasraya pada tahun 2004 sebesar 169.871 jiwa, terdiri dari 87.334 jiwa laki-laki dan 82.537 jiwa perempuan. Jumlah tersebut meningkat dibandingkan tahun 2003 (163.056 jiwa) dengan tingkat pertumbuhan penduduk 3,31 %. Tingginya tingkat pertumbuhan penduduk disebabkan karena Kabupaten Dharmasraya merupakan daerah yang dari segi ekonomi cukup kondusif, telah menjadi sebuah kabupaten baru di Propinsi Sumatera Barat sehingga banyak penduduk pendatang yang bekerja dan membuka usaha baru.

Penduduk Kabupaten Dharmasraya tersebar secara merata di semua kecamatan, dengan sebaran penduduk di Kecamatan Koto Baru sebesar 55.565 jiwa (12.662 KK), Kecamatan Sungai Rumbai sebesar 45.492 jiwa (11.509 KK), Kecamatan Sitiung sebesar 34.050 jiwa (7.997 KK) dan Kecamatan Pulau Punjung sebesar



34.764 jiwa (7.556 KK). Dari perbandingan jumlah penduduk dengan jumlah rumah tangga, rata-rata anggota keluarga di Kecamatan Pulau Punjung sebesar 4,60 jiwa/KK, Kecamatan Sitiung 4,26 jiwa/KK, Kecamatan Koto Baru 4,39 jiwa/KK dan Sungai Rumbai 3,95 jiwa/KK.

Kepadatan penduduk terbesar terdapat di Kecamatan Sitiung dengan kepadatan mencapai 105 jiwa/Km², Kecamatan Sungai Rumbai 57 jiwa/Km², Kecamatan Koto Baru 61 jiwa/Km², dan Pulau Punjung 37 jiwa/Km². Kabupaten Dharmasraya merupakan daerah transmigrasi yang penduduknya terdiri dari berbagai suku bangsa yaitu Minang 62,93% (106.899 Jiwa), Jawa 32,96 % (55.989 Jiwa), Sunda 1,49 % (2.531 Jiwa), Batak 0,88 % (1.495 Jiwa), melayu 0,71 % (1.206 Jiwa) dan suku lainnya 1,03 % (1.751 Jiwa).

Pembangunan sektor KB terkait pada dua aspek yaitu pembinaan Keluarga dan KB. Program pembinaan keluarga dan KB dilakukan secara rasional, fungsional dan proporsional. Program ini memiliki dua aktivitas yang saling terkait, terutama dikaitkan dengan kemampuan ekonomi keluarga dan peningkatan kualitas kemandirian keluarga. Dengan demikian akan dapat menjamin kelangsungan peningkatan kualitas generasi penerus, karena tanggung jawab komunitas terhadapnya sangat terbatas sifatnya.

Pemberdayaan KB merupakan program yang strategis dalam upaya peningkatan kemandirian ekonomi keluarga. Melalui program pembinaan keluarga dan KB dapat diwujudkan suatu keluarga kecil yang mandiri. Sedangkan pembangunan KB perlu ditempatkan pada dasar nilai-nilai agama dan budaya yang dimiliki oleh masyarakat, sehingga menjadi sebuah pilihan terutama pada keluarga mampu dari segi sosio ekonomi. Keikutsertaan dalam program KB didasarkan atas kesadaran untuk meningkatkan kualitas kesehatan, pendidikan dan sosial ekonomi dari seluruh anggota keluarga.

Untuk melihat perkembangan penduduk atas keberhasilan keluarga berencana (KB) dapat dilihat pada tabel di bawah ini.



Tabel 2.1
Jumlah Penduduk Menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin Tahun 2004

Kelompok Umur	Laki-laki (jiwa)	Perempuan (jiwa)	Jumlah (jiwa)	Rasio jenis Kelamin (%)
0 - 4	10.527	9.471	19.998	111,15
5 - 9	9.533	8.903	18.436	107,08
10 - 14	9.338	8.771	18.109	106,46
15 - 19	8.876	8.703	17.579	101,99
20 - 24	8.210	8.512	16.722	96,45
25 - 29	8.045	8.202	16.247	98,09
30 - 34	6.932	6.386	13.318	108,55
35 - 39	6.274	6.287	12.561	99,79
40 - 44	5.409	4.750	10.159	113,87
45 - 49	4.242	3.650	7.892	116,22
50 - 54	2.990	2.583	5.573	115,76
55 - 59	2.143	1.929	4.072	111,09
60 - 64	2.105	1.900	4.005	110,79
> 65	2.710	2.490	5.200	108,84
Jumlah	87.334	82.537	169.871	105,81

Sumber: Kab. Dharmasraya dalam Angka Tahun 2004

Jumlah pasangan usia subur (PUS) tahun 2004 dibandingkan dengan tahun 2003 terjadi peningkatan yaitu dari 26.940 PUS menjadi 29.293 PUS. Dari jumlah tersebut yang menjadi akseptor KB sebanyak 22.008 PUS. Alat kontrasepsi yang digunakan oleh para akseptor adalah cara suntik sebanyak 2.202 akseptor, minum pil sebanyak 612 akseptor dan implant sebanyak 320 akseptor, IUD 45 akseptor, Kondom 40 akseptor dan MO 1 akseptor.

Perkembangan keluarga secara garis besar dapat dilihat dari kondisi tingkat kesejahteraan keluarga. Berdasarkan kriteria kesejahteraan di Kabupaten Dharmasraya dari 35.347 Kepala Keluarga (KK) pada tahun 2004



sebanyak 4.323 KK masih berada pada kondisi **Pra Sejahtera**, atau naik dari 3.137 KK tahun 2003. Hal yang sama juga terjadi pada keluarga Sejahtera I naik dari 7.057 KK menjadi 7.371 KK. Keluarga Sejahtera II turun dari 18.487 KK menjadi 16.904 KK, keluarga sejahtera III dan III plus meningkat masing-masing dari 4.788 KK menjadi 5.854 KK dan 1.342 KK menjadi 1.981 KK sebagaimana terlihat pada tabel 2.2.tabel berikut :

Tabel 2.2
Jumlah KK Menurut Kecamatan dan Tingkat Kesejahteraan
di Kabupaten Dharmasraya Tahun 2004

Jumlah KK/ Tingkat Kesejahteraan		Kecamatan				Jumlah
		Sei. Rumbai	Koto Baru	Sitiung	Pulau Punjung	
Jumlah KK		8.929	11.182	7.686	7.550	35.347
Pra Sejahtera	Ekonomi	502	663	601	213	1.979
	Bukan Ekonomi	308	425	470	55	1.258
	Sub Total	810	1.088	1.071	268	3.237
Sejahtera I	Ekonomi	541	478	752	813	2.584
	Bukan Ekonomi	775	1.078	1.709	1.225	4.787
	Sub Total	1.316	1.556	2.461	2.038	7.371
Keluarga Sejahtera	II	2.744	5.852	3.560	4.748	16.904
	III	2.815	2.017	587	435	5.854
	III Plus	1.244	669	7	61	1.981
	Sub Total	6.803	8.538	4.154	5.244	24.739
Total		8.929	11.182	7.686	7.550	35.347

Sumber: Kabupaten Dharmasraya Dalam Angka Tahun 2003



2.3.2. Pendidikan

Pendidikan mempunyai peranan yang sangat strategis dalam proses pembangunan sumber daya manusia. Tingkat pendidikan masyarakat dapat dijadikan salah satu indikator keberhasilan dalam pembangunan. Memasuki millenium ketiga bangsa Indonesia dihadapkan pada tantangan yang semakin berat dengan situasi kondisi serta lingkungan yang senantiasa berubah. Dalam mewujudkan sumber daya yang mandiri, beretos kerja dan berdaya saing tinggi perlu didukung oleh iklim yang kondusif melalui partisipasi semua pihak. Rendahnya kualitas sumber daya manusia tidak terlepas dari kualitas pendidikan baik dari segi anak didik maupun dari tenaga pendidik. Kondisi ini sangat dipengaruhi oleh sarana dan prasarana pendidikan serta tingkat kesejahteraan tenaga pendidik.

Angka Partisipasi Kasar (APK) dan Angka Partisipasi Murni (APM) tertinggi terdapat pada tingkat sekolah dasar (SD). Dari tabel terlihat masih banyaknya siswa lulusan SD yang tidak tertampung di SMP dan lulusan SMP yang tidak tertampung di SLTA. Di 149 unit SD/MI terdapat tenaga pengajar $\pm$ 1132 orang yang terdiri dari guru kelas 782 orang, guru kepala 134 orang, guru olah raga 41 orang dan guru agama 115 orang dan penjaga sekolah 70 orang dengan klasifikasi guru layak sebanyak 604 orang; setengah layak sebanyak 507 orang, dan tidak layak sebanyak 21 orang.

Perkembangan pembangunan bidang pendidikan ditandai dengan pemerataan dan peningkatan kesempatan bagi penduduk usia sekolah untuk mengikuti pendidikan pada berbagai tingkat dan jenis pendidikan. Kondisi pendidikan Kabupaten Dharma Raya dapat dilihat pada tabel 2.3.



Tabel 2.3
Indikator Pemerataan Pendidikan Dasar dan Menengah
di Kabupaten Dharmasraya Tahun Ajaran 2004/2005

No	Indikator	SD+MI (%)	SMP+MTS (%)	SLA+MA (%)	TK (%)
1	APK	102	65,7	28,78	-
2	APM	90	49,3	24,78	-
3	Rasio Siswa/Guru	21,68	14,02	14,24	17,43
4	Rasio Siswa/Kelas	23,21	34,62	36,79	21,18
5	Rasio Siswa/Sekolah	152,53	314,18	500,4	27,61
6	Tamatan	2.770	1.540	600	-
7	Tingkat pelayanan sekolah				
8	Angka melanjutkan	-	44,40	38,96	-
9	Klasifikasi Pendidikan Guru				-
	a. SPG/KPG	453	4	-	
	b. D I	51	18	-	
	c. D II	658	157	-	
	d. D III	1	252	35	
	e. S 1	28	37	145	

Sumber: Kabupaten Dharmasraya Dalam Angka Tahun 2004 (Hasil Olahan)

Di 17 unit SMP/MTSN terdapat tenaga pengajar ± 372 orang yang terdiri dari: guru kelas 152 orang, guru kepala 17 orang, guru olahraga 7 orang dan guru agama 17 orang dan penjaga sekolah 17 orang. Klasifikasi guru layak sebanyak 137 orang, setengah layak sebanyak 93 orang, dan tidak layak sebanyak 23 orang. Sedangkan jumlah SMP/MTS Swasta 13 unit dengan jumlah guru 229 orang, dan 7 unit SLTA yang terdiri dari 4 SMA, 2 SMK dan 1 MAN. Jumlah guru keseluruhan sebanyak 203 orang dengan klasifikasi guru layak sebanyak 99 orang, setengah layak sebanyak 96 orang, dan tidak layak sebanyak 8 orang. Sedangkan MAS berjumlah 9 unit dengan jumlah guru sebanyak 191 orang. Jumlah Sekolah dan Guru di Kabupaten Dharmasraya dapat dilihat pada tabel 2.4.



Permasalahan lain di bidang pendidikan adalah gedung sekolah dasar dari 144 gedung sebagian besar berada dalam kondisi rusak yaitu sebanyak 68 unit berada dalam kondisi rusak berat dan sebanyak 46 unit dalam kondisi rusak ringan, dan yang kondisinya baik hanya 30 unit sedangkan yang MI dan SD Swasta berada dalam kondisi rusak ringan. Sedangkan untuk bangunan SLTP dan SLTA dalam keadaan rusak ringan, namun untuk gedung MTs dan MAS kondisinya kurang memadai.

Tabel 2.4
Tabel Jumlah Sekolah dan Guru menurut Kecamatan di Kabupaten Dharmasraya
Tahun 2005

Jenis Sekolah	Kec. Sungai Rumbai		Kec. Koto Baru		Kec. Sitiung		Kec. Pulau Punjung	
	Jml Sekolah	Jml Guru	Jml Sekolah	Jml Guru	Jml Sekolah	Jml Guru	Jml Sekolah	Jml Guru
• SD Negeri	30	215	44	319	31	227	35	224
• SD Swasta	5	37	-	-	-	-	-	-
• MI Negeri	1	13	1	12	-	-	-	-
• MI Swasta	1	8	1	9	-	-	-	-
• TK	24	26	35	70	18	20	12	25
• RA	2	5	4	7	-	-	2	10
• SMP Negeri	4	89	5	112	3	70	4	101
• SMP Swasta	-	-	-	-	1	9	-	-
• MTSN	-	-	1	21	-	-	-	-
• MTSS	2	28	4	60	5	88	2	44
• SMA Negeri	1	22	2	84	1	47	2	52
• SMA Swasta	-	-	-	-	-	-	-	-
• SMK	-	-	1	-	-	-	1	-
• MAN	-	-	1	29	-	-	-	-
• MAS	-	-	2	38	4	67	2	35



2.3.3. Perpustakaan Daerah dan Kearsipan

Kebutuhan terhadap ilmu pengetahuan dan informasi dapat terpenuhi apabila tersedianya dan terjangkaunya bahan-bahan perpustakaan. Perpustakaan bukan hanya berarti kumpulan koleksi buku-buku, majalah atau terbitan berkala lainnya. Tetapi perpustakaan mempunyai fungsi yang lebih luas yaitu sebagai jendela informasi dan komunikasi antar sektor yang terdapat dalam pemerintah kabupaten Dharmasraya. Perpustakaan Daerah sangat diperlukan mengingat bahwa sekian banyak dokumen dan hasil-hasil kegiatan pembangunan yang telah dilaksanakan oleh pemerintah bersama dengan masyarakat, namun tidak terdapat dokumentasi yang baik untuk menyimpan, menata dan mengelolanya.

Disamping itu juga belum ada tempat bacaan atau pustaka umum. Pada masing-masing instansi pemerintah kabupaten hanya terdapat lemari buku tentang dokumentasi kebijakan yang dijadikan acuan bagi instansi tersebut. Kondisi ini tidak menguntungkan bagi peneliti, pemerhati dan para aparatur sendiri serta pihak-pihak lain yang menginginkan data, informasi dan dokumentasi tentang perkembangan pembangunan Kabupaten Dharmasraya.

Oleh sebab itu sangat dirasakan kebutuhan terhadap perpustakaan daerah yang kehadirannya diharapkan dapat mengoleksi, merangkum dan mengolah data tentang berbagai aspek yang terkait dengan perkembangan pembangunan kabupaten Dharmasraya. Perpustakaan daerah menjadi salah satu kelengkapan pemerintah daerah dalam upaya peningkatan kualitas sumber daya manusia dan menyajikan pelayanan sistem informasi terhadap yang membutuhkannya.



2.3.4. Kesehatan

Pembangunan kesehatan di Kabupaten Dharmasraya relatif masih kurang dan perlu ditingkatkan, terbukti dengan rendahnya aksesibilitas pelayanan kesehatan kepada masyarakat. Permasalahan kesehatan yang dihadapi pada tahun 2004 dilihat dari indikator kesehatan seperti Angka Kematian Bayi (AKB), Angka Kematian Ibu (AKI), Angka Kematian Balita (AKABA) masih cukup tinggi, Kematian Tetanus Neonatorum (TN) dan kematian akibat tersangka rabies, status gizi (Anak balita, ibu hamil, ibu menyusui dan anemia anak remaja) masih rendah, serta masih tingginya tingkat angka kesakitan yang disebabkan penyakit infeksi, seperti diare, infeksi saluran pernapasan atas (ISPA), TB Paru, Malaria, dan Usia Harapan Hidup (UHH) yang masih rendah karena masih rendah Perilaku Hidup Sehat (PHBS). Kondisi ini diperberat oleh keadaan geografis Kabupaten Dharmasraya sebagian besar sulit dijangkau daerah hutan (bergunung-gunung, aliran sungai yang deras, dan berjurang-jurang) serta infrastruktur jalan ke daerah terpencil dan sangat terpencil (Hutan dan Perkebunan) masih belum bisa dilalui oleh kendaraan roda 4.

Gambaran derajat kesehatan masyarakat dan cakupan terhadap akses dan mutu pelayanan kesehatan serta fasilitas kesehatan (Puskesmas, Pustu, Polindes dan Rumah Sakit) berdasarkan data profil kesehatan Kabupaten Dharmasraya tahun 2003 dan 2004 dapat dikemukakan sebagai berikut :

- a. AKI sekitar 390 per 100,000 kelahiran hidup (tahun 2003) dan untuk tahun 2004 sebanyak 5 orang dari 3.848 ibu melahirkan;
- b. AKB tahun 2003 sebesar 16,9 per 1000 kelahiran hidup dan tahun 2004 sebesar 20,99 %o dari 3.145 kelahiran (pencatatan dan pelaporan di tingkat puskesmas perlu pembenahan lebih lanjut)
- c. Status Gizi :
 - ☞ Gizi buruk > 5% dan gizi kurang anak balita 24,3%



- ☞ Anemia Gizi Besi Ibu Hamil 60%;
- ☞ Remaja Putri mencapai 70% menderita Anemia Gizi Zat Besi;
- ☞ Endemik Gaky dengan TGR masih diatas 30%.

d. UHH sebesar 64,5 tahun (tahun 2003)

e. Angka Kesakitan :

- ☞ Diare :23,89 % (tahun 2004)
- ☞ ISPA :32,9 % (tahun 2004)
- ☞ Malaria : 36,79/1000 (AMI) - tahun 2004

f. TB Paru tahun 2003 penerimaan suspek sebesar 25,6 %, CDR sebesar 23,4 % dan tingkat CFR mencapai 52,6 %

g. Cakupan Kesehatan Lingkungan :

- ☞ Sarana Air Bersih baru mencapai 20 % (tahun 2004)
- ☞ Jamban Keluarga 36 % (tahun 2004)
- ☞ TTU 53,8 % (tahun 2004), koordinasi antar sektor kurang
- ☞ PHBS 2,65 %

Pembangunan kesehatan merupakan bagian terpadu dari pembangunan sumber daya manusia dalam upaya peningkatan kualitasnya, sehingga dapat diwujudkan kabupaten yang maju dan mandiri serta sejahtera lahir batin. Keberhasilan pembangunan kesehatan tidak hanya ditentukan oleh kinerja sektor kesehatan semata akan tetapi dipengaruhi oleh interaksi yang dinamis dari berbagai sektor.

Upaya untuk menjadikan pembangunan nasional berwawasan kesehatan sebagai salah satu misi yang strategis harus menjadi komitmen semua pihak. Sehubungan dengan Visi Departemen Kesehatan Republik Indonesia Menjadikan Indonesia Sehat 2010, maka dalam rencana pembangunan kesehatan 5 tahun kedepan



diarahkan untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat, lingkungan yang bersih, aman, nyaman dan kualitas sumberdaya manusia. Bentuk programnya diwujudkan untuk meningkatkan usia harapan hidup serta menurunkan angka kematian bayi dan ibu hamil.

Pemerataan dan ketersediaan fasilitas pelayanan kesehatan dalam menjangkau seluruh masyarakat dan untuk meningkatnya peran aktif masyarakat dalam pelayanan kesehatan serta perbaikan gizi keluarga akan dapat mendorong upaya peningkatan kesehatan, jumlah tenaga medis dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.5
Jumlah Fasilitas Kesehatan di Kabupaten Dharmasraya Tahun 2004 (dalam unit)

No	Fasilitas Kesehatan	Tahun 2005	Rusak Ringan	Rusak Berat	Baik
1	RSUD	1	1	-	-
2	Puskesmas	8	7	-	1
3	Puskesmas pembantu	45	15	30	-
4	Puskesmas Keliling	8	5	3	-
5	Polindes	66	30	28	15
6	Posyandu	171	-	-	-
7	Klinik	1	-	-	-
8	Praktek dokter	10	-	-	-
9	Rumah bersalin	13	-	-	-
10	Apotik	1	-	-	-
11	Toko Obat	23	-	-	-
12	Gudang farmasi	1	1	-	-

Sumber: Dinas Kesehatan Kab.Dharmasraya 2005



Tabel 2.6
Jumlah Tenaga Kesehatan di Kabupaten Dharmasraya tahun 2004

No	Jenis	Jumlah (orang)
1	Dokter Umum	7
2	Dokter Spesialis	4
3	Dokter Gigi	5
4	Perawat	33
5	Bidan	70
6	Ahli Kesehatan Masyarakat	7
7	Apoteker	5
8	Ahli Gigi	3
9	Analisis Laboratorium	20
10	Ahli Rontgen	3
11	Ahli Penyehatan Lingkungan	13
12	Dukun Beranak	285
13	Bidan Desa	63

Sumber: Dinas Kesehatan Kab.Dharmasraya 2005

2.3.5. Agama

Pembangunan kehidupan beragama merupakan upaya untuk memenuhi salah satu hak dasar rakyat, yaitu hak memeluk agama dan beribadat menurut keyakinan masing-masing sebagaimana diatur di dalam UUD 1945, Bab XI Pasal 29 (1) dan (2), yang menegaskan bahwa "Negara berdasarkan atas Ketuhanan Yang Maha Esa" dan "Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agama dan kepercayaannya itu."

Pemahaman agama masih belum sepenuhnya diaktualisasikan dalam pengamalan ajaran-ajaran agama secara nyata. Kehidupan beragama pada sebagian masyarakat baru mencapai tataran simbol-simbol keagamaan dan belum sepenuhnya bersifat substansial. Hal ini tercermin antara lain pada gejala negatif seperti perilaku



asusila, praktik KKN, penyalahgunaan narkoba, pornografi, pornoaksi, dan perjudian. Selain itu, angka perceraian yang masih tinggi dan ketidakharmonisan keluarga menunjukkan masih lemahnya peran keluarga sebagai basis pembinaan masyarakat dan bangsa. Berbagai perilaku masyarakat yang bertentangan dengan moralitas dan etika keagamaan itu jelas menggambarkan kesenjangan antara ajaran agama dengan pemahaman dan pengamalannya.

Agama Islam memiliki kedudukan strategis karena memberi landasan pemikiran dan tuntunan bagi manusia dalam kehidupannya dan sekaligus sebagai landasan spiritual, moral dan etika bermasyarakat. Dengan demikian agama Islam merupakan sistem nilai yang diamanatkan oleh pemeluknya yang berkembang dan mampu hidup berdampingan secara damai dengan agama lainnya.

Beragamnya agama yang ada bukan menjadi halangan bagi masyarakat untuk berinteraksi, perilaku berbudi luhur dan menjunjung tinggi nilai-nilai agama dan adat yang telah menyatu tidak dapat dipisahkan dengan kehidupan masyarakat. Persentase perbandingan agama di kabupaten Dharmasraya adalah Islam 99,24 %, Protestan 0,38 %, Katolik 0,35 %, Budha 0,02 %, Hindu 0,01 %.

Kenyataan ini tidak dapat dipungkiri lagi, karena terjalannya ajaran agama dan unsur adat telah diabadikan dalam filosofis Masyarakat Minangkabau “ *Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah*”, sebagai implementasinya dalam kehidupan diungkapkan “*Syarak Mangato, Adat Mamakai, Lazim Dek Syarak, Kawin Dek Adat*”, artinya kehidupan masyarakat telah diatur dan dituangkan ke dalam tatanan filosofis Minangkabau.

Disamping itu melalui sarana pendidikan beragama telah diupayakan pula peningkatan pengetahuan keagamaan bagi generasi muda dalam rangka peningkatan SDM yang berlandaskan keagamaan (imtaq dan iptek). Menyatunya ajaran agama dan adat istiadat dalam tata kehidupan masyarakat tersebut juga berpengaruh dalam



sistem struktur dan interaksi sosial warga kabupaten Dharmasraya. Sarana dan prasarana ibadah di Kabupaten Dharmasraya dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Tabel 2.7
Sarana dan Prasarana Ibadah, TPA & TPSA
di Kabupaten Dharmasraya Tahun 2005 (dalam unit)

Kecamatan	Mesjid	Langgar	Mushola	TPA	TPSA
Sungai Rumbai	27	58	20	48	16
Koto Baru	58	81	5	66	30
Sitiung	26	122	3	20	13
Pulau Punjung	35	78	12	39	27
Jumlah	146	339	40	173	86

Sumber: Kabupaten Dharmasraya dalam Angka Tahun 2004

2.3.6. Sosial Kemasyarakatan

Masalah pembinaan kesejahteraan sosial menyangkut masalah warga yang lanjut usia, fakir miskin, anak terlantar, lanjut usia terlantar, gelandangan dan pengemis, penyandang cacat, serta pengungsi dan korban bencana alam dan veteran yang semakin besar persentasenya dimasa depan. Kualitas dan kuantitas pembinaan kesejahteraan sosial mengalami degradasi terutama sejak krisis ekonomi tahun 1997. Dampak krisis ekonomi terhadap pembinaan kesejahteraan sosial dirasakan dengan kondisi menipisnya kontrol sosial (maraknya berbagai kejahatan seperti pencopetan, penodongan, perampokan dan penipuan). Menurunnya kualitas hidup (meningkatnya biaya kesehatan dan penyalahgunaan narkoba dan kekurangan energi dan protein/KEP, dan gizi buruk balita), peningkatan jumlah kelompok miskin (anak jalanan, peminta dan pengamen) dan penyimpangan sosial.



2.3.7. Pemuda dan Olahraga

Pemuda merupakan salah satu pilar penggerak dan pelopor pembangunan, berdasarkan kriteria Badan Perencana Pembangunan Nasional (BAPENAS) kategori pemuda adalah penduduk pada usia 15 - 35 tahun. Berdasarkan kriteria tersebut maka pada tahun 2003 jumlah penduduk yang berusia 15 - 34 adalah 61.305 jiwa (37,60 %) dari total jumlah penduduk dan pada tahun 2004 penduduk berusia 15 - 34 tahun adalah 63.866 jiwa (37,60%) dari total jumlah penduduk di Kabupaten Dharmasraya.

Sebagai sarana untuk aktualisasi diri pemuda dapat disalurkan melalui organisasi/ perkumpulan pemuda seperti karang taruna, persatuan pemuda Nagari, persatuan pemuda tarbiyah, pemuda Muhammadiyah, AMPI, PPM dan lain-lain yang seluruh organisasi tersebut terhimpun kedalam wadah KNPI.

Untuk meningkatkan budaya olahraga dan mengolahragakan masyarakat dan dalam rangka membawa nama daerah kelomba-lomba/pertandingan tingkat Propinsi maupun Nasional telah ada top organisasi olah raga sebagai berikut PSSI, PBSI, PBVSI, PASI, PERBASI, PTMSI, PGSI dan lain-lain. Seluruh top cabang olahraga terhimpun kedalam Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Dharmasraya.

2.3.8. Pariwisata, Seni dan Budaya

Sektor kepariwisataan memiliki *multiplier effect* yang cukup tinggi apabila dikelola dan dikembangkan dengan konsep perencanaan yang matang terhadap pengembangan potensi wisata yang ada, khususnya di wilayah Kabupaten Dharmasraya. Potensi wisata di Kabupaten Dharmasraya memiliki nilai yang khusus apalagi dikelola dengan baik yang meliputi potensi wisata alam dan wisata sejarah/budaya.

Objek wisata yang ada selain belum dilengkapi oleh sarana dan prasarana penunjang, juga belum terintegrasinya pengembangan dari objek-objek wisata yang ada di Kabupaten Dharmasraya dengan objek wisata



yang ada di Sumatera Barat. Keberadaan jasa penunjang sektor kepariwisataan di Kabupaten Dharmasraya saat ini baru meliputi biro perjalanan, jasa hotel / penginapan, restoran dan rumah makan.

Namun keterbatasan dari berbagai aspek baik yang terkait dengan sistem maupun sumber daya aparatur menyebabkan pengelolaan objek wisata yang ada belum dilakukan secara profesional dan dengan konsep yang matang, seperti objek wisata Air Terjun Timbulun Indah dan Bendung Batang Hari di Pulau Punjung, Air Terjun Pangian, Panorama Puncak Gunung Medan, Wisata Perkebunan, Ngalau Cigak, Wisata Buru Babi dan Situs Kerajaan Dharmasyara Sungai Lansek. Selain keberadaan objek wisata dapat juga dikembangkan event-event atau atraksi wisata yang khas seperti Selaju Sampan, *Motorcross*, Adu Bagong (babi dengan anjing) dan sebagainya.

Kesenian dan kebudayaan daerah serta upaya pelestarian terhadap artefak budaya daerah dalam menjaga kelestarian seni dan budaya membentuk identitas daerah. Kabupaten Dharmasraya yang penduduknya multi etnis, memiliki tingkat heterogenitas masyarakat yang cukup tinggi dengan keragaman seni dan budaya. Keragaman seni dan budaya ini apabila dikembangkan akan mampu memberi nilai lebih maupun nilai jual di sektor wisata seperti pelaksanaan pentas budaya yang menampilkan seni budaya Randai, Saluang, Rabab, Silat, Kuda Lumping, Wayang, ketoprak, Calung serta Angklung dan lain-lain.

2.4. Prasarana dan Sarana Daerah

2.4.1. Prasarana Dasar

Sasaran pembangunan di bidang prasarana dasar adalah pada ketersediaan prasarana jalan, irigasi, dan lingkungan permukiman serta penataan ruang wilayah yang menjadi pedoman dalam pelaksanaan pembangunan. Ketersedian prasarana jalan merupakan salah satu faktor utama di samping prasarana lainnya untuk penunjang



ekonomi masyarakat guna kelancaran mobilitas hasil produksi/ masyarakat pengguna jasa jalan, sehingga dapat menekan produksi biaya tinggi.

Kabupaten Dharmasraya memiliki ruas jalan sepanjang 734,70 Km yang terdiri dari jalan Negara 62,50 Km, jalan Propinsi 83,50 Km dan jalan Kabupaten sepanjang 588,70 Km. Panjang jalan menurut Kecamatan dan jenis permukaan di Kabupaten Dharmasraya di luar jalan Negara dan jalan Propinsi dapat di lihat pada tabel di bawah ini :

Tabel 2.9
Panjang jalan menurut Kecamatan dan Jenis Permukaan
di Kabupaten Dharmasraya tahun 2002-2004

Kecamatan	Jenis Permukaan			Jumlah (KM)
	Aspal (KM)	Kerikil (KM)	Tanah (KM)	
• Sungai Rumbai	27,40	51,10	74,10	152,60
• Koto baru	42,30	37,20	16,50	96,00
• Sitiung	32,20	62,20	20,50	114,90
• Pulau Punjung	41,80	72,20	110,80	227,80
Jumlah 2004	143,70	225,70	221,90	591,30
2003	309,05	135,60	92,00	536,65
2002	774,61	529,40	271,70	1.575,71

2.4.2. Irigasi

Keberadaan irigasi Batang Hari yang diharapkan akan mampu mengairi areal persawahan seluas 18.936 Ha di wilayah Kabupaten Dharmasraya Provinsi Sumatera Barat, hingga saat ini telah memberikan kontribusi terhadap peningkatan sektor pertanian $\pm$ 4.986 Ha. Namun saat ini masih terdapat beberapa Daerah Irigasi (DI)



yang belum terjangkau oleh Bendung Irigasi batang Hari (BIBH), yaitu sebanyak 77 Daerah Irigasi dengan luas areal yang diairi 5.156 Ha. Luas Areal DI yang belum terlayani oleh BIBH tersebut sebahagian sudah memiliki irigasi kecil namun keberadaannya belum memadai terutama pada saat musim kemarau panjang.

2.4.3. Listrik

Potensi sumber daya listrik berasal dari pembangkit tenaga listrik yang setiap tahun bertambah jumlah pelanggannya. Untuk masa akan datang masih perlu penyediaan unit pembangkit baru dan jaringan baru terutama pada daerah terpencil. Konsumsi listrik di kabupaten Dharmasraya setiap tahun cenderung meningkat seiring meningkatnya jumlah pelanggan dan kesejahteraan masyarakat.

Jumlah pelanggan tahun 2002 sebanyak 17.459, tahun 2003 sebanyak 19.613 dan selama tahun 2004 pelanggan listrik mencapai 21.812 pelanggan dari berbagai kelas tarif. Jadi setiap tahunnya terjadi peningkatan jumlah pelanggan sekitar 10,50 %. Pelanggan listrik terbanyak berasal dari golongan rumah tangga (R1). Golongan Rumah tangga menghasilkan 18.078.102 Kwh. Industri besar menghabiskan sebesar 8.299.000,- Kwh selama tahun 2004.

Permasalahan yang dihadapi dalam meningkatkan dan pemerataan listrik sampai ke daerah terpencil meliputi sebagian besar sumber daya mineral dan belum didukung data yang akurat untuk dijadikan acuan bagi investor dalam menanamkan modal, meningkatnya permintaan penyediaan sumber daya listrik dan belum tersedianya jaringan sampai ke daerah, terlihat bahwa kondisi tahun 2004 wilayah Kabupaten Dharmasraya masih terdapat 17.912 kk atau (45,09 %) wilayah permukiman dan lapangan usaha yang belum terlayani melalui jaringan PLN. Kondisi ini tersebar di 4 (empat) kecamatan.



2.4.4. Fasilitas Permukiman

Sarana dan prasarana lingkungan permukiman terutama terhadap cakupan air bersih, jalan lingkungan dan MCK di Kabupaten Dharma Raya masih belum memadai, terutama dalam penyediaan air bersih yang ada pada Tahun 2003 baru mencapai $\pm 20\%$, sedangkan berdasarkan program Nasional tingkat pelayanan air bersih harus mencapai 60 %.

Berkaitan dengan sanitasi lingkungan seperti drainase, MCK, Jamban Keluarga dan instalasi pembuangan air limbah pada umumnya masih diabaikan oleh masyarakat, hal ini dapat mengakibatkan berjangkitnya penyakit lingkungan seperti diare, demam berdarah dan lain-lain. Kondisi ini perlu mendapat perhatian khusus baik oleh pemerintah daerah maupun oleh masyarakat itu sendiri.

2.4.5. Penataan Ruang

Penataan ruang wilayah sangat mutlak diperlukan dalam pelaksanaan pembangunan khususnya untuk memberikan acuan yang jelas dalam proses perencanaan, pemanfaatan dan pengendalian pemanfaatan ruang. Keberadaan tata ruang wilayah yang jelas akan mampu mengeliminasi tumpang tindih peruntukan lahan yang terjadi sebagai akibat adanya perubahan penggunaan ruang yang merupakan konsekuensi logis dari gerak laju pembangunan.

2.4.6. Daerah Tertinggal dan Kawasan Perbatasan

Dalam rangka membuka keterisolasian serta peluang ekonomi pada kawasan perbatasan yang selama ini cenderung terabaikan, untuk mengejar ketertinggalan tersebut akan diupayakan untuk membuka akses melalui pembangunan jalan menuju kabupaten atau provinsi tetangga. Ruas jalan yang diupayakan tersebut antara lain



ruas Lubuk Besar Kecamatan Sungai Rumbai - Batas Solok Selatan, ruas Padang Laweh Kecamatan Koto Baru - Perbatasan kabupaten Kuantan Singingi Propinsi Riau dan ruas Lubuk Karak Kecamatan Pulau Punjung - Lubuk Tareh Kabupaten Solok.

Kondisi infrastruktur pedesaan yang menjadi faktor utama ketertinggalan beberapa kawasan yang menyebabkan ekonomi biaya tinggi sehingga masyarakat di kawasan tersebut tidak memiliki posisi tawar untuk bisa bersaing di tingkat pasar lokal. Kondisi dimana daya saing yang sangat rendah sebagai akibat tidak memadainya akses ke pusat pelayanan publik menyebabkan ekonomi masyarakat sulit untuk bangkit disebabkan belum terbukanya jaringan jalan strategis yang menghubungkan antara satu daerah dengan daerah lainnya.

2.4.7. Perhubungan dan Transportasi

Seiring dengan perkembangan global dengan pesatnya arus informasi dan komunikasi baik dalam skala lokal, nasional maupun internasional. Kabupaten Dharmasraya yang memiliki posisi geografis yang cukup strategis dan dilintasi oleh jalur lintas sumatera membutuhkan sistem dan mekanisme transportasi, informasi dan komunikasi yang lebih baik dan tertata. Sistem dan mekanisme yang belum tertata di Kabupaten Dharmasraya mengakibatkan mobilitas masyarakat terganggu dikarenakan kesemerawutan sistem pelayanan angkutan umum (ojek, oplet, bus dan truk) dalam dan luar kabupaten, ketiadaan terminal baik terminal bus maupun terminal truk serta belum adanya rute angkutan umum yang jelas.

Mengingat Kabupaten Dharmasraya berjarak $\pm$ 200 Km dari Ibukota Propinsi Sumatera Barat serta akses ke propinsi lain, tidak menutup kemungkinan keberadaan transportasi udara yang didukung oleh sistem komunikasi dan informasi yang handal guna mempercepat pergerakan barang dan orang ke dan dari kabupaten ini.



2.4.8. Lingkungan Hidup dan Sumber Daya Alam

Masalah lingkungan dan sumber daya alam menjadi masalah global khususnya yang terkait dengan upaya pelestarian lingkungan dan sumber daya alam. Kabupaten Dharmasraya yang sebahagian besar wilayahnya berupa hutan dan memiliki daerah aliran sungai yang cukup luas serta memiliki perusahaan swasta yang mengelola sumber daya alam seperti Pabrik Pengolahan Kelapa Sawit dan Pabrik Karet, menghadapi permasalahan lingkungan yang perlu menjadi perhatian.

Ketergantungan ekonomi masyarakat kepada alam mengakibatkan degradasi lingkungan seperti adanya kasus pembalakan liar (*illegal logging*) dan Penambangan Emas Liar (PETI) selain mengakibatkan makin berkurangnya luas hutan juga terjadinya pencemaran air sungai.

Orientasi masyarakat yang masih menjadikan sungai sebagai pembuangan akhir sampah dan sebahagian lainnya masih memanfaatkan sungai sebagai MCK, berakibat sungai menjadi tercemar dan mempengaruhi tingkat kesehatan masyarakat.

2.5. Pemerintahan Umum

2.5.1. Pemerintahan

Kabupaten Dharmasraya dibentuk berdasarkan UU nomor 38 Tahun 2003 yang merupakan kabupaten baru, dimana penetapan struktur organisasi pemerintahan kabupaten pada awal berdirinya berdasarkan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara telah ditetapkan terdiri dari 6 (enam) Dinas, 3 (tiga) Badan, 2 (dua) Asisten, dengan 6 (enam) bagian dan 3 (tiga) Kantor.

Pengisian jabatan telah dilaksanakan pada setiap unit kerja walaupun dengan jumlah personil yang masih terbatas, tetapi jabatan kepala unit kerja pada umumnya telah terisi dalam rangka kelancaran roda organisasi,



namun jumlah struktur organisasi yang ada saat ini belum memadai untuk dapat memenuhi kebutuhan pelayanan masyarakat karena adanya beberapa dinas yang terlalu padat tugas dan wewenang dan ada pula unit kerja yang sangat diperlukan tetapi tidak ada.

Menyangkut dengan sarana dan prasarana kantor juga sangat terbatas terutama untuk kantor-kantor yang ideal masih sangat jauh dari harapan dan juga peralatan yang sangat terbatas, namun roda pemerintahan telah berjalan dalam melakukan pelayanan kepada masyarakat di kabupaten ini.

Pemerintah Kabupaten Dharmasraya disamping menjalankan tugas-tugas pemerintahan juga memberikan pelayanan kepada masyarakat, saat ini masih dalam kondisi serba keterbatasan baik sarana dan prasarana maupun pembiayaan serta acuan dan dasar hukum yang menjadi kewenangan daerah. Untuk peningkatan pelayanan kepada masyarakat sangat dibutuhkan sarana dan prasarana penunjang, penataan kelembagaan pemerintah daerah, produk-produk hukum sebagai landasan pengambilan keputusan dan membutuhkan aparatur yang akuntabel, beriman, bertaqwa, profesional dan bebas KKN serta pembiayaan dengan optimalisasi pengelolaan sumber-sumber pendapatan asli daerah.

Pemerintahan Kabupaten Dharmasraya yang didukung oleh 4 (empat) Kecamatan dan 21 (dua puluh satu) pemerintahan tingkat nagari secara bersama-sama dengan *stakeholders* melaksanakan pembangunan. Dalam rangka pemberdayaan masyarakat terbukti bahwa dengan kembalinya sistem pemerintahan desa ke sistem pemerintahan nagari dengan memberdayakan seluruh komponen masyarakat terlihat kecenderungan tingkat partisipasi dan pembauran masyarakat dari seluruh etnis yang terdapat di Kabupaten Dharmasraya meningkat.

Demokrasi yang berkembang dan tingkat kesadaran politik masyarakat di Kabupaten Dharmasraya meningkat hal ini dapat diukur melalui tingkat persentase yang mempergunakan hak pilihnya pada pemilihan umum (Pemilu) sebelumnya menunjukkan angka lebih kurang sebesar 75 %.



Pada tahun 2005 ini telah dilaksanakan penyusunan Struktur Organisasi Tata Kerja (SOTK) yang disesuaikan dengan kebutuhan daerah yaitu terdiri dari 1 (satu) sekretariat Daerah, 3 (tiga) Asisten dengan 9 (sembilan) bagian, 10 (sepuluh) Dinas, 4 (empat) Badan, dan 4 (empat) Kantor.

2.5.2. Kesatuan Bangsa

Masalah disintegrasi bangsa menjadi persoalan besar yang dihadapi setelah bergulirnya era reformasi. Berbagai tuntutan yang selama ini dikungkung oleh penguasa orde baru yang otoriter secara bersamaan muncul kepermukaan. Trauma masa lalu dan berbagai persoalan sosial lainnya menyebabkan masyarakat bertindak sesuka hatinya dan melakukan pembenaran atas apa yang mereka perbuat. Ditambah lagi rendahnya penegakan hukum (*law enforcement*) menyebabkan masyarakat menjadi apatis dan acuh tak acuh, sehingga bertindak diluar koridor hukum dan demokrasi.

Untuk mengatasi berbagai persoalan yang mungkin dapat terjadi dilakukan langkah-langkah kongkrit dan pendekatan persuasif agar proses demokrasi yang telah bergulir dapat terlaksana seiring dengan penerapan otonomi daerah, sehingga persoalan-persoalan bangsa yang tumbuh selama ini dapat diminimalkan sedemikian rupa dengan berpijak pada kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Berdasarkan pada permasalahan di atas, maka perlunya program pembinaan kesatuan bangsa yang terpadu dan komprehensif demi tegaknya kehidupan yang demokratis, aman, sejahtera serta mengusung semangat otonomi daerah dalam kerangka NKRI.

2.5.3. Ketenteraman dan Ketertiban

Kondisi ketenteraman dan ketertiban sangat menentukan rasa aman dan nyaman dalam kehidupan masyarakat. Salah satu hal yang menjadi permasalahan umum dan ancaman adalah peredaran dan



penyalahgunaan narkoba yang menjadi ancaman bagi kelangsungan dan masa depan generasi muda. Ancaman Narkoba selain berpengaruh pada fisik dan mental namun juga memiliki dampak ekonomi dengan meningkatnya biaya kesehatan, dampak sosial dan timbulnya gangguan ketentraman dan ketertiban dan dampak kultural dengan merusak tatanan nilai dan norma-norma yang selama ini berkembang di tengah-tengah masyarakat.

Upaya untuk menciptakan rasa aman, tenteram, nyaman dan tertib tak terlepas dari adanya kerjasama aparaturnya terkait seperti pihak keamanan dan aparat penegak hukum lainnya serta keterlibatan masyarakat. Banyaknya peristiwa Kamtibmas dan pelanggaran di Dharmasraya dapat dilihat pada tabel berikut:



Tabel 2.10
Banyaknya Peristiwa Kamtibmas dan Pelanggaran
di Kabupaten Dharmasraya Tahun 2004

Jenis Gangguan Kamtibmas	Banyaknya		
	Lapor	Selesai	Tunggak
Pencurian dengan Pemberatan	34	22	12
Pencurian dengan Kekerasan	7	3	4
Curanmor 2	16	4	12
Curanmor 4	1	-	1
Pencurian Biasa	22	17	5
Penipuan	8	7	1
Percobaan Curas	1	-	1
Pengancaman dengan Senjata Tajam	3	3	-
Perampasan	2	2	-
Percobaan Curat	2	2	-
Pembunuhan	2	2	-
Penganiayaan Berat	16	14	2
Penganiayaan Biasa	4	4	-
Penganiayaan Ringan	2	2	-
Penggelapan	6	6	-
Pemalsuan Tanda Tangan	1	1	-
Perjudian	28	28	-
Perkosaan	2	2	-
Perbuatan Cabul	10	10	-
Kawin Liar	1	1	-
Perzinaan	-	-	-
Kebakaran	14	14	-
Membawa Kayu Tanpa Dokumen Sah	15	12	3
Pembakaran	1	-	1
Pengrusakan	5	2	3
Uang Palsu	1	1	-
Narkoba	3	3	-
Peti Emas	1	1	-
Melarikan anak Dibawah Umur	2	2	-
Senpi Tanpa Izin	1	1	-
Jumlah	211	166	45

Sumber : Dharmasraya dalam Angka 2004



2.5.4. Pengawasan

Pengawasan merupakan fungsi organik manajemen yang perannya setara dengan fungsi manajemen lainnya. Dengan kata lain, pengawasan merupakan unsur dinamika dalam pelaksanaan fungsi-fungsi manajemen seperti perencanaan, pengorganisasian, pemotivasian dan pelaksanaan dapat berjalan dengan baik sesuai dengan tujuan dan sasaran yang diharapkan. Kewenangan daerah yang luas mencakup kewenangan yang utuh dan bulat dalam penyelenggaraan negara, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, pengendalian dan evaluasi. Fungsi manajemen senantiasa berjalan secara simultan dan propesional dalam kerangka pencapaian tujuan organisasi.

Disamping itu untuk mewujudkan aspirasi masyarakat dalam pencapaian tujuan berbangsa dan bernegara yakni pemerintah yang bersih (*clean goverment*), yang merupakan suatu sistem pengelolaan pemerintahan yang didasarkan pada prinsip transparansi, partisipasi dan akuntabel. Menyikapi tuntutan penyelenggaraan pemerintah yang akuntabel tersebut maka perlu dilakukan pengembangan dan penerapan sistem penanggung jawaban yang tepat, jelas dan legitimate, sehingga penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dapat berlangsung secara berdayaguna, berhasilguna, bersih dan bertanggung jawab serta bersih dari KKN.

Adapun pengawasan ini bertujuan untuk mendukung kelancaran dan ketepatan pelaksanaan kegiatan pemerintah dan pembangunan. Kegiatan pengawasan diperlukan untuk memperbaiki pengendalian pemerintahan dan jalannya pembangunan pada umumnya, serta untuk mencegah dan menindak lanjuti penyalahgunaan wewenang, pemborosan dan kebocoran

2.5.5. Pemberdayaan Masyarakat

Pembangunan bukan hanya dimaksudkan kepada pembangunan fisik dan teknis semata. Pembangunan juga mencakup aspek sosial budaya masyarakat. Pemberdayaan masyarakat menjadi penting dilakukan



mengingat bahwa pada akhirnya masyarakat yang akan menjadi subyek dan obyek pembangunan. Dalam masyarakat terdapat beberapa kelompok fungsional yang akan dapat menjadi penggerak dan motivator pembangunan yang perlu diberikan peran lebih besar. Kelompok-kelompok itu harus diberdayakan untuk memaksimalkan pencapaian hasil-hasil pembangunan.

Untuk itu dituntut peran dari sektor pemberdayaan masyarakat. Tugas sektor ini semakin berat pada waktu mendatang, mengingat bahwa kondisi sosial masyarakat kabupaten Dharmasraya semakin memperlihatkan kecenderungan bersikap individual dan melemahnya kontrol sosial warga terhadap pelanggaran norma agama dan adat. Selain itu pemberdayaan masyarakat juga mengemban tugas sebagai melakukan perencanaan, pengkoordinasian, pelaksana dan pengendalian kegiatan bidang pemberdayaan masyarakat dan pembinaan kelembagaannya. Dengan fungsi ini diharapkan mampu merencanakan kegiatan pemberdayaan masyarakat yang melibatkan sebanyak mungkin *stakeholders* pada seluruh lapisan masyarakat kabupaten Dharmasraya.

2.6. Isu Strategis

Berdasarkan gambaran kondisi umum daerah Kabupaten Dharmasraya, Isu Strategis yang menjadi pertimbangan dalam penyusunan perencanaan pembangunan 5 (lima) tahun kedepan adalah sebagai berikut :
Jumlah penduduk yang hidup dibawah garis kemiskinan dan yang rentan untuk jatuh kebawah garis kemiskinan masih relatif besar

Belum meratanya jangkauan pembangunan keseluruh wilayah kabupaten.

Kualitas angkatan kerja dan tingkat kesejahteraan sebagian besar tenaga kerja masih rendah.

Pelayanan Pendidikan dan Kesehatan serta kualitas pelayanan publik masih rendah.



Kondisi dan struktur perekonomian yang ada belum cukup untuk mendukung pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi.

Tingkat kriminalitas dan Pekat relatif masih tinggi dan rendahnya penegakan hukum.

Belum terkelolanya Sumber Daya Alam secara optimal

Rendahnya Sumber Daya Aparatur

Belum optimalnya peran Pemuka Agama dan Adat dalam kehidupan bermasyarakat / implementasi filosofi ABS-SBK.



BAB III VISI DAN MISI

3.1. VISI

Berdasarkan permasalahan, tantangan, serta keterbatasan yang dihadapi maka ditetapkan VISI PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN DHARMASRAYA TAHUN 2006 - 2010 sebagai berikut :

“MENJADI KABUPATEN YANG MAJU DALAM KESEIMBANGAN”

Makna dan kata kunci yang terkandung dalam Visi Kabupaten Dharmasraya di atas adalah sebagai berikut :

“**Maju**” bermakna sebuah keinginan untuk terus bergerak ke depan dalam menyongsong masa depan, meliputi pergerakan pada setiap lini dan sektor pembangunan, baik dalam pembangunan bidang ekonomi, sosial budaya, pembangunan kualitas sumber daya manusia yang menguasai teknologi dan memiliki daya saing tinggi, maupun dalam penyelenggaraan pemerintahan yang lebih baik, profesional dan akuntabel.

“**Keseimbangan**” adalah upaya untuk melaksanakan kegiatan pembangunan yang melibatkan seluruh *stakeholders* baik pemerintah, masyarakat maupun pihak swasta sesuai dengan proporsi dan tanggung jawabnya, juga keseimbangan pembangunan pada aspek fisik dan non fisik, jasmani dan rohani serta keseimbangan dalam pendapatan dan pengeluaran daerah.



3.2. MISI

Berdasarkan Visi Pembangunan Daerah Kabupaten Dharmasraya tersebut ditetapkan 5 (lima) MISI PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN DHARMASRAYA TAHUN 2006 - 2010 sebagai berikut :

1. Mewujudkan Pemerintahan yang Profesional dan Penuh Pengabdian (Good Corporate Governance) yang berbasis pada Good Governance, Good Government dan Clean Governance;

Pemerintahan Yang Profesional dimaksud adalah Pemerintahan yang menjalankan pemerintahan secara bertanggung jawab, tertib, rapi, cepat, tepat dan transparan sehingga mampu memberikan layanan yang adil, manusiawi, murah dan transparan untuk memuaskan kepada masyarakat. Pemerintahan yang profesional juga ditandai dengan kemampuannya dalam memanfaatkan sumberdaya yang tersedia untuk sebesar-besarnya kemanfaatan bagi masyarakat.

Pemerintahan Yang Mengabdikan dimaksudkan dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya, seluruh aparat dilandasi oleh suatu pengabdian kepada Tuhan Yang Maha Esa, sehingga senantiasa berupaya untuk meningkatkan kualitas pelayanannya kepada masyarakat. Dengan landasan ini maka pemerintah tidak menjadi beban masyarakat sebagaimana masa-masa sebelumnya di mana banyak aparat pemerintah yang justru mengharapakan pelayanan dari masyarakat.

2. Mewujudkan Masyarakat yang Produktif dan memiliki ekonomi yang tangguh.

Masyarakat yang produktif adalah masyarakat yang mampu memanfaatkan sumberdaya yang tersedia untuk menghasilkan karya-karya yang bermanfaat bagi kehidupan masyarakat. Dalam skala mikro masyarakat yang produktif ditandai dengan berkembangannya usaha-usaha yang dikelola secara individu, keluarga, berkembangnya



usaha kecil, menengah dan koperasi (UKM), kehidupan industri berbasis sumber daya lokal, perdagangan dan daya saing dengan daerah-daerah lain. Masyarakat yang produktif juga ditandai dengan ketersediaan tenaga kerja yang berkualitas dan rendahnya tingkat pengangguran. Masyarakat yang produktif ini juga dapat dilihat dari mobilitas masyarakat yang ditunjang dengan sarana transportasi yang memadai. Sedangkan secara makro dapat dilihat dari tingkat Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang berasal dari peningkatan pajak dan retribusi, serta tercermin dari peningkatan PDRB daerah.

3. Mewujudkan Masyarakat yang sehat dalam Lingkungan yang Bersih, Aman dan Nyaman.

Masyarakat yang sehat adalah masyarakat yang terhindar dari beragam penyakit, baik yang ringan maupun yang berat. Masyarakat yang sehat ditandai dengan, rendahnya tingkat kematian bayi, rendahnya tingkat kematian ibu saat melahirkan dan baiknya tingkat gizi masyarakat.

Lingkungan yang bersih, aman dan nyaman diwujudkan dengan tersedianya sanitasi lingkungan, air bersih, terkelolanya sampah dengan baik, dan tidak adanya pencemaran dan pengrusakan lingkungan. Sedangkan kenyamanan ditandai dengan lingkungan yang asri, hijau, indah dipandang dan udara segar.

4. Mewujudkan Masyarakat yang Berpendidikan dan Menguasai Teknologi;

Masyarakat berpendidikan diindikasikan dengan jumlah masyarakat yang mengenyam pendidikan formal, minimal dalam menyelesaikan program wajib belajar (9 tahun), pendidikan non-formal, pengajian / majelis taklim, pelatihan-pelatihan untuk meningkatkan kualitas hidup dan sebagainya.



Masyarakat Yang Menguasai Teknologi memiliki pengertian masyarakat dalam menjalankan aktifitas dan usahanya mampu memilih dan menggunakan teknologi tepat guna sesuai dengan kebutuhan dan perkembangannya, sehingga mempunyai daya saing dan nilai tambah.

5. Mewujudkan Masyarakat Religius yang Bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa, Rukun Penuh Kedamaian, Berbudaya serta didukung oleh Supremasi Hukum dan Stabilitas Politik yang Handal;

Masyarakat religius yang bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa ditandai dengan seberapa jauh agama mewarnai kehidupan masyarakat sehari-hari. Hal ini dapat dilihat dari kegiatan di masjid-masjid dan tempat beribadah lainnya, baik untuk ibadah ritual maupun kegiatan-kegiatan yang menunjang kehidupan beragama.

Masyarakat yang rukun dan damai adalah masyarakat yang kompak, gotong royong, mengutamakan kerjasama dan sinergi, solid dan terhindar dari pekelahian dan pertikaian baik perkelahian antar individu, pertikaian antar kelompok, antar suku, antar etnis, antar agama dan antar pendatang dan penduduk asli.

Masyarakat yang berbudaya adalah masyarakat yang menjunjung tinggi nilai-nilai budaya dan melestarikan kekayaan budaya, menjalin dan memelihara budaya kebersamaan, mensinergikan keragaman budaya dari suku-suku yang berbeda, menyaring budaya-budaya global yang tidak sesuai dengan budaya lokal dan sebagainya.

Tegaknya Supremasi Hukum dan Stabilitas Politik yang Handal akan mewujudkan Lingkungan yang aman ditandai dengan ketertiban masyarakat, tegaknya hukum dan perundang-undangan, perlakuan yang adil dan tidak pandang bulu, rendahnya tingkat kriminalitas seperti perjudian, pencurian, perampokan, perkosaan, korupsi, penyalahgunaan obat-obat terlarang (narkoba) dan lain-lain, juga ditandai dengan meningkatnya kesadaran masyarakat dalam kehidupan berpolitik dan berdemokrasi.



BAB IV

STRATEGI PEMBANGUNAN DAERAH

Dalam upaya mewujudkan Visi dan menjalankan Misi Pembangunan Daerah Tahun 2006-2010 maka ditetapkan STRATEGI POKOK PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN DHARMASRAYA TAHUN 2006-2010 sebagai berikut:

1. Mengembangkan SDM yang mampu bersaing di era globalisasi. Strategi diarahkan untuk menciptakan masyarakat yang berkualitas sehingga mampu meningkatkan kapasitas usaha sendiri, memasuki lapangan pekerjaan dan membuka lapangan usaha, sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
2. Memenuhi hak dasar rakyat dan mempersiapkan landasan pembangunan yang kokoh. Strategi ini diarahkan untuk pemenuhan hak dasar rakyat dalam bentuk bebas dari kemiskinan, pengangguran, keterbelakangan, ketidakadilan, penindasan, rasa takut, dan kebebasan mengemukakan pemikiran dan pendapat. Mempersiapkan landasan pembangunan yang kokoh yang diperlukan bagi pembangunan yang berkelanjutan dan kehidupan generasi mendatang yang lebih baik.
3. Menciptakan iklim yang kondusif bagi pembangunan ekonomi kerakyatan. Strategi ini diarahkan bagi stabilitas ekonomi, kemandirian, tumbuh dengan cepat, pemerataan hasil dan kesempatan dalam pembangunan, jaminan dan kepastian hukum serta aturan-aturan yang tidak menghambat percepatan pembangunan ekonomi kerakyatan.

Berdasarkan Visi, Misi dan Strategi pembangunan daerah tahun 2006 - 2010, maka ditetapkan 4 (empat) AGENDA PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2006- 2010 sebagai berikut :



1. **Membangun Pemerintah yang Profesional dan Penuh Pengabdian.**
2. **Membangun Masyarakat yang Produktif dan memiliki ekonomi yang tangguh.**
3. **Membangun Sumberdaya Manusia Berkualitas.**
4. **Mewujudkan Masyarakat Religius yang Bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa, Rukun Penuh Kedamaian, Berbudaya serta didukung oleh Supremasi Hukum dan Stabilitas Politik yang Handal;**

Keempat Agenda Pokok Pembangunan Tahun 2006-2010 tersebut selanjutnya diterjemahkan kedalam Program-program Pembangunan yang hendak dicapai dalam 5 tahun mendatang.

Prioritas Pembangunan Daerah Tahun 2006-2010

Berdasarkan masalah dan tantangan pembangunan daerah maka disusun PRIORITAS DAN POKOK-POKOK ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2006-2010, menurut keempat Agenda Pembangunan Daerah.

A. Agenda Membangun Pemerintah yang Profesional dan Penuh Pengabdian.

Dalam Agenda Membangun Pemerintahan yang Profesional dan Penuh Pengabdian terdapat 8 (delapan) Prioritas Pembangunan sebagai berikut:

1. Peningkatan Kemampuan Pemerintah Daerah dan Nagari

Prioritas Pembangunan dengan kebijakan yang diarahkan untuk: (1) mengembangkan struktur organisasi dan tata kerja (SOTK) Kabupaten yang efisien, efektif, profesional, akuntabel dan adaptif; (2) melaksanakan pola rekrutmen, promosi, mutasi dilingkungan pemerintahan yang objektif berdasarkan sistem meritokrasi; (3) meningkatkan hubungan inter/antar lembaga yang profesional dan kondusif di daerah; (4) meningkatkan



sumberdaya dan kapabilitas aparatur pemerintah daerah serta ratsionalisasi jumlah aparatur daerah; (5) mengembangkan kelembagaan pemerintahan nagari sesuai dengan struktur masyarakat serta fungsi, urusan pemerintahan nagari.

Sasaran bidang peningkatan kemampuan pemerintahan daerah dan nagari sebagai berikut :

1. Terciptanya struktur organisasi dan tata kerja (SOTK) Pemerintah Kabupaten yang efisien, efektif, profesional, akuntabel dan adaptif.
2. Terlaksananya pola rekrutmen, promosi, mutasi di lingkungan pemerintahan yang objektif berdasarkan sistem meritokrasi.
3. Tercipta hubungan inter/antar lembaga yang pofesional dan kondusif di daerah maupun hubungan antar daerah.
4. Meningkatnya sumber daya, kapabilitas aparatur pemerintah daerah serta rasionalisasi jumlah aparatur daerah.
5. Terciptanya kelembagaan pemerintahan nagari sesuai dengan struktur masyarakat serta fungsi, urusan pemerintahan nagari.
6. Meningkatnya penataan dan delegasi urusan otonomi nagari (rumah tangga nagari) dan urusan pembantuan
7. Meningkatnya penataan administrasi pemerintahan nagari.

2. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik

Prioritas Pembangunan dengan kebijakan yang diarahkan untuk: (1) meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat dan pelaku bisnis; (2) melaksanakan transparansi dalam proses pelayanan publik; (3) meningkatkan etos kerja aparatur pemerintah yang profesional dan kompeten.



Sasaran peningkatan kualitas pelayanan publik sebagai berikut:

1. Meningkatnya kualitas pelayanan publik kepada masyarakat dan pelaku bisnis
2. Tercapainya transparansi dalam proses pelayanan publik.
3. Meningkatnya etos kerja aparatur pemerintah yang profesional dan kompeten

3. Kependudukan

Prioritas pembangunan kependudukan diarahkan pada penataan administrasi kependudukan guna mendorong terakomodasinya hak hak penduduk dan meningkatkan kualitas dokumen, data, dan informasi penduduk, dalam mendukung perencanaan dan pelaksanaan pembangunan berkelanjutan serta pelayanan publik.

Sasaran bidang kependudukan ini adalah untuk meningkatnya tertib administrasi kependudukan serta tersedianya data kependudukan yang akurat untuk mendukung perencanaan pembangunan dan pelayanan publik

4. Pemberantasan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme

Prioritas Pembangunan dengan kebijakan yang diarahkan untuk: (1) mewujudkan pemerintahan yang bebas korupsi, kolusi, nepotisme (2) meningkatkan efektifitas pengawasan dalam penyelenggaraan pemerintahan (pemberian Reward and Punishment); (3) meningkatkan fungsi penegakkan hukum oleh aparatur dan koordinasi antar lembaga penegakan hukum; (4) meningkatkan keterlibatan masyarakat dalam pemberantasan KKN dan pemberantasan maksiat.

Sasaran bidang pemberantasan korupsi, kolusi dan nepotisme sebagai berikut:

1. Terwujudnya pemerintahan yang bebas korupsi, kolusi, nepotisme.



2. Meningkatnya transparansi dalam pengadaan barang dan jasa publik
3. Meningkatnya efektifitas pengawasan dalam penyelenggaraan pemerintahan
4. Meningkatnya kerjasama antara aparaturnya penegak hukum dengan auditor
5. Meningkatnya sistem pengaturan rekrutmen, promosi, mutasi pegawai dilingkungan pemerintahan daerah
6. Meningkatnya fungsi penegakan hukum oleh aparaturnya dan koordinasi antar penegak hukum.
7. Meningkatnya keterlibatan masyarakat dalam pemberantasan KKN .

5. Peningkatan Pengelolaan Keuangan Daerah

Prioritas Pembangunan dengan kebijakan yang diarahkan untuk: (1) Intensifikasi dan ekstensifikasi potensi sumber-sumber pendapatan daerah.; (2) Pengembangan dan peningkatan sumber keuangan daerah; (3) Menertibkan proses penyusunan anggaran daerah setiap tahunnya; (4) Penataan Manajemen Pengelolaan keuangan daerah ; (5) Menghindari penyimpangan penggunaan anggaran daerah

Sasaran pembangunan pengelolaan keuangan daerah selama lima tahun mendatang adalah:

1. Peningkatan penerimaan PAD Kabupaten Dharmasraya
2. Tertibnya proses penyusunan anggaran daerah setiap tahunnya
3. Tertatanya manajemen pengelolaan keuangan daerah
4. Penurunan penyimpangan penggunaan anggaran daerah

6. Pembangunan Hukum dan Perlindungan Hak Asasi Manusia (HAM)

Prioritas Pembangunan dengan kebijakan yang diarahkan untuk: (1) mendokumentasikan produk hukum daerah/Peraturan Daerah yang aspiratif dan akomodatif sesuai dengan kewenangan/urusan dan norma hukum yang berlaku/HAM; (2) meningkatkan pemahaman dan kesadaran masyarakat dan aparat terhadap produk



hukum daerah; (3) menata produk hukum dan sistim hukum daerah yang aspiratif dan akomodatif yang mengacu kepada hukum nasional; (4) memenuhi kebutuhan masyarakat terhadap hukum dan HAM yang dapat menjamin hak dan kewajiban.

Sasaran yang hendak diwujudkan untuk peningkatan pembangunan bidang hukum dan perlindungan HAM adalah :

1. Terciptanya produk hukum daerah/Peraturan Daerah yang aspiratif dan akomodatif sesuai dengan kewenangan/urusan dan norma hukum yang berlaku dan menjunjung tinggi HAM;
2. Adanya dokumentasi dan informasi produk hukum daerah;
3. Meningkatnya pemahaman dan kesadaran aparatur dan masyarakat terhadap produk hukum daerah;
4. Meningkatnya kualitas perlindungan hukum dan HAM;
5. Terpenuhinya peraturan yang menjamin hak dan kewajiban warga serta mendorong kegiatan dunia usaha di daerah.

7. Pemberdayaan dan Pembinaan Organisasi Masyarakat dan Partai Politik

Prioritas pemberdayaan dan pembinaan organisasi masyarakat dan partai politik diarahkan terhadap peningkatan koordinasi dan fasilitasi antara pemerintah daerah dengan ormas dan parpol dalam rangka peningkatan keamanan dan ketertiban serta pembinaan politik, dengan sasaran agar tercapainya kondisi yang kondusif ditengah-tengah masyarakat dengan mensinergikan peran pemerintah, ormas. & parpol dalam memacu pembangunan serta mewujudkan keamanan dan ketertiban.



8. Peningkatan Keamanan dan Ketertiban

Prioritas Pembangunan dengan kebijakan yang diarahkan untuk: (1) menciptakan kondisi yang kondusif ditengah-tengah masyarakat dengan mensinergikan peran penegak hukum, birokrasi dan tokoh fungsionaris di masyarakat dalam mewujudkan keamanan dan ketertiban; (2) meningkatkan penyelesaian persoalan konflik yang terjadi antar daerah dengan pendekatan yang saling bermanfaat dan menguntungkan untuk kepentingan wilayah Kabupaten; (3) meningkatkan peran masyarakat dalam upaya preventif terjadinya gangguan keamanan dan ketertiban dalam masyarakat.

Sasaran bidang peningkatan keamanan dan ketertiban sebagai berikut

1. Tercapainya kondisi yang kondusif ditengah-tengah masyarakat dengan mensinerjikan peran penegak hukum, birokrasi dan tokoh fungsionaris di masyarakat dalam mewujudkan keamanan dan ketertiban
2. Peningkatan penyelesaian persoalan konflik yang terjadi melalui pendekatan yang saling bermanfaat dan menguntungkan untuk kepentingan wilayah .
3. Meningkatnya peran masyarakat dalam upaya preventif terjadinya gangguan keamanan dan ketertiban dalam masyarakat.

B. Agenda Membangun Masyarakat yang Produktif dan memiliki ekonomi yang tangguh.

Dalam Agenda Membangun Masyarakat yang Produktif memiliki ekonomi yang tangguh terdapat 14 (empat belas) Prioritas Pembangunan sebagai berikut:



1. Revitalisasi Pertanian dan Pengembangan Agro Industri

Prioritas Pembangunan dengan kebijakan yang diarahkan untuk: (1) meningkatkan ketersediaan pangan untuk memenuhi konsumsi energi dan protein penduduk dan terjadinya peningkatan perekonomian rumah tangga petani dan perekonomian daerah; (2) meningkatkan kemampuan usaha pertanian dalam menghasilkan komoditas yang dapat dipasarkan baik secara lokal, regional, dan nasional; (3) mengembangkan usaha pertanian yang menerapkan prinsip pertanian berkelanjutan pada kawasan sentra produksi.

Sasaran dari dengan revitalisasi pertanian dan pengembangan agroindustri pedesaan adalah:

1. Meningkatnya produksi, ketersediaan, dan konsumsi (daya beli masyarakat) terhadap bahan pangan dan protein yang bersumber dari ternak dan ikan sehingga pada tahun 2010 masyarakat Kabupaten Dharmasraya terbebas dari masalah kekurangan gizi dan protein.
2. Meningkatnya kemampuan petani dalam menghasilkan komoditas pertanian tanaman pangan dan hortikultura, perkebunan, peternakan dan perikanan yang dapat memenuhi permintaan pasar lokal, dan domestik.
3. Meningkatnya nilai tambah dan daya saing produk pertanian tanaman pangan dan hortikultura, perkebunan, peternakan, dan perikanan melalui pengembangan agroindustri.
4. Meningkatnya kapasitas lembaga ekonomi masyarakat dan kelembagaan pendukung lainnya, dan sinergi antara pemerintah, swasta, dan masyarakat untuk peningkatan produksi, nilai tambah dan pemasaran.
5. Terbangunnya infrastruktur penunjang pembangunan wilayah sentra produksi dan cluster agroindustri pedesaan.
6. Diterapkannya praktek-praktek pertanian organik (ramah lingkungan) yang dapat menghasilkan komoditas yang mempunyai daya saing di pasar.



7. Meningkatnya kemampuan petani dalam mengelola sumberdaya lahan dan air secara berkelanjutan dengan mengacu kepada prinsip pengelolaan terpadu sumberdaya air (integrated water resources management)

2. Pengembangan Industri

Prioritas Pembangunan dengan kebijakan yang diarahkan untuk: (1) mengembangkan industri pengolahan produk pertanian ; (2) mengembangkan industri rumah tangga dengan bahan baku lokal pada kawasan khusus yang mempunyai keterampilan spesifik; (3) memperluas akses pasar ; (4) menggali dan meningkatkan potensi objek wisata daerah

Sasaran pembangunan industri dalam lima tahun mendatang sasarannya adalah:

- (1) Meningkatnya kontribusi sektor industri dalam Produk Domestik Regional Bruto
- (2) Meningkatnya kemampuan penyerapan tenaga kerja sektor industri, terutama bagi tamatan sekolah menengah kejuruan;
- (3) Meningkatnya penggunaan teknologi tepat guna oleh pengusaha kecil dan industri rumah tangga dalam pengolahan produk pertanian;
- (4) Meningkatnya keterampilan tenaga kerja pada industri kerajinan, industri rumah tangga;
- (6) Meningkatnya akses pasar produk industri pengolahan

3. Pengembangan Kelembagaan Ekonomi

Prioritas Pembangunan dengan kebijakan yang diarahkan untuk: (1) mengembangkan koperasi yang tangguh, profesional dan mandiri, yang ditopang oleh kegiatan usaha anggotanya; (2) meningkatkan akses koperasi terhadap berbagai sumberdaya produktif, sarana dan prasarana; (3) meningkatkan kegiatan ekonomi rakyat dalam wadah koperasi; (4) menciptakan lingkungan usaha yang kondusif bagi pembangunan dan



pengembangan usaha kecil dan menengah (UKM); (5) meningkatkan perlindungan dan kepastian hukum bagi UKM dalam berusaha; (6) meningkatkan akses UKM terhadap berbagai sumberdaya produktif, sarana dan prasarana; (7) meningkatkan kewirausahaan dan kewirakoperasian UKM; (8) meningkatkan produktivitas UKM yang diukur dengan nilai tambah per tenaga kerja per tahun. (9) Membina Lembaga Perbankan dan mengembangkan BPR dan LPN. (10) Membina dan mengembangkan Lembaga Keuangan masyarakat lainnya.

Sasaran yang ingin dicapai dengan pengembangan kelembagaan ekonomi ini adalah :

1. Terciptanya sistem dan kelembagaan yang kuat dalam rangka pemberdayaan pelaku usaha, baik koperasi, usaha mikro, kecil dan menengah.
2. Meningkatnya peran dan kualitas kelembagaan yang terkait dengan pengembangan usaha untuk dapat mendorong peningkatan pemanfaatan teknologi, perbaikan manajemen usaha, akses pasar produk dan akses ke sumber modal
3. Meningkatnya kualitas sumberdaya manusia aparatur pembina dan kualitas pelaku usaha kecil dan menengah.

4. Peningkatan Investasi dan Pengembangan Kerjasama Antar Daerah

Prioritas Pembangunan dengan kebijakan yang diarahkan untuk: (1) menciptakan iklim investasi yang kondusif dan sehat dengan reformasi kelembagaan di berbagai-bagai tingkatan instansi yang mampu mengurangi praktik ekonomi biaya tinggi, melalui peningkatan kapasitas kelembagaan dan terbangunnya koordinasi dan sinkronisasi antar sektor dan antar instansi/lembaga (2) meningkatkan investasi, sehingga mampu memberikan kontribusi yang sesuai dengan target tingkat pertumbuhan daerah; (3) meningkatkan efisiensi perekonomian daerah, sehingga ICOR dapat diturunkan secara bertahap melalui perbaikan infrastruktur, peningkatan kualitas



SDM, pemangkasan sistim birokrasi dan biaya ekstra lainnya; (4) meningkatkan kerjasama antar kabupaten dalam provinsi dan kabupaten tetangga secara produktif.

Sasaran pembangunan peningkatan investasi dan pengembangan kerjasama antar daerah adalah :

1. Terwujudnya iklim investasi yang kondusif dan sehat dengan reformasi kelembagaan di berbagai-bagai tingkatan instansi yang mampu mengurangi praktik ekonomi biaya tinggi.
2. Meningkatnya investasi, sehingga mampu memberikan konstribusi yang sesuai dengan target tingkat pertumbuhan daerah.
3. Meningkatnya efisiensi perekonomian daerah, sehingga ICOR dapat diturunkan secara bertahap
4. Meningkatnya kerjasama antar kabupaten tetangga secara produktif.

5. Pengembangan Infra Struktur Transportasi

Prioritas Pengembangan Infra Struktur Transportasi diarahkan pada pemeliharaan, pengembangan dan peningkatan prasarana jalan dalam rangka mempertahankan sistim jaringan jalan dan meningkatkan aksesibilitas antar wilayah yang diperlukan untuk pengembangan perekonomian daerah dan pelayanan masyarakat serta meningkatkan Sarana dan Prasarana Angkutan Jalan Raya dalam rangka peningkatan keselamatan lalu lintas, kenyamanan pengguna jalan dan melakukan penataan sistem jaringan angkutan jalan dan manajemen lalu lintas,.

Sasaran bidang pengembangan infra struktur transportasi adalah untuk terpeliharanya dan meningkatnya daya dukung, kapasitas, maupun kualitas pelayanan prasarana jalan, serta meningkatnya aksesibilitas wilayah yang sedang dan belum berkembang dalam kerangka pengembangan ekonomi wilayah, serta tersedianya Sarana dan Prasarana Angkutan Jalan Raya untuk peningkatan keselamatan lalu lintas, kenyamanan pengguna jalan serta tertatanya sistem jaringan angkutan jalan dan manajemen lalu lintas,.



6. Pengembangan Prasarana Perumahan dan Permukiman

Prioritas Pengembangan Prasarana Perumahan dan Permukiman diarahkan pada peningkatan penyediaan prasarana dan sarana dasar bagi kawasan rumah sederhana dan rumah sederhana sehat; Peningkatan fasilitasi dan pemberdayaan masyarakat berpendapatan rendah dalam penyediaan lahan, sumber pembiayaan dan prasarana dan sarana lingkungan melalui pembangunan perumahan yang bertumpu pada masyarakat; Mengembangkan kredit mikro dan pola subsidi baru yang lebih tepat sasaran; Meningkatkan upaya perluasan cakupan pelayanan air minum dan pengelolaan limbah rumah tangga; serta meningkatkan upaya pelayanan persampahan dan drainase yang berkualitas, terjangkau, efisien menjangkau seluruh lapisan masyarakat, serta berwawasan lingkungan.

Sasaran bidang diatas adalah terpenuhinya kebutuhan hunian bagi masyarakat melalui pasar primer yang sehat, efisien, akuntabel, tidak diskriminatif dan terjangkau oleh seluruh lapisan masyarakat yang didukung oleh sistem pembiayaan perumahan jangka panjang yang market friendly, efisien dan akuntabel; meningkatnya cakupan pelayanan air minum perpipaan untuk penduduk dan pengelolaan limbah rumah tangga; meningkatnya volume sampah yang terangkut, meningkatnya kinerja pengelolaan TPA yang berwawasan lingkungan serta berkurangnya genangan air dengan meningkatnya fungsi saluran drainase dan terbebasnya saluran-saluran drainase dari sampah

7. Pengembangan Sumber Daya Air

Prioritas Pengembangan Sumber Daya Air diarahkan pada pendayagunaan sumber daya air untuk pemenuhan kebutuhan air baku guna pemenuhan kebutuhan rumah tangga, permukiman, pertanian dan industri, serta penanggulangan banjir, pengamanan sungai, terutama pada daerah yang berpenduduk padat dan wilayah strategis. Sasaran bidang adalah agar tersedianya pola pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya air yang



terpadu dan berkelanjutan serta meningkatnya fungsi jaringan irigasi dalam rangka mendukung peningkatan produksi pertanian dan meningkatnya keamanan masyarakat dari bahaya banjir.

8. Pengembangan BUMD

Prioritas Pembangunan dengan kebijakan yang diarahkan untuk : (1) melakukan study kelayakan pengembangan BUMD; (2) Mendirikan Perusahaan Daerah; (3) Meningkatkan Manajemen pengelolaan Perusahaan Daerah;

Sasaran dari prioritas Pengembangan BUMD ini adalah berdirinya BUMD di Kabupaten Dharmasraya yang dapat memberikan kontribusi terhadap perkembangan perekonomian daerah, dan PAD.

9. Pembangunan Ketenagakerjaan

Prioritas Pembangunan dengan kebijakan yang diarahkan untuk : (1) menurunkan tingkat pengangguran dan berkurangnya jumlah penduduk miskin; (2) meningkatkan kualitas dan produktifitas tenaga kerja melalui pelatihan dan pemagangan; (3) menata sistem informasi dan penyaluran tenaga kerja secara baik; (4) menciptakan hubungan yang harmonis antara pekerja dan pengusaha

Berdasarkan perkembangan kondisi dan permasalahan ketenagakerjaan yang ada, maka dalam meningkatkan kualitas dan informasi ketenagakerjaan di Kabupaten Dharmasraya, ditetapkan sasaran yang ingin dicapai pada tahun 2010 sebagai berikut:

1. Menurunnya Tingkat Angka Pengangguran (TAP) dan Tingkat Setengah Pengangguran (TSP), serta berkurangnya jumlah penduduk miskin
2. Meningkatnya kualitas dan produktifitas tenaga kerja melalui pelatihan dan pemagangan
3. Tertatanya sistem informasi dan penyaluran tenaga kerja secara baik



4. Terciptanya hubungan yang harmonis antara pekerja dan pengusaha

10. Pembangunan Pertambangan dan Energi

Prioritas pembangunan pertambangan dan energi diarahkan pada optimalisasi pemanfaatan sumber daya mineral, batubara melalui usaha pertambangan dengan prinsip good mining practice, menjamin kepastian hukum melalui penyerasian aturan dan penegakan hukum secara konsekwen, serta meningkatkan pemerataan pemenuhan kebutuhan energi dan listrik ke daerah daerah terpencil, serta mendorong tumbuh dan berkembangnya upaya penggunaan energi alternatif..

Sasaran bidang ini adalah meningkatnya eksplorasi dan eksploitasi sumber daya mineral dan batubara, terjaminnya kepastian hukum melalui penyerasian aturan dan penegakan hukum secara konsisten, serta terpenuhinya kebutuhan energi dan listrik bagi masyarakat terutama di pedesaan dan terwujudnya penggunaan energi alternatif

11. Pembangunan Pariwisata

Prioritas Pembangunan Pariwisata diarahkan pada pengembangan Objek-objek wisata potensial di daerah, peningkatan partisipasi masyarakat pelaku usaha pariwisata dalam membangun dan mengembangkan kepariwisataan, dan meningkatkan atraksi-atraksi wisata yang berkaitan dengan seni dan budaya daerah, serta atraksi anak nagari.

Sasaran pengembangan pariwisata adalah :

1. Terwujudnya perencanaan kawasan wisata terpadu yang lengkap untuk lima tahun yang akan datang.
2. Terwujudnya peningkatan kunjungan wisatawan



3. Makin baiknya kualitas objek-objek pariwisata daerah, terutama objek pariwisata alam, budaya, dan wisata religius.
4. Meningkatnya pendapatan masyarakat yang tinggal pada lingkungan objek pariwisata.
5. Meningkatnya atraksi-atraksi wisata berdasarkan budaya daerah dan lingkungan pariwisata.
6. Meningkatnya sarana dan parasarana wisata yang berkaitan langsung dengan kegiatan pariwisata.
7. Meningkatnya serapan tenaga kerja pada kegiatan-kegiatan bidang pariwisata.

12. Pengelolaan Sumberdaya Alam

Prioritas Pembangunan dengan kebijakan yang diarahkan untuk: (1) menjaga kondisi fisik sumberdaya alam sehingga dapat memberikan manfaat dalam jangka panjang dan berkelanjutan; (2) memanfaatkan sumberdaya alam untuk kemakmuran dalam kaitan dengan pengentasan kemiskinan dan pembangunan ekonomi.

Sasaran pembangunan pengelolaan sumberdaya alam dan pembangunan berkelanjutan sebagai berikut :

1. Terjaganya kondisi fisik sumberdaya alam pada tingkat yang dapat memberikan manfaat dalam jangka panjang yang ditunjukkan oleh semakin menguatnya basis sumberdaya dan semakin berkurangnya tingkat kerusakan sumberdaya alam yang dapat menurunkan manfaat atau menimbulkan bencana.
2. Terwujudnya dampak pemanfaatan untuk kesejahteraan/kemakmuran dalam kaitan dengan pengentasan kemiskinan dan pembangunan ekonomi yang ditunjukkan oleh semakin optimalnya pemanfaatan sumberdaya alam untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan peningkatan pendapatan masyarakat dalam kerangka pembangunan berkelanjutan.



13. Penanggulangan Bencana Alam

Dalam rangka mencegah kerugian yang lebih besar baik jiwa maupun materil, maka pemerintah dan masyarakat harus bekerjasama di dalam mengantisipasi dan menanggulangi bencana alam. Untuk itu beberapa sasaran program penanggulangan bencana alam adalah:

1. Meningkatnya pemahaman masyarakat terhadap bencana alam;
2. Tersedianya data dan informasi tentang kawasan rawan bencana;
3. Tersedianya peralatan sistem peringatan dini dalam menghadapi bencana;
4. Tersedianya SDM yang terampil dalam menangani bencana dan penanganan pasca bencana;
5. Tersedianya sarana dan prasarana untuk evakuasi, penanganan korban dan program *recovery* pasca bencana;

14. Penataan Ruang dan Pertanahan

Prioritas Penataan Ruang diarahkan untuk mewujudkan penataan ruang yang efisien dan terarah sehingga mampu menciptakan keuntungan lokasi yang dapat merangsang investasi dan menciptakan kondisi lingkungan hidup yang sehat serta mewujudkan pertumbuhan ekonomi yang optimal dan merata melalui pengaturan ruang dan interaksi kegiatan sosial ekonomi antar wilayah. Kebijakan penataan pertanahan diarahkan untuk mengembangkan sistem pengelolaan dan administrasi pertanahan yang transparan, terpadu, efektif dan efisien; Meningkatkan kepastian hukum hak atas tanah kepada masyarakat; Melakukan penataan kembali penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah secara berkelanjutan sesuai dengan RTRW.

Sasaran bidang Penataan Ruang adalah agar terkendalinya pemanfaatan ruang yang efektif dengan menerapkan prinsip pembangunan berkelanjutan dan keseimbangan pembangunan antar fungsi, meningkatnya



partisipasi masyarakat dalam pengendalian pemanfaatan ruang serta berfungsi/ berperannya BKPRD. Kebijakan Penataan pertanahan memiliki sasaran agar meningkatnya tertib pelayanan administrasi pertanahan, meningkatnya kepastian hukum dan hak atas tanah serta tertatanya kembali penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah secara berkelanjutan sesuai dengan RTRW

C. Agenda Membangun Sumberdaya Manusia Berkualitas.

Dari Agenda ini disusun PRIORITAS dan ARAH KEBIJAKAN untuk mewujudkan Visi Pembangunan dalam pengembangan SDM yang berkualitas. Dalam Agenda Membangun Sumberdaya Manusia Berkualitas terdapat 6 (enam) Prioritas Pembangunan sebagai berikut:

1. Pemerataan dan Peningkatan Kualitas Pendidikan

Prioritas Pembangunan dengan kebijakan yang diarahkan untuk: (1) mensukseskan wajib belajar 9 tahun; (2) meningkatkan kualitas pendidikan (3) meningkatkan peranserta masyarakat dalam pembiayaan pendidikan (pembiayaan dengan subsidi silang); (4) menyelenggarakan pendidikan untuk menghasilkan anak didik yang memiliki kompetensi khusus.

Sasaran pembangunan pendidikan yang akan dikembangkan sampai tahun 2010 antara lain ditandai oleh :

1. Meningkatnya akses masyarakat terhadap pendidikan
2. Meningkatnya kualitas pendidikan.
3. Meningkatnya relevansi pendidikan kejuruan/keterampilan dengan kebutuhan lapangan kerja
4. Meningkatnya jenjang pendidikan masyarakat



5. Meningkatnya profesionalitas dan kuantitas guru serta fasilitator pendidikan nonformal
6. Meningkatnya kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana pendidikan
7. Meningkatnya profesionalitas pengelola dan kualitas manajemen pendidikan
8. Meningkatnya peranserta masyarakat dalam pembiayaan dan kualitas pendidikan
9. Meningkatnya pembiayaan pendidikan dalam APBD Kabupaten

2. Pemerataan dan Peningkatan Kualitas Pelayanan Kesehatan

Prioritas Pembangunan dengan kebijakan yang diarahkan untuk: (1) meningkatkan derajat kesehatan masyarakat secara lebih merata; (2) meningkatkan proporsi keluarga yang berperilaku hidup bersih dan sehat; (3) menurunkan angka kesakitan dan kematian akibat penyakit menular; (4) menurunkan prevalensi gizi buruk pada balita.

Sasaran pembangunan kesehatan pada akhir tahun 2010 adalah meningkatnya derajat kesehatan masyarakat melalui peningkatan akses masyarakat terhadap pelayanan kesehatan yang bisa dilihat dari indikator dampak (*impact*) berikut:

1. Meningkatnya umur harapan hidup.
2. Menurunnya angka kematian bayi.
3. Menurunnya angka kematian ibu melahirkan.
4. Menurunnya prevalensi gizi kurang pada anak balita.
5. Menurunnya angka kesakitan dan kematian akibat penyakit menular



3. Pembangunan Keluarga Berencana

Prioritas Pembangunan Keluarga Berencana diarahkan pada mengendalikan tingkat kelahiran penduduk melalui upaya memaksimalkan akses dan kualitas pelayanan KB terutama bagi keluarga miskin dan rentan serta daerah terpencil; Meningkatkan pemahaman, pengetahuan, sikap dan perilaku positif remaja tentang kesehatan dan hak-hak produksi, guna meningkatkan derajat kesehatan reproduksinya dan mempersiapkan kehidupan berkeluarga dalam mendukung upaya peningkatan kualitas generasi mendatang; serta meningkatkan pemberdayaan dan ketahanan keluarga dalam kemampuan pengasuhan dan penumbuhkembangan anak, peningkatan pendapatan keluarga pra sejahtera dan sejahtera I dan peningkatan kualitas lingkungan keluarga.

Sasaran pembangunan keluarga berencana adalah terkendalinya tingkat kelahiran penduduk dan meningkatnya keluarga kecil berkualitas; meningkatnya kualitas kesehatan reproduksi remaja dalam rangka menyiapkan kehidupan berkeluarga yang lebih baik, serta pendewasaan usia perkawinan; serta meningkatnya kesejahteraan dan ketahanan keluarga dengan memperhatikan kelompok usia penduduk berdasarkan siklus hidup, yaitu mulai dari janin dalam kandungan sampai dengan lanjut usia, dalam rangka membangun keluarga kecil yang berkualitas

4. Peningkatan Partisipasi Perempuan dan Kesejahteraan Keluarga

Prioritas Pembangunan dengan kebijakan yang diarahkan untuk : (1) meningkatkan kualitas SDM perempuan, kedudukan dan peranan perempuan termasuk dalam perumusan kebijakan dan pengambilan keputusan secara adil dan profesional di berbagai bidang kehidupan; (2) menurunkan tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak serta meningkatnya kesejahteraan dan perlindungan anak; (3) membangun sektor yang



responsif gender melalui upaya pengarusutamaan gender yang dimulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi di kabupaten;.

Sasaran pembangunan yang akan dicapai pada tahun 2010 dalam rangka peningkatan kualitas hidup dan peran perempuan dan kesejahteraan keluarga adalah sebagai berikut:

1. Meningkatnya kualitas SDM perempuan, kedudukan dan peranan perempuan termasuk dalam perumusan kebijakan dan pengambilan keputusan secara adil dan profesional di berbagai bidang kehidupan
2. Terlaksananya berbagai upaya perlindungan perempuan
3. Menurunnya tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak serta meningkat-nya kesejahteraan dan perlindungan anak
4. Terwujudnya pembangunan sektor yang responsif gender melalui upaya pengarusutamaan gender yang dimulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi baik di tingkat propinsi maupun kabupaten/kota
5. Tersedianya data dan statistik gender dan anak yang lengkap
6. Menguat dan mantapnya kelembagaan dan jaringan pengarusutamaan gender (PUG) dan anak (PUA)
7. Tersusunnya kebijakan dan program pembangunan daerah yang responsif gender dan peduli anak.

5. Peningkatan Kualitas Pemuda

Prioritas peningkatan kualitas pemuda diarahkan pada peningkatan partisipasi pemuda dan mewujudkan keserasian kebijakan pemuda di berbagai bidang pembangunan, meningkatkan potensi pemuda dalam kewirausahaan, kepeloporan dan kepemimpinan.



Sasaran bidang adalah meningkatnya kualitas pemuda sebagai insan pelopor penggerak pembangunan, SDM yang mampu menghadapi berbagai tantangan dan memanfaatkan peluang untuk berperan serta dalam pembangunan, serta terwujudnya keserasian berbagai kebijakan pembangunan bidang pemuda.

6. Pengembangan Kebijakan dan Manajemen Olah Raga

Prioritas pengembangan olah raga diarahkan pada peningkatan akses dan partisipasi masyarakat secara luas dan merata untuk meningkatkan kesehatan dan kebugaran jasmani, mengembangkan kebijakan dan manajemen olahraga dalam upaya mewujudkan penataan sistem pembinaan dan pengembangan olahraga secara terpadu dan berkelanjutan.

Sasaran bidang adalah meningkatnya budaya olahraga, kesehatan jasmani, mental dan rohani bagi pemuda, masyarakat dan pelajar; meningkatnya upaya pemanduan bakat dan pembibitan olahraga serta pencapaian prestasi olahraga untuk meningkatkan citra daerah.

D. Agenda Mewujudkan Masyarakat Religius yang Bertaqwa kepada Tuhan yang Maha Esa, Rukun Penuh Kedamaian, Berbudaya serta didukung oleh Supremasi Hukum dan Stabilitas Politik yang Handal;

Dalam Agenda Mewujudkan Masyarakat Religius yang Bertaqwa kepada Tuhan yang Maha Esa, Rukun Penuh Kedamaian, Berbudaya serta didukung oleh Supremasi Hukum dan Stabilitas Politik yang Handal, terdapat 4 (empat) Prioritas Pembangunan sebagai berikut:



1. Peningkatan Kualitas Pemahaman dan Pengamalan Ajaran Agama

Prioritas Pembangunan dengan kebijakan yang diarahkan untuk : (1) meningkatkan pelayanan kehidupan beragama; (2) meningkatkan pemahaman, penghayatan, pengamalan dan pengembangan nilai-nilai keagamaan; (3) meningkatkan pendidikan agama dan keagamaan; (4) meningkatkan kerukunan umat beragama; (5) mengembangkan lembaga sosial keagamaan dan lembaga pendidikan keagamaan.

Sasaran bidang peningkatan kualitas pemahaman dan pengamalan ajaran agama sebagai berikut :

1. Terbangunnya pemahaman keagamaan yang komprehensif dan holistic, karenanya agama harus berfungsi utuh dalam membentuk watak dan merubah sikap dan perilaku umat.
2. Terbangunnya kesadaran bahwa ajaran agama adalah suatu yang ilahiyah, sakral, luhur, agung dan pembawa rahmat bagi semesta alam, karenanya diharapkan tidak ada orang atau pihak yang mengecilkan arti agama.
3. Terbangunnya kesadaran kolektif (lintas didiplin) bahwa pemeliharaan suasana keagamaan, pengembangan keagamaan adalah tanggung jawab bersama.

2. Pemberantasan Maksiat dan Penyakit Masyarakat

Prioritas Pembangunan dengan kebijakan yang diarahkan untuk : (1) meningkatkan koordinasi dan kerjasama antar lembaga yang terkait dengan pemberantasan Pekat (Penyakit Masyarakat); (2) memperkuat kerjasama dengan lembaga keagamaan dan pendidikan, dan dengan LSM, LBH (3) melahirkan kebijakan politik yang mendukung pemberantasan Pekat.

Sasaran bidang pemberantasan perbuatan maksiat sebagai berikut :

1. Meratanya pemahaman masyarakat tentang bahaya bermacam penyakit masyarakat.
2. Terlindunginya masyarakat dari seluruh eksese negative berbagai perbuatan maksiat.



3. Terciptanya kesadaran hukum, ketaatan hukum masyarakat, sehingga terjadinya penegakan hukum yang optimal tentang ketentuan perundang-undangan yang berhubungan dengan kegiatan dan atau perbuatan maksiat.
4. Meningkatnya peran serta masyarakat dalam mencegah dan memberantas terjadinya serta meluasnya perbuatan maksiat.

3. Pengembangan Kebudayaan

Prioritas Pengembangan Kebudayaan diarahkan pada pengembangan nilai budaya untuk meningkatkan pemahaman dan rasa kebanggaan terhadap nilai-nilai tradisional, seni dan budaya daerah, serta meningkatnya pelestarian dan pengembangan kekayaan budaya daerah, dengan sasaran agar meningkatnya apresiasi dan kecintaan masyarakat terhadap aset budaya daerah baik yang kasat mata maupun yang tidak kasat mata.

4. Perlindungan dan Kesejahteraan Sosial

Prioritas Perlindungan dan Kesejahteraan Sosial diarahkan untuk memulihkan fungsi sosial, memberikan pelayanan dan rehabilitasi sosial bagi para PMKS, termasuk lanjut usia terlantar, penyandang cacat, dan anak terlantar untuk kelangsungan hidup dan tumbuh kembangnya, meningkatkan kemampuan, keberdayaan sosial dan kualitas hidup keluarga, fakir miskin dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial Lainnya.

Sasaran bidang adalah meningkatnya kualitas pelayanan dan bantuan dasar kesejahteraan sosial bagi PMKS serta meningkatnya pemberdayaan fakir miskin, penyandang cacat dan kelompok rentan sosial lainnya.



Disamping penyusunan Prioritas menurut Agenda Pembangunan Daerah diatas, strategi pembangunan kabupaten Dharmasraya ini juga dibagi kedalam lima tahun yang dikemas dalam tema-tema tahunan sebagai prioritas. Tema dan tahunan dan Prioritas yang dimaksud adalah sebagai berikut:

Tahun 2006 : Tahun Sarana dan Prasarana dan SDM

- a. Penerapan Sistem pemerintahan yang baik
- b. Pengelolaan Aparatur yang profesional
- c. Penyediaan sistem pelayanan yang baik dan transparan
- d. Peningkatan Infra Struktur dan sarana prasarana pemerintahan
- e. Peningkatan kesadaran warga paham hukum dan peraturan
- f. Peningkatan Sarana Prasarana Pelayanan Pendidikan dan kesehatan
- g. Penyediaan air bersih
- h. Peningkatan Kualitas Kehidupan Beragama (Masyarakat yang religius)

Tahun 2007 : Tahun Peningkatan Investasi dan Produktifitas

- a. Penciptaan iklim usaha yang kondusif
- b. Penataan Lingkungan yang indah, asri dan nyaman
- c. Penciptaan masyarakat yang produktif
- d. Peningkatan Kualitas Pendidikan
- e. Penyediaan sarana dan prasarana dasar bagi masyarakat
- f. Peningkatan Tingkat perekonomian



- g. Peningkatan investasi
- h. Peningkatan keamanan
- i. Penegakan (Low inforcement)

Tahun 2008 : Tahun Agroibisnis dan Ketahanan Pangan

- a. Peningkatan pendapatan asli daerah (PAD)
- b. Peningkatan aktivitas perdagangan
- c. Peningkatan dan Perbaikan Sarana Perhubungan dan Penerangan

Tahun 2009 : Tahun Lingkungan

- a. Tahun ekspansi
- b. Peningkatan Ketahanan Pangan

Tahun 2010 : Tahun Sentra Industri, Perdagangan dan Parawisata

- a. Peningkatan perdagangan dan sentra industri
- b. Peningkatan Industri pariwisata



BAB V

ARAH KEBIJAKAN KEUANGAN DAERAH

Reformasi keuangan daerah memberi angin segar kepada daerah untuk mengelola rumah tangga daerahnya sendiri secara otonom. Hal ini didasari oleh pemahaman bahwa daerah lebih mengerti persoalan dalam mengurus daerahnya. Otonomi Daerah sebagai bagian dari reformasi atas kehidupan bangsa yang reformasi di bidang keuangan daerah telah dituangkan dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan daerah.

Salah satu konsekuensi dari UU No. 33 Tahun 2004 tersebut adalah perlunya pengaturan hubungan antara keuangan pemerintah pusat dengan pemerintah daerah. Untuk menjaga konsistensi keuangan pusat - daerah ini telah diberlakukan pula Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan Keuangan Daerah, hal ini untuk menghindari adanya kerancuan dalam hubungan antara keuangan pusat dengan keuangan daerah, dalam arti kata keberadaan UU No. 17/2003 ini merupakan momentum penting dalam reformasi keuangan daerah.

Untuk itu, dalam penerapan prinsip pengelolaan keuangan daerah perlu adanya penerapan prinsip anggaran yang efisien, transparans dan akuntabel dengan sistem penyusunan anggaran yang berbasis kinerja.

5.1. Arah Pengelolaan Pendapatan Daerah

Gambaran yang jelas mengenai Pendapatan dan Alokasi Belanja Daerah pada dasarnya dapat dilihat dengan alokasi anggaran di masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang ada dalam kurun waktu 3 (tiga) tahun terakhir. Namun dikarenakan Kabupaten Dharmasraya yang berusia lebih kurang 2 tahun dan baru pertama kali menyusun APBD pada tahun 2005 ini, maka tidak dapat diperoleh gambaran tentang perkembangan keuangan daerah guna membandingkan kenaikan atau menurunnya Pendapatan dan Alokasi Belanja Daerah di Kabupaten



Dharmasraya. Pada pembahasan Bab ini hanya dapat digambarkan target dan proyeksi Pendapatan dan Alokasi Belanja Daerah Kabupaten Dharmasraya untuk tahun 2005.

Ketentuan tentang pendapatan daerah sudah diatur melalui UU No. 34 Tahun 2002 yang membuat sumber-sumber pendapatan daerah berasal dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), dana perimbangan dan lain-lain pendapatan yang sah. Di dalam APBD Kabupaten Dharmasraya tahun 2005 Target Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebanyak Rp. 8.232.781.000,-. Sumber-sumber PAD tersebut dapat dilihat secara lebih rinci pada tabel 5.1.

Tabel 5.1
Target Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Sumber PAD	Jumlah	Keterangan
Pajak Daerah	Rp. 2.801.906.000,-	
Retribusi Daerah	Rp. 2.880.875.000,-	
Bagian Laba Milik Daerah	Rp. 45.000.000,-	
Lain-lain Pendapatan Asli Daerah	Rp. 2.505.000.000,-	
TOTAL	Rp. 8.232.781.000,-	

Dalam jangka panjang pendapatan daerah akan diprioritaskan pada pendapatan asli daerah yang berasal dari pajak dan retribusi. Hal ini dimungkinkan dengan meningkatnya kesadaran masyarakat untuk membayar pajak dan retribusi, disamping itu peningkatan ini juga disebabkan karena semakin membaiknya ekonomi masyarakat. Selain itu diimbangi pula dengan pengelolaan kekayaan daerah dalam bentuk Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) .

Untuk dana perimbangan pada APBD tahun 2005 berjumlah Rp. 100.393.265.722, yang secara lebih rinci dapat dilihat pada tabel 5.2.

Tabel 5.2



Dana Perimbangan APBD Tahun 2005

Sumber PAD Perimbangan	Jumlah	Ket
Bagi Hasil Pajak dan Bukan Pajak	Rp.14.269.388.864,-	
Dana Alokasi Umum	Rp. 73.672.000.000,-	
Dana Alokasi Khusus	Rp. 5.000.000.000,-	
Bantuan Keuangan Propinsi	Rp. 7.451.876.858,-	
TOTAL	Rp.100.393.265.722,-	

Sedangkan sumber pendapatan yang lain adalah berasal dari pendapatan lain-lain yang sah, yang diperkirakan berjumlah **Rp. 3.073.802.000,-**

Dana Alokasi Umum (DAU) sifatnya hanya sebagai belanja administrasi umum penunjang jalannya pemerintahan. Sebagai tahap awal pembiayaan pembangunan di Kabupaten Dharmasraya diupayakan dari dana DAK, Dekonsentrasi, Perimbangan dan dana Pembantuan lainnya. Oleh karena itu, pemerintah bersama-sama dengan masyarakat perlu proaktif untuk merancang program-program khusus yang terkait dengan arah kebijakan pemerintah yang dituangkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM).

Selain berasal dari sumber-sumber penerimaan tersebut, maka apabila dipandang layak maka pada tahun-tahun yang akan datang perlu digali sumber-sumber dana dari pinjaman, baik pinjaman dari pusat, dari propinsi maupun dari daerah lain.



5.2. Arah Pengelolaan Belanja Daerah

APBD Tahun 2005 Kabupaten Dharmasraya berdasarkan jenis belanja dapat dirinci sebagai berikut :

1. Jenis Belanja : a. Aparatur Daerah
b. Pelayanan Publik
2. Jenis Penggunaan : a. BAU dan BOP
b. Belanja Modal
c. Belanja Bagi Hasil dan Bantuan Keuangan
d. Belanja Tak Tersangka

Sebagaimana dijelaskan di depan bahwa arah penerimaan jangka panjang akan diprioritaskan pada Pendapatan Asli Daerah. Untuk itu, belanja daerah diarahkan pada belanja modal, investasi dan infrastruktur yang terkait dengan kegiatan ekonomi masyarakat baik berupa sarana dan prasarana untuk menunjang produksi maupun untuk menunjang perdagangan seperti pasar. Secara rinci langkah-langkah yang harus dilakukan untuk pengelolaan belanja daerah ini dapat dikelompokkan ke dalam dua tahap yaitu: 1) Melakukan analisis belanja dan 2) pengembangan ekonomi lokal.

5.3. Kebijakan Umum Anggaran

Salah satu tujuan pemerintah daerah yang berkaitan dengan keuangan daerah adalah meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Untuk meningkatkan PAD ini ada 2 (dua) program prioritas yang dilaksanakan yaitu : 1) Memperbaiki sistem pemungutan pajak dan retribusi; 2) Membentuk Perusahaan Daerah.



5.3.1. Perbaikan Sistem Pemungutan Pajak dan Retribusi

Dalam struktur Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Dharmasraya Tahun 2005 ditargetkan pajak dan retribusi daerah memiliki potensi yang paling besar dalam pemenuhan target PAD yaitu sebesar Rp. 5,68 Milyar (73%). Namun kondisi ini masih bisa ditingkatkan dengan penataan sistem yang lebih baik. Untuk memperbaiki sistem pemungutan pajak dan retribusi daerah Pemerintah Kabupaten Dharmasraya perlu melakukan beberapa pembenahan dan peningkatan yang menyangkut :

a. Intensifikasi objek

Pada kondisi tahun 2005 realisasi penerimaan PAD yang berasal dari pajak dan retribusi daerah hanya teralisasi sebesar 67 %, hal ini menunjukkan belum optimalnya pengelolaan potensi, objek dan perlunya intensifikasi terhadap objek.

Intensifikasi terhadap obbjek pajak dan retribusi daerah dilakukan dalam bentuk :

- 1) Melaksanakan pemeriksaan terhadap sektor/bidang yang pencapaiannya masih rendah
- 2) Peningkatan penyuluhan dan pelayanan kepada objek pajak yang dilakukan melalui penyempurnaan sistem informasi dan program pelayanan
- 3) Penyempurnaan sistem manajemen sumber daya manusia petugas pemungut dengan menerapkan sistem pengukuran kinerja
- 4) Memberikan kemudahan dalam pembayaran pajak dan pengukuran tingkat kepuasan wajib pajak



b. Ekstensifikasi objek

Ekstensifikasi objek pajak dan retribusi bertujuan untuk meningkatkan penerimaan daerah, terutama yang bersumber dari pajak dan retribusi. Pada tahun 2005 sumber pajak berasal dari pajak hotel dan restoran, pajak hiburan, pajak reklame, pajak penerangan jalan, pajak pengambilan bahan galian golongan C dan pajak sarang burung walet. Sementara sumber retribusi berasal dari retribusi izin usaha, legalisasi daerah, dan retribusi daerah lainnya.

Dari sumber-sumber pajak dan retribusi daerah yang ada saat ini dan melihat potensi daerah, sangat memungkinkan dilakukan penambahan beberapa objek pajak dan retribusi. Di samping itu diperlukan juga adanya pendataan sasaran untuk mengetahui tingkat kepatuhan dari para wajib pajak. Dengan adanya pendataan ini akan diperoleh gambaran terhadap pencapaian target penerimaan daerah dari pajak dan retribusi. Pendataan sasaran ini juga akan menghasilkan pemutakhiran data sekaligus memberikan indikasi dan potensi wajib pajak baru dalam meningkatkan PAD.

5.3.2. Membentuk Perusahaan Daerah

Kabupaten Dharmasraya memiliki potensi yang bisa dikembangkan dalam upaya meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Beberapa dari potensi yang apabila secara profesional dikelola secara langsung akan membawa pengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi Kabupaten Dharmasraya.

Beberapa potensi yang memiliki peluang untuk dikelola secara profesional, dengan membentuk usaha-usaha produktif yang nantinya akan ditampung dalam bentuk perusahaan daerah, potensi-potensi tersebut meliputi Bidang Perkebunan, Pertambangan, Pengelolaan Air Minum, Rumah Sakit, Jasa Keuangan, Listrik, Sarana Transportasi dan Jasa Konstruksi.



BAB VI

ARAH KEBIJAKAN UMUM

Untuk menjalankan visi dan misi yang telah ditetapkan dan dikemas dalam 4 (empat) Agenda Pembangunan dan Prioritas prioritas pembangunan dari setiap agenda, selanjutnya dirumuskan Arah Kebijakan Umum yang dapat dijadikan sebagai arah bagi Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dalam merumuskan kebijakan guna mencapai kinerja sesuai dengan tugas dan fungsinya, yaitu sebagai berikut :

1. Agenda : Membangun Pemerintah yang Profesional dan Penuh Pengabdian.

Pemerintahan yang profesional dan penuh pengabdian ini merupakan faktor kunci sekaligus prasarat untuk dapat menjalankan fungsi pemerintahan sesuai dengan tuntutan penerapan prinsip Good Governance dan Good Corporate Governance. Kebijakan-kebijakan yang diambil untuk mewujudkan tuntutan tersebut adalah sebagai berikut :

1.1. Prioritas : Peningkatan Kemampuan Pemerintah Daerah dan Nagari

Dalam upaya untuk mencapai sasaran pembangunan dalam pembenahan struktur dan peningkatan kemampuan pemerintahan daerah dan nagari, maka kebijakan penyelenggaraan daerah 2006-2010 diarahkan pada:

1. Menyempurnakan struktur kelembagaan Pemerintah Daerah termasuk tugas pokok dan fungsi masing-masing unit kerja yang relevan untuk menciptakan struktur organisasi yang efisien, efektif dan responsif;
2. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia Aparatur sesuai tugas pokok dan fungsi pemerintahan, melakukan rasionalisasi jumlah pegawai serta penataan-ulang formasi, dan penempatan pegawai;
3. Meningkatkan Kesejahteraan PNS dan pemberlakuan sistem karir berdasarkan prestasi;



4. Meningkatkan pelayanan birokrasi pemerintahan yang profesional melalui pembinaan dan pengawasan serta meningkatkan kualitas administrasi penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah;
5. Meningkatkan kerjasama yang sinergis antara aparaturnya pemerintah daerah dan antar daerah maupun dengan anggota masyarakat;
6. Meningkatkan sistem informasi dan komunikasi pembangunan daerah yang didukung oleh teknologi informasi;
7. Meningkatkan Sarana prasarana aparaturnya pemerintah untuk pendukung pelaksanaan tugas dan pelayanan publik.
8. Meningkatkan penataan kelembagaan nagari dan kualitas SDM perangkat Nagari yang memadai melalui diklat untuk mendukung pelaksanaan pembangunan pemerintahan nagari yang demokratis;
9. Meningkatkan penataan mengenai administrasi pemerintahan nagari maupun administrasi aset-aset nagari;
10. Meningkatkan pengembangan sumber daya aparaturnya pemerintahan nagari;
11. Meningkatkan hubungan kerjasama antar nagari dalam pelaksanaan pemerintahan nagari;
12. Meningkatkan penataan kewenangan pemerintahan nagari sesuai dengan otonomi daerah dan tugas pembantuan oleh pemerintah yang lebih tinggi;
13. Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam melaksanakan pemerintahan nagari.

1.2. Prioritas : Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik

Arah kebijakan peningkatan kualitas pelayanan publik sebagai berikut:

1. Menyusun standar pelayanan yang cepat, murah dan mudah dalam setiap produk layanan pemerintah; baik pelayanan dasar, pelayanan umum dan pelayanan unggulan dengan pembinaan peraturan yang menjadi dasar pelayanan.



2. Memperjelas proses setiap produk pelayanan publik kepada masyarakat melalui penyediaan berbagai skema, matrik, bagan yang mudah dipahami termasuk persyaratan, waktu yang dibutuhkan, besar biaya yang harus dibayar dalam setiap tahapan/proses pelayanan.
3. Menyiapkan ketersediaan aparatur daerah yang memiliki etos kerja baik, profesional, dan cekatan melalui pengelolaan sumber daya manusia berdasarkan standar kompetensi.
4. Meningkatkan kualitas pengawasan kinerja aparatur, melalui sistem kontrol multi pihak dengan cara pemberian penghargaan kepada yang berprestasi dan ganjaran kepada yang melakukan pengawasan.
5. Meningkatkan transparansi, partisipasi, dan mutu playanan melalui peningkatan akses dan sebaran informasi.

1.3. Prioritas : Pembangunan Kependudukan

Arah Kebijakan Pembangunan Kependudukan adalah sebagai berikut :

1. Penataan administrasi kependudukan guna mendorong terakomodasinya hak hak penduduk
2. Meningkatkan kualitas dokumen, data, dan informasi penduduk, dalam mendukung perencanaan dan pelaksanaan pembangunan berkelanjutan serta pelayanan publik.

1.4. Prioritas :Pemberantasan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme

Arah kebijakan bidang pemberantasan korupsi, kolusi dan nepotisme sebagai berikut:

1. Meningkatnya pemberantasan korupsi, kolusi, nepotisme
2. Meningkatnya transparansi dalam pengadaan barang dan jasa publik
3. Meningkatnya efektifitas pengawasan dalam penyelenggaraan pemerintahan



4. Meningkatnya kerjasama antara aparaturnya penegak hukum dengan auditor
5. Meningkatnya sistem pengaturan rekrutmen, promosi, mutasi pegawai dilingkungan pemerintahan daerah
6. Meningkatnya fungsi penegakan hukum oleh aparaturnya dan koordinasi dengan penegak hukum lainnya
7. Meningkatnya keterlibatan masyarakat dalam pemberantasan KKN dan pemberantasan korupsi.

1.5. Prioritas : Peningkatan Pengelolaan Keuangan Daerah

Kebijakan pengelolaan keuangan daerah dilakukan dengan cara:

1. Mendorong pertumbuhan dan pembangunan ekonomi daerah,
2. Membenahi manajemen data penerimaan PAD, dan mengevaluasi dan merevisi Perda Pajak dan Retribusi Daerah secara berkala,
3. Menetapkan target penerimaan berdasarkan potensi penerimaan, dan meningkatkan penerimaan pendapatan non konvensional,
4. Mengembangkan kelembagaan penerimaan daerah sesuai dengan kebutuhan daerah
5. Menginventarisir secara akurat semua asset pemerintah daerah.
6. Menetapkan Perda tentang pengelolaan keuangan daerah,
7. Memantapkan manajemen pengelolaan keuangan daerah untuk mewujudkan manajemen keuangan daerah secara transparan dan akuntabel.
8. Menerapkan prinsip efisiensi dalam penyusunan dan penetapan prioritas anggaran, serta menerapkan *money follow function* dalam menyusun anggaran,
9. Mengeluarkan produk hukum tentang Standar Biaya Aparatur, Standar Harga Barang dan Pedoman Umum Penggunaan Anggaran, dan produk hukum lainnya yang terkait dalam penyusunan anggaran.



10. Meningkatkan pengetahuan aparatur pengelola keuangan daerah melalui pelatihan dan mengikuti pendidikan formal,
11. Menerapkan sistem dan pelaporan hasil pengawasan sesuai dengan aturan yang ada,
12. Meningkatkan kemampuan pemeriksa / auditor dalam pemeriksaan penggunaan anggaran.

1.6. Prioritas : Pembangunan Hukum dan Perlindungan Hak Asasi Manusia (HAM)

Dalam rangka peningkatan pembangunan hukum dan perlindungan HAM di Kabupaten Dharmasraya, maka kebijakan pemerintahan daerah diarahkan untuk :

1. Pembangunan materi hukum, struktur hukum/ budaya hukum dan perlindungan dalam kehidupan sosial ekonomi budaya dan HAM
2. Pembinaan, penyusunan, dan pengawasan serta evaluasi produk hukum daerah.
3. Penegakan supremasi hukum, sengketa dan perlindungan HAM
4. Pembentukan sistim hukum dan penataan produk hukum daerah yang aspiratif dan akomodatif yang mendukung perkembangan ekonomi daerah dan menjamin kesinambungan potensi sumber daya lingkungan di daerah.
5. Dokumentasi dan informasi hukum dan HAM
6. Supremasi hukum, bantuan hukum, sosialisasi dan perlindungan HAM

1.7. Prioritas : Pemberdayaan dan Pembinaan Ormasy dan Orpol

Arah kebijakan pemberdayaan dan pembinaan organisasi masyarakat dan partai politik diarahkan terhadap :

1. Peningkatan koordinasi dan fasilitasi antara pemerintah daerah dengan ormasy dan parpol
2. pembinaan politik



1.8. Prioritas : Peningkatan Keamanan dan Ketertiban

Arah kebijakan bidang peningkatan keamanan dan ketertiban sebagai berikut

1. Melakukan koordinasi dan fasilitasi antara sesama penegak hukum dan antara penegak hukum dengan fungsionaris politik maupun fungsionaris non formal ditengah-tengah masyarakat.
2. Memfasilitas penyelesaian konflik yang terjadi dengan pendekatan musyawarah mufakat
3. Peningkatan peran masyarakat dalam pencegahan kemungkinan konflik dan mengatasi konflik yang terjadi
4. Meningkatkan kapasitas Polisi Pamong Praja guna pemeliharaan kamtibmas dan penegakan peraturan daerah.

2. Agenda : Membangun Masyarakat yang Produktif dan memiliki ekonomi yang tangguh.

2.1. Prioritas : Revitalisasi Pertanian dan Pengembangan Agroindustri

Arah kebijakan revitalisasi pertanian dan pengembangan agroindustri sebagai berikut :

1. Membangun sistem ketahanan ketahanan pangan (hewani dan nabati) lokal dalam konteks peningkatan kemampuan produksi, distribusi, dan konsumsi di tingkat lokal nagari dan keterkaitannya dengan kabupaten, daerah tetangga, dan provinsi.
2. Merevitalisasi sistem kelembagaan dan pendekatan penyuluhan pertanian dan pendampingan terhadap petani tanaman pangan dan hortikultura, perkebunan, peternakan, dan perikanan.
3. Menghidupkan, memperkuat, atau membentuk lembaga agribisnis dan agroindustri pada kawasan-kawasan sentra produksi yang dapat meningkatkan akses petani dan peternak terhadap sumberdaya ekonomi produktif.
4. Meningkatkan kemampuan/kualitas SDM pelaku usaha pertanian sehingga handal dalam pelaksanaan usaha dan mampu bersaing.



6. Memperkuat sistem pemasaran dan manajemen usaha untuk mengelola resiko usaha pertanian dan mendukung pengembangan agroindustri pedesaan.
9. Mengelola sumberdaya lahan dan air dengan mengacu kepada prinsip-prinsip pengelolaan terpadu sumberdaya.

2.2. Prioritas : Pengembangan Industri

Arah kebijakan pembangunan sektor industri ini disesuaikan dengan ketersediaan bahan baku, keterkaitan dengan sektor lain, kebutuhan konsumen di daerah dan peluang pasar dimasa yang akan datang. Arah pengembangan industri dimasa yang akan datang adalah :

1. Mengembangkan industri kecil/ rumah tangga dengan meningkatkan daya saing industri untuk meningkatkan peran dan kontribusi industri terhadap pertumbuhan ekonomi daerah.
2. Mengembangkan industri yang bergerak dalam pengolahan produk-produk pertanian.
3. Mengembangkan industri rumah tangga dan industri kecil yang mengolah bahan-bahan baku lokal yang banyak menyerap tenaga kerja.
4. Mengembangkan industri-industri pada kawasan-kawasan khusus berdasarkan keterampilan tenaga kerja yang tersedia turun temurun, ketersediaan bahan baku, dan pasar sasaran yang spesifik.
5. Memperluas akses pasar produk industri baik untuk ekspor maupun untuk pasar domestik

2.3. Prioritas : Pengembangan Kelembagaan Ekonomi

Pengembangan kelembagaan ekonomi dalam lima tahun yang akan datang diarahkan kepada :

1. Pengembangan sistem dan kelembagaan pendukung pembinaan usaha kecil dan menengah dengan menetapkan pedoman dan mekanisme pembinaan yang dapat menciptakan keterpaduan antar instansi dan lembaga terkait.



2. Menyusun kebijakan yang dapat memberi ruang gerak dan kesempatan yang lebih terbuka bagi usaha kecil dan menengah dalam melakukan dan mengembangkan usahanya. Akan didorong pengembangan kelembagaan usaha pada tingkat nagari guna meningkatkan pemerataan dan optimalisasi pemanfaatan sumberdaya pembangunan.
3. Meningkatkan kualitas sumberdaya manusia aparatur agar lebih profesional dalam melakukan pembinaan dan memberikan pelayanan pada pelaku usaha kecil dan menengah.
4. Peningkatan kualitas pelaku usaha guna pengembangan keterampilan dan jiwa kewirausahaan untuk dapat melahirkan pelaku usaha yang mempunyai kemampuan tinggi dan mandiri dalam pengelolaan usaha.
5. Peningkatan Peran kelembagaan KUKM agar dapat melakukan fasilitasi kegiatan organisasi dan perintisan pengembangan usaha, penguasaan dan penciptaan pasar dan sumber pembiayaan.
6. Pengembangan Akses Pembiayaan KUKM ke sumber-sumber pembiayaan dalam rangka pengembangan usaha melalui layanan lembaga keuangan termasuk koperasi, lembaga keuangan dan perbankan serta lembaga pembiayaan lainnya sebagai sistem yang terintegrasi, yang mudah diakses oleh KUKM serta membantu restrukturisasi modal usaha KUKM.

2.4. Prioritas : Peningkatan Investasi dan Pengembangan Kerjasama Antar Daerah

Arah Kebijakan Peningkatan Investasi dan Pengembangan Kerjasama Antar Daerah adalah :

1. Melakukan analisis potensi sumber daya untuk menentukan peluang dan prioritas investasi di daerah Kabupaten Dharmasraya.
2. Merancang peraturan daerah yang mampu meningkatkan daya saing serta mendorong peningkatan investasi di daerah dalam upaya pengembangan investasi di daerah dengan mengedepankan prinsip kepastian hukum, deregulasi, simplifikasi, dan efisiensi baik biaya maupun waktu.



3. Memperkuat koordinasi antar instansi yang terkait dalam pelayanan dan perizinan penanaman modal serta mengembangkan system pembinaan dan pengendalian untuk terciptanya investasi yang lancar dan aman.

2.5. Prioritas : Pengembangan Infrastruktur Transportasi

Arah Kebijakan Pengembangan Infrastruktur Transportasi adalah :

1. Melakukan penataan sistem jaringan angkutan jalan, manajemen lalu lintas, pemasangan fasilitas dan rambu jalan, serta meningkatkan profesionalisme petugas.
2. Peningkatan pelayanan angkutan jalan raya secara terpadu dilakukan berupa pencegahan, pembinaan dan penegakan hukum, penanganan dampak kecelakaan pada daerah rawan kecelakaan, pengujian kelaikan sarana.
3. Melengkapi sarana dan prasarana keselamatan lalu lintas secara komprehensif dan terpadu.

2.6. Prioritas : Pembangunan Prasarana Perumahan dan Permukiman

Pemenuhan kebutuhan masyarakat terhadap pembangunan perumahan dan permukiman yang layak huni akan tetap menjadi perhatian, khususnya bagi kebutuhan masyarakat berpenghasilan menengah dan rendah. Sesuai dengan permasalahan yang ditemui saat ini dimana sarana dan prasarana perumahan dan permukiman belum memadai, maka upaya yang akan dilakukan adalah,

1. Penyediaan fasilitas dan jaringan air bersih yang memadai, baik dari segi kualitas maupun kuantitas dan terdistribusi secara merata,
2. Pembangunan Pembuangan air limbah dan drainase,
3. Pembangunan TPA / persampahan,
4. Pembangunan jalan lingkungan



5. Pembangunan fasilitas pendukung lainnya
6. fasilitasi pembangunan rumah baru yang layak huni

2.7. Prioritas : Pengembangan Sumber Daya Air

Peningkatan prasarana sumber daya air dan irigasi ditujukan untuk memenuhi kebutuhan pengairan bagi usaha pertanian dalam mendukung peningkatan ketahanan pangan daerah, kebutuhan rumah tangga terutama bagi daerah kekurangan air, wilayah tertinggal, untuk industri dan dunia usaha, pariwisata, serta pengendalian daya rusak air, terutama penanggulangan banjir, pengelolaan daerah aliran sungai dan danau. Untuk menjamin ketersediaan air yang berkelanjutan maka kebijakan yang akan dilakukan adalah

- (1) Peningkatan konservasi sumber daya air,
- (2) Peningkatan pelaksanaan Operasi dan Pemeliharaan Infrastruktur irigasi,
- (3) Mengurangi terjadinya kerusakan irigasi,
- (4) Peningkatan fungsi jaringan irigasi yang dan mengurangi terjadinya kerusakan irigasi.
- (5) Penanggulangan banjir, pengamanan sungai, terutama pada daerah yang berpenduduk padat dan wilayah strategis,
- (6) Peningkatan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan O & P jaringan irigasi.

2.8. Prioritas : Pengembangan BUMD

Kabupaten Dharmasraya memiliki potensi pengembangan BUMD dalam upaya meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Beberapa dari potensi tersebut apabila dikelola secara profesional akan membawa pengaruh



terhadap pertumbuhan ekonomi Kabupaten Dharmasraya. Beberapa potensi dimaksud meliputi Bidang Perkebunan, Bidang Pertambangan, Pengelolaan sumber air minum, Rumah Sakit, Jasa keuangan, Listrik, dan Sarana Transportasi.

Kebijakan yang diambil dalam rangka pengembangan Badan Usaha Milik Daerah sebagai berikut:

1. Mendirikan Perusahaan Daerah dalam upaya meningkatkan PAD.
2. Meningkatkan peranan BUMD / Perusahaan Daerah dalam mendorong perekonomian masyarakat, terutama pengusaha kecil, menengah, dan koperasi (corporate social responsibility).
3. Meningkatkan efisiensi dan efektifitas organisasi dan manajemen perusahaan daerah, serta membangun praktek yang sehat dalam pengelolaan perusahaan.

2.9. Pembangunan Ketenagakerjaan

Kebijakan yang akan dilaksanakan untuk peningkatan kualitas pembangunan di bidang kependudukan dan kualitas tenaga kerja dititikberatkan pada:

1. Peningkatan kualitas keterampilan, kompetensi dan kemandirian tenaga kerja melalui pendidikan dan pelatihan tenaga kerja dan pengembangannya di tempat kerja
2. Peningkatan sistem jaminan sosial tenaga kerja untuk mendapatkan perlindungan keamanan dan keselamatan kerja
3. Peningkatan perluasan kesempatan kerja, untuk mendorong kesempatan kerja pada industri padat karya
4. Peningkatan kualitas dokumen data dan informasi ketenagakerjaan, melalui sistem terpadu dan sinergi antar instansi terkait.



2.10. Pembangunan Pertambangan dan Energi

Kebijakan pembangunan pertambangan dan energi diarahkan pada :

1. Optimalisasi pemanfaatan sumber daya mineral, batubara melalui usaha pertambangan dengan prinsip good mining practice,
2. Menjamin kepastian hukum melalui penyerasian aturan dan penegakan hukum secara konsekwen,
3. Meningkatkan pemerataan pemenuhan kebutuhan energi dan listrik ke daerah-daerah terpencil,
4. Mendorong tumbuh dan berkembangnya upaya penggunaan energi alternatif..

2.11. Pengembangan Pariwisata

Kebijakan pengembangan pariwisata di Kabupaten Dharmasraya tahun 2006-2010 akan diarahkan pada hal-hal antara lain :

1. Pengembangan Objek-objek wisata potensial di daerah
2. Peningkatan partisipasi masyarakat pelaku usaha pariwisata dalam membangun dan mengembangkan kepariwisataan.
3. Meningkatkan atraksi-atraksi wisata yang berkaitan dengan seni dan budaya daerah, serta atraksi anak nagari.

2.12. Prioritas : Pengelolaan Sumberdaya Alam

Arah kebijakan ini dirumuskan secara generik yang akan mencakup ketiga kategori komponen sumberdaya alam, yaitu: (1) lahan, air, dan hutan; (2) mineral dan tambang.



1. Memperbaiki sistem manajemen dengan menerapkan pendekatan pengelolaan sumberdaya alam secara terpadu (antara pemanfaatan dan konservasi) untuk menjaga kondisi fisik sumberdaya pada tingkat yang dapat memberi manfaat secara berkelanjutan.
2. Meningkatkan peran serta stake holder dan mengoptimalkan pemanfaatan potensi dan program pengelolaan sumberdaya alam (termasuk penyediaan jasa lingkungan) untuk pengentasan kemiskinan dan peningkatan kesejahteraan rakyat.
3. Melaksanakan pembangunan ekonomi berbasis sumberdaya alam (proses produksi dan pemanfaatan) dengan mengacu kepada prinsip-prinsip keberlanjutan (ekologi, pertumbuhan ekonomi, dan keadilan social).
4. Meningkatkan pengawasan dan pengendalian melalui pembuatan peraturan daerah, monitoring dan evaluasi yang diperlukan untuk perbaikan system manajemen dan peningkatan pengelolaan dan penegakan hukum.
5. Meningkatkan kapasitas kelembagaan dan kemampuan teknis pengelolaan sumberdaya alam baik oleh pemerintah daerah maupun masyarakat dalam kerangka penerapan prinsip-prinsip keberlanjutan.
6. Meningkatkan pelaksanaan rehabilitasi dan pemulihan cadangan sumberdaya alam yang rusak/terdegradasi dan mengendalikan pencemaran.
7. Mengembangkan sistem informasi sumberdaya alam untuk mendukung pengambilan keputusan dan mitigasi bencana (banjir, kekeringan, longsor, gempa bumi, tsunami dan bencana alam lainnya) dan pengendalian daya rusak air.

2.13. Prioritas : Penataan Ruang dan Pertanahan

Kebijakan penataan ruang merupakan satu kesatuan dengan kebijakan pembangunan daerah secara keseluruhan. Sehubungan dengan hal ini, aspek-aspek pemerataan dan pertumbuhan merupakan dua hal utama



yang melandasi penentuan kebijakan penataan ruang di Sumatera Barat. Atas pertimbangan tersebut kebijakan penataan ruang di Kabupaten Dharmasraya adalah:

1. Menyediakan dokumen rencana tata ruang yang lebih terinci pada kawasan fungsional seperti kawasan pariwisata, kawasan wilayah tertinggal, kawasan cepat tumbuh, kawasan andalan, kawasan pertambangan, kawasan perbatasan dan kawasan lainnya.
2. Memaduserasikan RTRW Kabupaten Dharmasraya dengan RTRW Kabupaten berbatasan yang disusun setelah selesainya RTRW Kabupaten Dharmasraya;
3. Mengikuti perkembangan penataan ruang yang dinamis dengan evaluasi secara rutin RTRW sesuai aturan perundangan yang berlaku agar rencana tata ruang dapat selalu mengikuti perkembangan jaman.
4. Memberikan penyuluhan dan sosialisasi secara intensif kepada masyarakat tentang pentingnya tata ruang untuk selalu dipedomani dalam berbagai kegiatan pembangunan yang dilakukan.
5. Peningkatan fungsi koordinasi penataan ruang agar perencanaan, pemanfaatan dan pengendalian yang dapat diimplementasikan secara efektif serta peningkatan peran serta masyarakat dan pengguna ruang lainnya dalam proses pengendalian pemanfaatan ruang.
6. Meningkatkan fungsi koordinasi pengendalian pemanfaatan ruang melalui BKPRD di Kabupaten dan Peningkatan penegakkan hukum dalam pelaksanaan peraturan penataan ruang;

Kebijakan penataan pertanahan diarahkan untuk

1. Mengembangkan sistem pengelolaan dan administrasi pertanahan yang transparan, terpadu, efektif dan efisien;
2. Meningkatkan kepastian hukum hak atas tanah kepada masyarakat;



3. Melakukan penataan kembali penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah secara berkelanjutan sesuai dengan RTRW.

2.14. Prioritas : Penanggulangan Bencana Alam

Untuk mencapai sasaran di atas, maka pemerintah daerah menetapkan arah kebijakan sebagai berikut:

1. Mengurangi resiko/dampak yang ditimbulkan oleh bencana, khususnya bagi penduduk yang berada di daerah rawan bencana alam;
2. Meningkatkan ketersediaan data, peta dan informasi daerah rawan bencana alam;
3. Meningkatkan pengetahuan dan pemahaman masyarakat tentang pencegahan dan penanggulangan bencana
4. Meningkatkan peran serta semua pihak, baik pemerintah, masyarakat dan swasta dalam penanggulangan bencana
5. Meningkatkan ketersediaan sarana dan prasarana untuk penanggulangan bencana;
6. Melaksanakan program penghijauan daerah kawasan kritis.

3. Agenda : Membangun Sumberdaya Manusia Berkualitas.

3.1. Pemerataan dan Peningkatan Kualitas Pendidikan

Secara umum kebijakan pendidikan di Kabupaten Dharma Raya tahun 2006 - 2010 untuk mencapai sasaran yang telah ditetapkan diarahkan pada kebijakan berikut ini.

1. Meningkatkan perluasan, pemerataan dan kualitas pendidikan formal dan nonformal serta memberikan akses yang lebih besar kepada masyarakat tidak mampu, terisolir, penyandang kelainan fisik dan mental.



2. Mensukseskan program Wajib Belajar 9 Tahun guna meningkatkan derajat pendidikan dan kualitas masyarakat;
3. Mengembangkan kurikulum bermuatan lokal dengan moral ke-Islaman, keminangkabauan, lingkungan hidup, keterampilan, dan kearifan lokal guna meningkatkan kepribadian, etos kerja dan kewirausahaan peserta didik;
4. Mengembangkan sistem pembelajaran dan pengelolaan yang transparan, akuntabilitas, dan kompetitif pada setiap jenis dan jenjang pendidikan
5. Meningkatkan pembiayaan pendidikan yang berprinsip adil, efisien, efektif, transparan dan akuntabel melalui APBD hingga mencapai 20 persen.
6. Memberikan beasiswa pada anak yang memiliki kecerdasan lebih dan tenaga kependidikan yang berprestasi untuk melakukan studi lanjut pada lembaga pendidikan yang berkualitas.
7. Mengembangkan pendidikan nonformal yang berorientasi pada pendidikan kecakapan hidup bagi pemuda/i pengangguran, pendidikan kesetaraan, pendidikan anak usia dini, pendidikan keagamaan, pendidikan budaya dan pemberdayaan perempuan;
8. Meningkatkan kualitas dan komitmen pendidik dan tenaga kependidikan dalam mencapai pembelajaran yang bermutu dan demokratis serta meningkatkan kesejahteraannya.
9. Memberikan insentif kompetitif pada guru yang mengelenggarakan pembelajaran berkualitas dan komitmen tinggi dalam mendidik;
10. Mengembangkan sistem insentif kompetitif bagi tenaga kependidikan yang secara nyata mampu meningkatkan kualitas lembaganya;
11. Mengembangkan sistem *the right man and the right place* bagi pengelola struktural pendidikan melalui penjaringan dan penyaringan yang transparan dan akuntabel.



3.2. Pemerataan dan Peningkatan Kualitas Pelayanan Kesehatan

Untuk mencapai sasaran tersebut, kebijakan pembangunan kesehatan, diarahkan pada:

- (1) Meningkatkan jumlah, jaringan dan kualitas puskesmas;
- (2) Meningkatkan kualitas dan kuantitas tenaga kesehatan;
- (3) Mengembangkan sistem jamian kesehatan terutama bagi penduduk miskin;
- (4) Meningkatkan sosialisasi kesehatan lingkungan dan pola hidup sehat;
- (5) Meningkatkan pendidikan kesehatan pada masyarakat sejak usia dini; dan
- (6) Meningkatkan pemerataan dan Meningkatkan kualitas fasilitas kesehatan dasar.

Pembangunan kesehatan memprioritaskan upaya promotif dan preventif yang dipadukan secara seimbang dengan upaya kuratif dan rehabilitatif. Perhatian khusus diberikan kepada pelayanan kesehatan bagi penduduk miskin, daerah tertinggal, dan daerah bencana.

3.3. Pembangunan Keluarga Berencana

Kebijakan Pembangunan Keluarga Berencana diarahkan terhadap hal hal sebagai berikut :

1. Mengendalikan tingkat kelahiran penduduk melalui upaya memaksimalkan akses dan kualitas pelayanan KB terutama bagi keluarga miskin dan rentan serta daerah terpencil.
2. Meningkatkan pemahaman, pengetahuan, sikap dan perilaku positif remaja tentang kesehatan dan hak-hak produksi, guna meningkatkan derajat kesehatan reproduksinya dan mempersiapkan kehidupan berkeluarga dalam mendukung upaya peningkatan kualitas generasi mendatang



3. Meningkatkan pemberdayaan dan ketahanan keluarga dalam kemampuan pengasuhan dan penumbuhkembangan anak, peningkatan pendapatan keluarga pra sejahtera dan sejahtera I dan peningkatan kualitas lingkungan keluarga.

3.4. Peningkatan Partisipasi Perempuan dan Kesejahteraan Keluarga

Adanya kondisi yang bersifat kultural (terkait dengan nilai-nilai budaya matrilineal) dan sekaligus bersifat struktural (dimainkan oleh tatanan sosial politik yang ada), maka diperlukan tindakan pemihakan yang jelas dan nyata guna mengurangi kesenjangan gender di berbagai bidang pembangunan. Untuk itu, diperlukan kemauan politik yang kuat agar semua kebijakan dan program pembangunan yang memperhitungkan kesetaraan gender, serta peduli anak. Prioritas dan arah kebijakan pembangunan yang akan dilakukan adalah:

1. Meningkatkan kualitas hidup perempuan terutama di bidang pendidikan, kesehatan dan ekonomi
2. Meningkatkan peran perempuan di bidang politik
3. Meningkatkan kesejahteraan dan perlindungan anak, terutama di bidang pendidikan, kesehatan
4. Meningkatkan kampanye anti kekerasan terhadap perempuan dan anak
5. Menyempurnakan perangkat hukum yang lebih lengkap dalam melindungi perempuan dan anak dari berbagai tindak kekerasan, eksploitasi, dan diskriminasi, termasuk kekerasan dalam keluarga
6. Meningkatkan peran kelembagaan, koordinasi dan jaringan pengarusutamaan gender dan anak dalam perencanaan pembangunan di tingkat provinsi dan kabupaten/kota



3.5. Peningkatan Kualitas Pemuda

Sasaran yang menjadi target dalam pembinaan pemuda dan olahraga tersebut diwujudkan dengan arah kebijakan berikut ini.

1. Mewujudkan koordinasi dan sinergi pembinaan dan peranserta pemuda di berbagai bidang pembangunan;
2. Memperluas kesempatan memperoleh pendidikan dan keterampilan;
3. Mengembangkan berbagai kegiatan pembinaan bakat pemuda guna mewujudkan kemandirian;
4. Melindungi pemuda dari perbuatan maksiat;
5. Meningkatkan dan mengembangkan berbagai kegiatan keislaman dan keminangkabauan serta kearifan lokal;

3.6. Pengembangan Kebijakan dan Manajemen Olah Raga

Arah kebijakan pembangunan dibidang olahraga adalah :

1. Mengembangkan manajemen profesional organisasi olahraga yang terpadu dan berkelanjutan;
2. Meningkatkan akses dan partisipasi masyarakat secara lebih luas dan merata untuk meningkatkan kesehatan dan kebugaran jasmani;
3. Meningkatkan sarana dan prasarana pembinaan bakat pemuda dan olahraga yang berkualitas secara merata;
4. Meningkatkan upaya pembibitan dan pengembangan prestasi olahraga secara sistematis, berjenjang dan berkelanjutan;
5. Meningkatkan pola kemitraan dan kewirausahaan dalam pembinaan prestasi olahraga;
6. Mengembangkan potensi olahraga sesuai potensi daerah dalam upaya memacu prestasi pemuda;
7. Mengembangkan sistem penghargaan dan meningkatkan kesejahteraan atlet, pelatih, tenaga keolahragaan;
8. Mengembangkan prestasi olahraga pelajar dan mahasiswa melalui berbagai kompetisi.



4. Agenda : Mewujudkan Masyarakat Religius yang Bertaqwa kepada Tuhan yang Maha Esa, Rukun Penuh Kedamaian, Berbudaya serta didukung oleh Supremasi Hukum dan Stabilitas Politik yang Handal;

4.1. Peningkatan Kualitas Pemahaman dan Pengamalan Ajaran Agama

Arah kebijakan bidang peningkatan kualitas pemahaman dan pengamalan ajaran agama sebagai berikut :

1. Terciptanya iklim pembangunan keagamaan mengakomodasikan sebanyak mungkin hasrat umat bergama untuk sebanyak-banyaknya melaksanakan ajaran agamanya, dengan sepenuhnya mempertimbangkan daya dukung umat dan situasi dan kondisi lingkungan, dengan selalu mengindahkan norma/hukum dan kesepakatan bersama.
2. Tumbuhnya kesadaran Pemuka agama dan Lembaga Keagamaan, untuk mengarahkan orientasi pembangunan keagamaan secara berimbang antara orientasi pembangunan fisik/tampak lahir (misalnya pembangunan fisik masjid), dengan orientasi non-fisik (misalnya penggiatan peningkatan pengetahuan, wawasan, pengajian, wirid dll) sehingga Masjid diharapkan memiliki multi dimensi, memanfaatkan Masjid tidak sekedar rumah ibadah, tapi juga rumah sosial, tidak sekedar menyelamatkan umat masa kini, tapi menyongsong dan merebut masa depan.
3. Terbangunnya iklim keagamaan yang kaaffah (komprehensif), tidak sekedar bersifat formalistik dan simbolik, tapi meningkat pada makna terdalam dari ajaran agama, sehingga ajaran agama mengalami internalisasi pada setiap umat. Karenanya pengajaran agama tidak sekedar transformasi "pengetahuan Agama" tapi mampu merubah perilaku umat kearah perilaku yang Islami, pengajaran Al-Qur'an tidak sekedar membaca tapi menghayati maknanya.
4. Upaya peningkatan kepedulian dan kesadaran masyarakat dalam memenuhi kewajiban religinya dengan membayar zakat, infak dan sedekah dalam rangka mengurangi tingkat kesenjangan sosial ekonomi, memberi



peran yang lebih besar bagi lembaga pendidikan keagamaan dalam pembangunan serta mengembangkan lembaga ekonomi dan keuangan yang berbasis keagamaan.

4.2. Pemberantasan Maksiat dan Penyakit Masyarakat

Arah kebijakan bidang pemberantasan perbuatan maksiat sebagai berikut :

1. Mewujudkan suasana yang tertib, nyaman dan tidak resah dikalangan masyarakat
2. Mewujudkan terbentuknya “immunitas budaya” masyarakat, suatu mekanisme internal masyarakat dalam menyaring dan menyeleksi serbuan budaya asing ketengah masyarakat.
3. Memperkuat identitas dan kebanggaan masyarakat terhadap jati diri sebagai masyarakat Minangkabau berbudaya, yang bersih dari pengaruh negative dan dampak negative dari era globalisasi, era IT dan perubahan zaman.
4. Terdapatnya KISS antara berbagai lembaga yang terkait dengan pemberantasan Maksiat, sehingga program ini lebih terarah, berdaya guna dan berhasil guna.

4.3. Pengembangan Kebudayaan

Arah kebijakan bidang pengembangan kebudayaan sebagai berikut :

1. Mengembangkan kehidupan budaya menuju suatu peradaban yang bermartabat dan dilandasi moralitas yang tinggi dan tidak bertentangan dengan nilai-nilai kemanusiaan.
2. Memupuk rasa percaya diri serta mengembangkan identitas budaya ditengah keragaman masyarakat daerah, nasional dan global.



3. Memupuk rasa solidaritas sosial serta mengembangkan toleransi terhadap perbedaan, sehingga dapat menumbuhkan daya pikir kreatif, kritis dan demokratis.
4. Pengembangan nilai budaya untuk meningkatkan pemahaman dan rasa kebanggaan terhadap nilai-nilai tradisional, seni dan budaya daerah.

4.3. Perlindungan dan Kesejahteraan Sosial

Arah kebijakan bidang perlindungan dan kesejahteraan sosial sebagai berikut :

1. Meningkatkan kualitas pelayanan dan bantuan dasar kesejahteraan sosial bagi PMKS
2. Meningkatkan pemberdayaan fakir miskin, penyandang cacat dan kelompok rentan sosial lainnya.
3. Meningkatkan kualitas hidup bagi PMKS terhadap pelayanan sosial dasar, fasilitas pelayanan publik dan jaminan kesejahteraan sosial.
4. Meningkatkan kualitas manajemen pelayanan kesejahteraan sosial dalam mendayagunakan sumber-sumber kesejahteraan sosial.
5. Meningkatkan prakarsa dan peran aktif masyarakat , dunia usaha, perguruan tinggi, dan Orsos/ LSM dalam penyelenggaraan pembangunan kesejahteraan sosial secara terpadu dan berkelanjutan.



BAB VII

PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH

Program pembangunan daerah dirancang untuk mewujudkan visi dan misi yang telah ditetapkan dan dirangkum dalam 4 (empat) agenda pembangunan Kabupaten Dharmasraya tahun 2006 - 2010. Prioritas pembangunan dari setiap agenda dijabarkan dalam Sasaran, Arah Kebijakan dan selanjutnya dirinci ke dalam program dan kegiatan-kegiatan pokok.

Untuk selanjutnya Program-program dan kegiatan pokok untuk mendukung Agenda dan Prioritas pembangunan di Kabupaten Dharmasraya dalam jangka waktu 5 (lima) tahun kedepan (2006 - 2010) adalah sebagai berikut :

1. Agenda : Membangun Pemerintah yang Profesional dan Penuh Pengabdian.

1.1. Peningkatan Kemampuan Pemerintah Daerah dan Nagari

Berdasarkan arah dan kebijakan untuk meningkatkan kemampuan pemerintah daerah dan nagari, disusun program Program sebagai berikut :

1.1.1. Program : Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Pemerintah Daerah.

Indikasi Kegiatan :

1. Perumusan Kelembagaan Pemerintah Daerah yang efisien, efektif, profesional, akuntabel dan adaptif, serta perumusan Tugas Pokok dan fungsi.
2. Perumusan Ketatalaksanaan Pemerintah Daerah.
3. Perumusan Jabatan Fungsional



4. Peningkatan sistem akuntabilitas kinerja
5. Pengembangan budaya kerja Aparatur.
6. Pengembangan administrasi dan kearsipan yang efektif dan efisien;

1.1.2. Program : Penataan Manajemen Sumber Daya Aparatur.

Indikasi Kegiatan :

1. Menyempurnakan dan menciptakan mekanisme, standar rekrutmen aparatur, standarisasi jabatan, promosi dan mutasi yang objektif dan profesional
2. Penataan & pembinaan sumber daya aparatur sesuai dengan kewenangan dan beban kerja, kompetensi & perbaikan distribusi
3. Peningkatan disiplin aparatur
4. Meningkatkan kualitas dan kompetensi sumber daya aparatur dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawab.

1.1.3. Program : Peningkatan Kesejahteraan PNS.

Indikasi Kegiatan :

1. Peningkatkan Pendapatan PNS .
2. Fasilitasi bantuan perumahan PNS
3. Pemberdayaan lembaga ekonomi PNS
4. Peningkatan bantuan sosial PNS.



1.1.4. Program : Peningkatan Kualitas Perencanaan Daerah.

Indikasi Kegiatan :

1. Merumuskan kebijakan teknis dalam bidang perencanaan pembangunan daerah
2. Mengkoordinasikan perencanaan jangka panjang, jangka menengah, dan tahunan.
3. Mengkoordinasikan & mengintegrasikan kebijakan perencanaan di bidang perekonomian, fisik & prasarana, dan sosbud
4. Peningkatan pelaksanaan pengendalian dan Evaluasi pelaksanaan program pembangunan
5. Pemantapan proses perencanaan pembangunan dari bawah (bottom up) yang melibatkan komponen masyarakat

1.1.5. Program : Peningkatan Pengawasan dan Akuntabilitas Kinerja Aparatur.

Indikasi Kegiatan :

1. Mengembangkan tenaga aparatur pemeriksa yang profesional yang menjunjung tinggi aturan yang berlaku.
2. Peningkatan intensitas dan kualitas pengawasan, audit internal, eksternal dan kontrol publik;
3. Peningkatan tindak lanjut temuan pengawasan & penerapan *reward & punishment*.
4. Mengembangkan sistem akuntabilitas kinerja dan meningkatkan implementasinya di seluruh instansi;
5. Meningkatkan transparansi kualitas informasi hasil pengawasan, tindak lanjutnya serta dokumentasi *track record* aparatur yang akurat.
6. Melakukan peningkatan evaluasi berkala atas kinerja dan temuan hasil pengawasan



1.1.6. Program : Peningkatan Koordinasi dan Kerjasama Pembangunan.

Indikasi Kegiatan :

1. Peningkatan koordinasi bidang perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan.
2. Pengembangan kerjasama wilayah perbatasan
3. Pengembangan Kerjasama antar daerah didalam kabupaten dan dengan kabupaten tetangga.
4. Pengembangan kerjasama daerah dengan Perguruan Tinggi dan NGO.

1.1.7. Program : Pengembangan Sistem Informasi dan Komunikasi.

Indikasi Kegiatan :

1. Peningkatan pemerataan informasi pembangunan melalui media cetak dan elektronik.
2. Pembinaan dan fasilitasi media masa dalam melakukan control social dan pengawasan public
3. Pengembangan Situs dan Website daerah
4. Peningkatan kinerja kehumasan daerah
5. Penerapan pola tata kearsipan modern
6. Pembangunan Perpustakaan daerah

1.1.8. Program : Peningkatan Sarana Prasarana Kantor.

Indikasi Kegiatan :

1. Peningkatan dan rehabilitasi prasarana kantor dan rumah dinas.
2. Peningkatan mobiler kantor dan rumah dinas
3. Peningkatan sarana komunikasi dan sarana kerja kantor



4. Pengadaan sarana prasarana protokoler pemda

1.1.9. Program : Peningkatan Penunjang Operasional Aparatur.

Indikasi Kegiatan :

1. Pengadaan Mobilitas Pemda
2. Pengadaan Pakaian dinas dan atribut pemda

1.1.10. Program : Penataan Kelembagaan Nagari.

Indikasi Kegiatan :

1. Pengembangan kelembagaan nagari
2. Pengembangan administrasi dan ketatalaksanaan nagari
3. Peningkatan sarana dan prasarana pemerintahan nagari

1.1.11. Program : Peningkatan Kualitas Perangkat Nagari.

Indikasi Kegiatan :

1. Pembinaan dan Pemberdayaan perangkat nagari
2. Peningkatan kualitas perangkat Nagari
3. Peningkatan kesejahteraan perangkat nagari



1.1.12. Program : Penataan Kewenangan Pemerintahan Nagari.

Indikasi Kegiatan :

1. Peningkatan kualitas perencanaan pembangunan di tingkat nagari
2. Peningkatan kualitas perencanaan anggaran di tingkat nagari
3. Pembinaan dan penataan produk hukum di tingkat nagari

1.1.13. Program : Peningkatan Partisipasi Masyarakat.

Indikasi Kegiatan :

1. Pengembangan pola partisipatif pembangunan nagari
2. Pemberdayaan lembaga-lembaga sosial kemasyarakatan di nagari
3. Pemberdayaan lembaga-lembaga ekonomi di nagari
4. Pelaksanaan Lomba-lomba di tingkat Nagari
5. Mendorong peran serta masyarakat perantau dalam berbagai aktifitas pembangunan di nagari

1.2. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik

1.2.1. Program : Penataan Prosedur Pelayanan Publik.

Indikasi Kegiatan :

1. Penataan sistem/prosedur penyelenggaraan pelayanan publik melalui deregulasi dan debirokratisasi;
2. Optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi dalam pelayanan perizinan;
3. Mengembangkan partisipasi masyarakat dalam perumusan program dan kebijakan layanan publik.
4. Penetapan standar pelayanan minimum (SPM) untuk masing-masing bidang pelayanan publik.



1.2.2. Program : Peningkatan Kualitas Aparatur Pelayanan Publik.

Indikasi Kegiatan :

1. Peningkatan penerapan sistem meritokrasi dalam pola rekrutmen aparatur yang memberikan pelayanan publik
2. Peningkatan etos kerja aparatur pelayan publik
3. Pemberdayaan dan Pembinaan Aparatur Pelayanan Publik

1.2.3. Program : Peningkatan Pengawasan Aparatur Pelayanan Publik.

Indikasi Kegiatan :

1. Peningkatan koordinasi pembinaan dan pengawasan pelayanan publik serta pengembangan kualitas aparat pelayanan publik;
2. Membuka akses kontrol publik dan mengintensifkan penanganan pengaduan masyarakat;
3. Mengembangkan mekanisme pelaporan berkala pencapaian kinerja penyelenggaraan pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten/kota kepada publik.

1.3. Kependudukan

1.3.1. Program : Penataan Administrasi Kependudukan.

Indikasi Kegiatan :

1. Penyempurnaan sistem pendaftaran penduduk, pencatatan sipil, dan pengelolaan informasi kependudukan melalui Sistem Administrasi Kependudukan (SAK).
2. Penataan kelembagaan administrasi kependudukan yang berkelanjutan



3. Peningkatan SDM aparatur pengelola kependudukan.
4. Peningkatan partisipasi masyarakat dalam bidang administrasi informal kependudukan.

1.4. Pemberantasan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme

1.4.1. Program : Pemberantasan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.

Indikasi Kegiatan :

1. Peningkatan sistem manajemen keuangan daerah
2. Penerapan sistem & prosedur pengadaan barang dan jasa pemerintah yang transparans & akuntabel
3. Peningkatan akuntabilitas kinerja pemerintah
4. Peningkatan pengawasan dan penegakan hukum terhadap aparatur yang melanggar hukum
5. Peningkatan partisipasi masyarakat dalam pemberantasan korupsi, kolusi dan nepotisme
6. Peningkatan perbaikan kesejahteraan pegawai
7. Peningkatan koordinasi antara pemerintah daerah dengan penegak hukum dalam penanganan korupsi

1.5. Peningkatan Pengelolaan Keuangan Daerah

1.5.1. Program : Peningkatan Manajemen Pengelolaan PAD dan Penerimaan Daerah.

Indikasi Kegiatan :

1. Penyusunan potensi dan rencana tindak peningkatan penerimaan PAD
2. Penyusunan dan evaluasi perda pajak dan retribusi daerah
3. Intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan asli daerah.
4. Pengembangan lembaga penerimaan daerah sesuai dengan kebutuhan daerah



5. Optimalisasi penerimaan daerah dari pemerintah atasan

1.5.2. Program : Penataan Manajemen Aset Daerah.

Indikasi Kegiatan :

1. Pelaksanaan Inventarisasi aset daerah
2. Peningkatan Pengelolaan aset daerah

1.5.3. Program : Pengelolaan Manajemen Keuangan dan Belanja Daerah.

Indikasi Kegiatan :

1. Penyusunan produk hukum tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
2. Pemantapan perencanaan dan koordinasi penyusunan anggaran belanja daerah
3. Peningkatan kapasitas aparatur pengelolaan keuangan daerah.
4. Pelaksanaan penyusunan neraca daerah
5. Penerapan Standar Akuntansi Keuangan Daerah (SAKD) / SAP.
6. Peningkatan penata-usahaan & pengendalian keuangan daerah

1.5.4. Program : Penerapan Efisiensi Anggaran Daerah.

Indikasi Kegiatan :

1. Penyusunan Standar Biaya Aparatur, Standar Harga Barang dan Pedoman Umum Penggunaan Anggaran
2. Penyusunan standar anggaran biaya (SAB)



1.6. Pembangunan Hukum dan Perlindungan Hak Asasi Manusia (HAM)

1.6.1. Program : Peningkatan dan Penataan Produk Hukum Daerah

Indikasi Kegiatan :

1. Pembentukan dan penataan produk hukum daerah yang aspiratif dan akomodatif
2. Menyusun perencanaan produk hukum yang terpadu, aspiratif dan akomodatif
3. Pembinaan, penyusunan, dan pengawasan serta evaluasi produk hukum daerah
4. Peningkatan profesionalisme aparatur pengelola dalam penyusunan produk hukum.
5. dokumentasi dan informasi produk hukum daerah

1.6.2. Program : Peningkatan Pemahaman dan Kesadaran Hukum

Indikasi Kegiatan :

1. Pendidikan dan Sosialisasi berbagai peraturan perundang-undangan dan HAM,
2. Perwujudan perilaku dan keteladanan dari penyelenggara pemerintahan dengan segenap jajaran untuk mentaati hukum.
3. Meningkatkan ruang partisipasi masyarakat dalam pembentukan produk hukum

1.6.3. Program : Penegakan Supremasi Hukum dan Perlindungan HAM

Indikasi Kegiatan :

1. Mendorong upaya peningkatan profesionalisme dalam pelaksanaan penegakan hukum
2. Menegakan hukum secara adil, dan konsekuen, serta tidak diskriminatif,



3. Memperkuat dan melakukan konsolidasi kehidupan demokrasi, pada semua tingkatan dan institusi yang ada.

1.7. Pemberdayaan dan Pembinaan Organisasi Masyarakat dan Partai Politik

1.7.1. Program : Pemberdayaan dan Pemantapan Organisasi Masyarakat dan Partai Politik

Indikasi Kegiatan :

1. Pemberdayaan dan pembinaan organisasi masyarakat, LSM dan partai politik
2. Peningkatan koordinasi & sinerjitas antara pemerintah dengan ormasy dan parpol

1.8. Prioritas : Peningkatan Keamanan dan Ketertiban

1.8.1. Program : Peningkatan Upaya Mewujudkan Ketertiban dan Keamanan

Indikasi Kegiatan :

1. Peningkatan operasi penegakan produk hukum daerah
2. Pengamanan aset daerah
3. Peningkatan ketertiban dan keamanan masyarakat
4. Peningkatan kapasitas Pol PP

1.8.2. Program : Peningkatan dan Pemantapan Integrasi Bangsa

Indikasi Kegiatan :

1. Pemantapan wawasan dan ketahanan bangsa
2. Fasilitasi dan Operasional Tim KOMINDA



3. Pemantapan komunikasi dan konsolidasi pembauran bangsa bagi generasi muda

2. Agenda : Membangun Masyarakat yang Produktif dan memiliki ekonomi yang tangguh.

2.1. Prioritas : Revitalisasi Pertanian dan Pengembangan Agroindustri

2.1.1. Program : Peningkatan Ketahanan Pangan

Indikasi Kegiatan :

1. Pengembangan kelembagaan ketahanan pangan tingkat kabupaten dan nagari yang mempunyai fungsi penyediaan dan pengelolaan cadangan, penanganan kondisi rawan pangan, dan perdagangan bahan pangan.
2. Peningkatan distribusi pangan yang menjamin keterjangkauan masyarakat atas pangan.
3. Pengamanan ketersediaan pangan melalui pengendalian hama penyakit, pengamanan lahan sawah di daerah irigasi, peningkatan mutu intensifikasi serta optimalisasi dan perluasan areal pertanian.
4. Peningkatan paska panen dan pengolahan hasil untuk menurunkan kehilangan hasil (looses).
5. Peningkatan kesadaran masyarakat akan perlunya konsumsi pangan dan protein yang cukup untuk hidup sehat dan aktif.
6. Pencegahan dan penanggulangan masalah pangan melalui peningkatan bantuan pangan kepada keluarga miskin dan rawan pangan.
7. Diversifikasi pangan melalui peningkatan ketersediaan pangan hewani, buah dan sayuran, rekayasa sosial pola konsumsi masyarakat.



2.1.2. Program : Revitalisasi Kelembagaan dan Sistem Penyuluhan Pertanian

Indikasi Kegiatan :

1. Revitalisasi sistem penyuluhan berkaitan dengan produksi pangan, perkebunan, peternakan dan perikanan, termasuk peningkatan kapasitas petani, penyuluh dan aparat pembina
2. Pengembangan sistem transfer teknologi (penyuluhan pertanian) yang bersifat demand-driven dan kompetitif untuk mendukung upaya perluasan basis produksi pertanian segar dan bahan baku agroindustri.
3. Penumbuhan dan penguatan lembaga pertanian ditingkat nagari/ jorong untuk meningkatkan posisi tawar petani.
4. Pendidikan dan pelatihan sumber daya manusia pertanian

2.1.3. Program : Pengembangan Agribisnis dan Kawasan Sentra Produksi

Indikasi Kegiatan :

1. Pengembangan kawasan penghasil dan peningkatan produksi produk segar/bahan baku pertanian.
2. Peningkatan nilai tambah produk pertanian melalui peningkatan paska panen, mutu, pengolahan hasil dan pemasaran.
3. Peningkatan mutu perbenihan/ perbibitan pertanian yang bersertifikasi.
4. Peningkatan investasi dan pengembangan industri pendukung (industri penghasil bahan packing, peralatan, mesin, dll)
5. Pembangunan infrastruktur irigasi, jalan usaha tani, pasar produk pertanian, telekomunikasi, dll yang diperlukan untuk mendukung pengembangan kawasan/wilayah sentra produksi dan cluster agroindustri.



6. Pengembangan diversifikasi usaha tani, melalui pengembangan usaha tani dengan komoditas bernilai tinggi.
7. Pengembangan lembaga keuangan dan sumber daya produktif yang dapat memberikan dukungan permodalan bagi pelaku usaha agroindustri pedesaan.

2.1.4. Program : Pengembangan Kemitraan Pertanian

Indikasi Kegiatan :

1. Membuat produk hukum yang akan menjadi dasar pelaksanaan model kemitraan dalam optimalisasi pemanfaatan potensi pertumbuhan di sektor pertanian.
2. Pengembangan kerjasama/kemitraan yang saling menguntungkan antara pelaku UMK pertanian dan swasta.

2.1.5. Program : Pengembangan Usaha Pertanian Ramah Lingkungan

Indikasi Kegiatan :

1. Pengembangan usaha pertanian ramah lingkungan untuk menghasilkan produk pertanian bebas pestisida
2. Pengelolaan sumber daya lahan dan air secara terintegrasi dan berkelanjutan.

2.2. Pengembangan Industri

2.2.1. Program : Pengembangan Industri Kecil / Rumah Tangga.

Indikasi Kegiatan :

1. Meningkatkan penggunaan teknologi tepat guna untuk memacu tingkat produksi industri agar beroperasi dengan lebih efisien dan menghasilkan produk yang bermutu.



2. Peningkatan daya saing industri sehingga akan mampu menghasilkan produk yang berkualitas tinggi dengan harga jual yang relatif murah.
3. Peningkatan intervensi langsung dan layanan publik terhadap masyarakat pelaku industri dalam rangka pemecahan permasalahan-permasalahan yang muncul dalam kegiatan produksi
4. Peningkatan teknologi untuk melakukan desain produk dan kemasan produk industri.
5. Pengembangan industri pertanian, dan perkebunan yang dilengkapi dengan berbagai prasarana yang dibutuhkan oleh pelaku industri.

2.3. Pengembangan Kelembagaan Ekonomi

2.3.1. Program : Penataan Sistem dan Kelembagaan Usaha.

Indikasi Kegiatan :

1. Regulasi peraturan-peraturan yang menghambat perkembangan pelaku usaha
2. Pembuatan sistem pembinaan yang dituangkan dalam bentuk Peraturan Daerah atau Peraturan Bupati.
3. Pembinaan dan fasilitasi tumbuhnya kelompok usaha atau asosiasi yang dapat meningkatkan akses pasar
4. Mendorong berdirinya lembaga keuangan pedesaan seperti Usaha Simpan Pinjam, Badan Kredit Pedesaan, Bank Perkreditan Rakyat dan lain sebagainya

2.3.2. Program : Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif.

Indikasi Kegiatan :

1. Pemasyarakatan kewirausahaan dan fasilitasi serta pemberian dukungan serta kemudahan terhadap pelaku usaha/ wirausaha baru.



2. Pelatihan, bimbingan magang, pembinaan lapangan terhadap aparat pembina dan pelaku usaha.
3. Pembinaan dan fasilitasi tumbuhnya kelompok-kelompok usaha yang tangguh dalam kegiatan produksi (kelompok tani, kelompok industri kecil dan kerajinan, dll).

2.3.3. Program : Pemberdayaan Usaha Kecil, Menengah dan Koperasi.

Indikasi Kegiatan :

1. Penyediaan kemudahan perizinan dan pembinaan.
2. Penyediaan skim-skim pembiayaan alternatif seperti sistim bagi hasil dana bergulir, sistim tanggung renteng, dll.
3. Penyelenggaraan pelatihan kewirausahaan dan bimbingan teknis manajemen usaha
4. Penyediaan infrastruktur dan jaringan pendukung usaha serta kemitraan usaha
5. Peningkatan Administrasi dan Pengawasan Badan Hukum

2.4. Peningkatan Investasi dan Pengembangan Kerjasama Antar Daerah

2.4.1. Program : Peningkatan Iklim Investasi.

Indikasi Kegiatan :

1. Pembuatan Peraturan Daerah yang mampu mendorong perkembangan dan peningkatan investasi di daerah.
2. Penyederhanaan prosedur pelayanan penanaman modal dan pemberian insentif yang menarik bagi penanaman modal,
3. Koordinasi perencanaan investasi dengan daerah kabupaten tetangga.
4. Pengawasan (pemantauan, dan evaluasi) dan pengendalian pelaksanaan investasi baik PMA maupun PMDN,



5. Pemantapan kelembagaan penanaman modal dan pengembangan sistim informasi investasi.
6. Penyusunan profil investasi daerah menurut potensi sumber daya untuk menentukan peluang dan prioritas investasi di daerah Kabupaten Dharmasraya.

2.4.2. Program : Peningkatan Kerjasama Investasi / Penanaman Modal.

Indikasi Kegiatan :

1. Penyiapan sarana dan prasarana daerah untuk mendorong investasi,
2. Fasilitasi kerjasama strategis antara perusahaan besar (PMA & PMDN) dengan UKMK,
3. Mendorong peningkatan koordinasi dan kerjasama antara instansi pemerintah dengan dunia usaha dalam upaya peningkatan investasi di daerah.
4. Penataan Pola Kerjasama Investasi yang produktif.
5. Pengembangan kerjasama investasi antara perusahaan yang berlokasi di perkotaan dengan usaha yang ada di pedesaan/kenagarian,

2.5. Pengembangan Infrastruktur Transportasi

2.5.1. Program : Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan dan Jembatan.

Indikasi Kegiatan :

1. Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rutin Jalan kabupaten
2. Rehabilitasi dan Pemeliharaan Periodik Jalan Kabupaten
3. Pengadaan alat-alat berat pemelihara jalan



2.5.2. Program : Peningkatan dan Pembangunan Jalan dan Jembatan.

Indikasi Kegiatan :

1. Peningkatan dan Pembangunan Ruas Jalan dan Jembatan Kabupaten
2. Pembangunan Peningkatan ruas jalan terutama ke daerah terpencil
3. Peningkatan peran swasta di dalam penyediaan sarana dan prasarana transportasi

2.5.3. Program : Pembangunan dan Peningkatan Prasarana Lalu Lintas Jalan Raya.

Indikasi Kegiatan :

1. Peningkatan sarana prasarana penunjang pengamanan lalu lintas
2. Pembangunan Terminal
3. Peningkatan profesionalisme petugas pengatur lalu lintas
4. Pengembangan Master Plan sistem dan jaringan transportasi.

2.6. Pembangunan Sumber Daya Air

2.6.1. Program : Pengembangan Pengelolaan Sumber Air Baku.

Indikasi Kegiatan :

1. Penatagunaan sumber daya air.
2. Penyelenggaraan konservasi air tanah pada wilayah kritis air.
3. Pembangunan waduk, embung dan sarana penampung air lainnya.
4. Penyediaan, pengelolaan dan perlindungan sumber-sumber air baku;



2.6.2. Program : Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi.

Indikasi Kegiatan :

1. Pemeliharaan dan Peningkatan jaringan Irigasi
2. Pembangunan baru Irigasi
3. Optimalisasi pemanfaatan lahan irigasi yang telah dikembangkan.
4. Pemberdayaan Petani Pemakai Air

2.6.3. Program : Pengendalian Banjir dan Pengamanan Sungai.

Indikasi Kegiatan :

1. Pemeliharaan dan perbaikan alur sungai
2. Pembangunan prasarana pengendali banjir dan pengamanan sungai terutama pada daerah rawan banjir
3. Melaksanakan reboisasi sepanjang daerah aliran sungai yang rawan banjir

2.7. Pengembangan BUMD

2.7.1. Program : Pengembangan BUMD.

Indikasi Kegiatan :

1. Pendirian Perusahaan Daerah dalam upaya meningkatkan PAD.
2. Peningkatan peranan BUMD / Perusahaan Daerah dalam mendorong perekonomian masyarakat, terutama pengusaha kecil, menengah, dan koperasi (corporate social responsibility).



3. Peningkatan efisiensi dan efektivitas organisasi dan manajemen perusahaan daerah, serta membangun praktek yang sehat dalam pengelolaan perusahaan.

2.8. Pembangunan Ketenaga Kerjaan.

2.8.1. Program : Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja.

Indikasi Kegiatan :

1. Peningkatan kualitas pendidikan menengah, terutama pendidikan menengah kejuruan yang sesuai dengan kebutuhan pasar kerja;
2. Pengembangan standar kompetensi kerja dan sistem sertifikasi kompetensi tenaga kerja;
3. Penguatan satuan pendidikan non formal yang meliputi lembaga kursus, pusat kegiatan belajar masyarakat dan satuan pendidikan yang sejenis;
4. Peningkatan profesionalisme tenaga pelatih dan instruktur latihan kerja;
5. Penyusunan standar latihan; dan
6. Peningkatan sarana dan prasarana latihan kerja.

2.8.2. Program : Perluasan dan Pengembangan Kesempatan Kerja.

Indikasi Kegiatan :

1. Penyusunan dan penyempurnaan peraturan ketenagakerjaan;
2. Peningkatan pembinaan dan pengawasan tenaga kerja;
3. Penyusunan data tenaga kerja dan informasi pasar kerja; dan



4. Pengembangan manajemen usaha mandiri dan produktivitas kerja.

2.8.3. Program : Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Tenaga Kerja.

Indikasi Kegiatan :

1. perlindungan dan penyelesaian perselisihan ketenagakerjaan,
2. Pembentukan dan pengoptimalan fungsi lembaga tenaga kerja;
3. Peningkatan sosialisasi hubungan industrial yang harmonis dan berkeadilan; dan
4. Peningkatan penegakan hukum, standar upah, dan kesejahteraan serta perlindungan tenaga kerja.

2.9. Pembangunan Pertambangan dan Energi.

2.9.1. Program : Pengelolaan dan Pengendalian Usaha Pertambangan.

Indikasi Kegiatan :

1. Penyusunan regulasi, pedoman teknis, dan standar pertambangan mineral dan batubara.
2. Pembinaan dan pengawasan kegiatan penambangan.
3. Pengawasan produksi, pemasaran dan pengelolaan mineral dan batubara.
4. Evaluasi perencanaan produksi dan pemasaran mineral dan batubara, serta program pengembangan masyarakat di wilayah pertambangan.
5. Pembinaan, evaluasi, pengawasan dan penertiban pertambangan rakyat yang berpotensi mencemari lingkungan, termasuk PETI.



6. Pemulihan lingkungan pasca tambang dan penerapan kebijakan produksi dan pengelolaan pasca tambang yang berwawasan lingkungan.
7. Penyelidikan umum potensi pertambangan serta pemetaan geologi dan geohidrologi

2.9.2. Program : Pengembangan Energi dan Ketenagalistrikan.

Indikasi Kegiatan :

1. Perluasan cakupan pelayanan energi listrik
2. Pengendalian pengembangan jaringan distribusi listrik.
3. Peningkatan Pengelolaan Usaha Ketenagalistrikan dan Air Bawah Tanah
4. Pembangunan Jaringan Listrik di perdesaan yang tidak terjangkau listrik PLN
5. Koordinasi Penanggulangan penyalahgunaan BBM dan kerusakan instalasi listrik PLN
6. Inventarisasi dan pemetaan sumber ketenagalistrikan dan air tanah
7. Pengembangan penggunaan energi alternatif sebagai energi tepat guna

2.10. Pengembangan Pariwisata

2.10.1. Program : Pengembangan Pariwisata.

Indikasi Kegiatan :

1. Pengembangan Rencana Induk Pengembangan Pariwisata
2. Pembangunan dan Pengembangan Objek Wisata,
3. Pembangunan Sarana dan prasarana penunjang wisata



4. Pengembangan iven-iven pariwisata.
5. Pembangunan masyarakat sadar wisata.
6. Pengembangan sistem informasi kepariwisataan yang efisien dan efektif.
7. Mendorong pertumbuhan dan perkembangan investasi dalam industri pariwisata.
8. Peningkatan kemampuan aparatur pengelola pariwisata.

2.11. Prioritas : Pengelolaan Sumberdaya Alam

2.11.1. Program : Pemantapan Pemanfaatan Potensi Sumber Daya Alam.

Bertujuan untuk merespon perubahan lingkungan pengelolaan (baik internal maupun eksternal) sehingga peningkatan permintaan dapat dipenuhi dan kondisi sumberdaya alam terjaga pada kondisi yang dapat memberikan manfaat dalam jangka panjang.

Indikasi Kegiatan :

1. Penatagunaan hutan dan pengendalian alih fungsi dan status kawasan hutan.
2. Pengembangan hutan kemasyarakatan dan usaha perhutanan rakyat.
3. Pengembangan hasil hutan non kayu dan jasa lingkungan
4. Penetapan kawasan hutan dan kesatuan pengelolaan hutan
5. Pembinaan kelembagaan hutan produksi
6. Konservasi sumber daya hutan
7. Penerapan model pengelolaan sumberdaya alam terpadu (*integrated natural resources management*) dengan menetapkan unit kesatuan sumberdaya alam (seperti daerah aliran sungai/DAS sebagai basis pengelolaan dan pengembangan kelembagaan pendukung.



8. Pengembangan produk hukum untuk memberi basis bagi pelaksanaan sistem pengelolaan sumberdaya alam terpadu dengan partisipasi masyarakat.
9. Peningkatan kapasitas kelembagaan dan personil untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi-fungsi pengelolaan.

2.11.2. Program : Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam.

Bertujuan untuk merehabilitasi sumberdaya alam yang rusak dan mengelola kawasan yang sudah ditetapkan peruntukannya sebagai kawasan konservasi sehingga kondisi dan fungsinya sebagai penyangga kehidupan dapat dipertahankan.

Indikasi Kegiatan :

1. Pengkajian dan perumusan model pengelolaan terpadu sumberdaya alam sesuai dengan kondisi fisik dan sosial budaya masyarakat.
2. Perlindungan sumber daya alam dari pemanfaatan yang eksploitatif dan tidak terkendali terutama di kawasan konservasi dan kawasan yang rentan terhadap kerusakan.
3. Pengembangan koordinasi pengelolaan DAS terpadu.
4. Pengembangan kemitraan dengan Perguruan Tinggi, masyarakat setempat, LSM, Legislatif dan dunia usaha dalam perlindungan dan pelestarian sumber daya alam.
5. Peningkatan pemberdayaan masyarakat dan dunia usaha dalam perlindungan SDA.

2.11.3. Program : Rehabilitasi dan Pemulihan Cadangan Sumber Daya Alam.

Indikasi Kegiatan :



1. Penetapan wilayah prioritas rehabilitasi hutan dan lahan
2. Peningkatan kapasitas kelembagaan, sarana dan prasarana rehabilitasi hutan dan lahan.
3. Peningkatan efektivitas reboisasi yang dilaksanakan secara terpadu
4. Pengkayaan atau restocking sumber daya pertanian dan perikanan.
5. Rehabilitasi daerah hulu untuk menjamin pasokan air irigasi pertanian dan mencegah terjadinya erosi dan sedimentasi di wilayah sungai.

2.11.4. Program : Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi SDA dan Lingkungan Hidup.

Indikasi Kegiatan :

1. Penyusunan data sumber daya alam baik data potensi maupun data daya dukung kawasan ekosistem.
2. Penyusunan neraca sumber daya alam dan neraca lingkungan hidup.
3. Penyusunan data potensi sumber daya hutan dan neraca sumber daya hutan.
4. Pendataan dan penyelesaian tata batas hutan dan kawasan perbatasan dengan daerah tetangga.

2.11.5. Program : Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup.

Indikasi Kegiatan :

1. Pemantauan kualitas air tanah dan air permukaan terutama pada daerah pemukiman, kawasan industri.
2. Pengawasan penataan baku mutu air limbah, emisi gas buang dan pengelolaan limbah B3 (Bahan Berbahaya Beracun) dari sumber institusi dan non institusi.
3. Pembangunan/ peningkatan sarana prasarana labor lingkungan



4. Penyusunan regulasi dalam pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup, pedoman teknis, baku mutu lingkungan hidup
5. Penyelesaian kasus pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup.
6. Pengembangan penggunaan teknologi ramah lingkungan dalam pengelolaan SDA, limbah dan teknologi industri.
7. Peningkatan produksi dan penggunaan pupuk kompos
8. Peningkatan peran masyarakat dan sektor informal dalam upaya pengendalian pencemaran dan kerusakan LH
9. Peningkatan pengelolaan dan sarana prasarana persampahan.

2.12. Penanggulangan Bencana Alam

2.12.1. Program : Mitigasi Penanggulangan Bencana Alam

Bertujuan untuk menangani dampak yang ditimbulkan oleh bencana.

Indikasi Kegiatan :

1. Penyiapan sistem informasi dan peta daerah rawan bencana alam.
2. Penyiapan kelembagaan/satuan pelaksana penanganan bencana alam.
3. Penyediaan peralatan pendukung mitigasi dan penanganan bencana alam.
4. Peningkatan kapasitas personil dan lembaga untuk penanganan kondisi bencana alam.
5. Pemberdayaan masyarakat yang bermukim di kawasan rawan bencana;



6. Meningkatkan pengetahuan dan pemahaman masyarakat tentang pencegahan dan penanggulangan bencana
7. Pengendalian banjir dan pengamanan sungai;
8. Peningkatan penanganan pasca bencana.

2.13. Penataan Ruang dan Pertanahan

2.13.1. Program : Penataan Ruang.

Program ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas rencana tata ruang daerah sehingga tersedianya rencana tata ruang yang legitimasi, terukur, berkualitas yang dilakukan secara transparan dan partisipatif..

Indikasi Kegiatan :

1. Penyusunan rencana tata ruang yang memperhatikan ketentuan perundangan, Norma Standar Pedoman dan Manual, dan melihat keterpaduan antar wilayah secara fungsional.
2. Pelaksanaan sosialisasi Rencana Tata Ruang secara komprehensif kepada masyarakat untuk menciptakan penyamaan persepsi dalam mengimplementasikannya.
3. Penetapan rencana tata ruang wilayah kabupaten yang memperjelas status peruntukan sehingga pengelolaan untuk masing-masing peruntukan dapat dilakukan dengan efektif, efisien dan berkeadilan.
4. Menyediakan rencana tata ruang yang lebih terinci pada kawasan fungsional seperti kawasan pariwisata, kawasan wilayah tertinggal, kawasan cepat tumbuh, kawasan andalan, kawasan pertambangan, kawasan perbatasan dan kawasan lainnya.



5. Memberikan penyuluhan dan sosialisasi secara intensif kepada masyarakat tentang pentingnya tata ruang untuk selalu dipedomani dalam berbagai kegiatan pembangunan yang dilakukan.
6. Pengendalian pemanfaatan ruang untuk menjamin kesesuaian rencana dengan pelaksanaan, penerapan prinsip pembangunan berkelanjutan, dan peningkatan keseimbangan pembangunan antar fungsi melalui peningkatan fungsi koordinasi BKPRD di Kabupaten

2.13.2. Program : Pengelolaan Pertanahan

Indikasi Kegiatan :

1. Pembangunan sistem pendaftaran tanah yang efisien dan transparan
2. Penataan penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah yang berkeadilan, berkelanjutan dan menjunjung supremasi hukum dengan mengacu kepada rencana tata ruang wilayah dan kepentingan rakyat.
3. Peningkatan kualitas dan kapasitas kelembagaan dan SDM pertanahan.
4. Penegakan hukum pertanahan yang adil dan transparan untuk meningkatkan kepastian hukum hak atas tanah kepada masyarakat
5. Pengembangan sistem informasi pertanahan yang handal dalam rangka peningkatan koordinasi, pelayanan dan pengelolaan pertanahan.

2.14. Prasarana Perumahan dan Permukiman

2.14.1. Program : Pembangunan Perumahan dan Pemberdayaan Komunitas Perumahan.

Indikasi Kegiatan :



1. Penyediaan prasarana dan sarana dasar bagi kawasan rumah sederhana sehat, termasuk perumahan PNS, TNI/ Polri dan masyarakat berpendapatan rendah
2. Pembangunan rumah baru layak huni bagi masyarakat miskin yang belum memiliki rumah.
3. Pengembangan pola subsidi yang tepat sasaran, efisien dan efektif dalam pembangunan rumah sederhana sehat.
4. Fasilitasi dan stimulasi pembangunan perumahan swadaya yang berbasis pemberdayaan masyarakat
5. Fasilitasi dan bantuan teknis perbaikan rumah pada kawasan kumuh, desa tradisional dan desa eks transmigrasi.
6. Peningkatan kualitas lingkungan pada kawasan kumuh, desa tradisional dan desa eks transmigrasi.
7. Pengembangan dan peningkatan pemukiman dan sarana prasarana pendukung transmigrasi

2.14.2. Program : Pembangunan Air Minum dan Pengelolaan Limbah

Indikasi Kegiatan :

1. Penyiapan dan pengembangan sistem dan kelembagaan pengelolaan Air Minum dan pengelolaan limbah
2. Pengembangan sistem pelayanan air minum dan air limbah;
3. Penyediaan fasilitas dan jaringan air bersih yang memadai, baik dari segi kualitas maupun kuantitas dan terdistribusi secara merata,
4. Pengadaan sarana prasarana pengelolaan limbah rumah tangga.
5. Peningkatan kampanye publik, mediasi, dan fasilitasi kepada masyarakat mengenai perlunya perilaku hidup bersih dan sehat
6. Peningkatan peran sekolah dalam mendukung perilaku hidup bersih dan sehat



7. Pengembangan peran masyarakat dalam menjaga kelestarian sumber air baku

2.14.3. Program : Pembangunan Persampahan dan Drainase

Indikasi Kegiatan :

1. Pengembangan master plan sistem drainase dan persampahan kabupaten
2. Peningkatan kesadaran masyarakat dan stake holders terhadap pentingnya pelayanan persampahan dan drainase.
3. Pembangunan sarana prasarana pengelolaan persampahan
4. Pembangunan jaringan drainase primer dan sekunder, peningkatan dan normalisasi saluran drainase.
5. Pengembangan teknologi tepat guna bidang persampahan dan drainase.
6. Penyiapan dan pengembangan sistem dan kelembagaan pengelolaan Persampahan dan Drainase
7. Pengembangan SDM pengelola persampahan dan drainase.

3. Agenda : Membangun Sumberdaya Manusia Berkualitas.

3.1. Pemerataan dan Peningkatan Kualitas Pendidikan

3.1.1. Program : Pendidikan Anak Usia Dini.

Indikasi Kegiatan :

1. Penyediaan sarana prasarana pendidikan dan optimalisasi sarana yang ada
2. Dukungan penyelenggaraan pendidikan seperti pendidik dan tenaga kependidikan, biaya operasional



3. Penumbuhan partisipasi masyarakat untuk penyelenggaraan pendidikan anak usia dini.

3.1.2. Program : Wajib Belajar Pendidikan Sembilan Tahun.

Indikasi Kegiatan :

1. Penyediaan sarana dan prasarana pendidikan yang berkualitas (USB, RKB, Laboratorium, Perpustakaan, Buku Pelajaran dan peralatan peraga pendidikan).
2. Rehabilitasi dan revitalisasi sarana dan prasarana pendidikan yang rusak.
3. Penyediaan tenaga pendidik dan kependidikan secara lebih merata, bermutu, tepat lokasi terutama untuk daerah terpencil
4. Penyediaan dukungan biaya operasional pendidikan
5. Penyediaan alternatif layanan pendidikan dasar baik jalur formal maupun non formal untuk memenuhi kebutuhan, kondisi dan potensi anak termasuk anak dari keluarga miskin dan anak yang memiliki potensi kecerdasan dan bakat istimewa.
6. Peningkatan upaya penarikan kembali siswa putus sekolah yang tidak melanjutkan dan menurunkan angka putus sekolah
7. Menyediakan bantuan beasiswa bagi peserta didik berprestasi dan dari keluarga yang tidak mampu
8. Pengembangan kurikulum nasional dan lokal yang disesuaikan dengan perkembangan iptek, budaya dan seni termasuk pendidikan kecakapan hidup.
9. Pembinaan minat, bakat dan kreatifitas peserta didik.
10. Penerapan manajemen pendidikan berbasis sekolah yang berorientasi mutu;



11. Penyediaan informasi pendidikan yang memadai
12. Peningkatan partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan
13. Pengembangan sistem evaluasi pendidikan yang akuntabel dan transparan bagi lembaga pendidikan dan peserta didik.

3.1.3. Program : Pendidikan Menengah.

Indikasi Kegiatan :

1. Penyediaan sarana dan prasarana pendidikan yang berkualitas (USB, RKB, Laboratorium, Perpustakaan, Buku Pelajaran dan peralatan peraga pendidikan).
2. Rehabilitasi dan revitalisasi sarana dan prasarana pendidikan yang rusak.
3. Penyediaan tenaga pendidik dan kependidikan secara lebih merata, bermutu, dan tepat lokasi.
4. Penyediaan dukungan biaya operasional pendidikan
5. Penyediaan alternatif layanan pendidikan menengah baik jalur formal maupun non formal untuk menampung kebutuhan penduduk miskin dan yang tinggal diwilayah terpencil.
6. Penataan bidang keahlian pada pendidikan menengah kejuruan yang disesuaikan dengan kebutuhan lapangan kerja, yang didukung dengan peningkatan kerjasama dengan dunia usaha dan dunia industri.
7. Menyediakan bantuan beasiswa bagi peserta didik berprestasi dan dari keluarga yang tidak mampu.
8. Pengembangan kurikulum nasional dan lokal, bahan ajar dan model pembelajaran yang mengacu standar nasional yang disesuaikan dengan perkembangan iptek, budaya dan seni termasuk pendidikan kecakapan hidup.
9. Pembinaan minat, bakat dan kreatifitas peserta didik.



10. Penerapan manajemen berbasis sekolah
11. Penyediaan informasi pendidikan yang memadai
12. Peningkatan partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan
13. Pengembangan sistem evaluasi pendidikan yang akuntabel dan transparan bagi lembaga pendidikan dan peserta didik.

3.1.4. Program : Pendidikan Non Formal.

Indikasi Kegiatan :

1. Peningkatan intensifikasi perluasan akses dan kualitas penyelenggaraan pendidikan keaksaraan fungsional bagi penduduk butu aksara
2. Penguatan satuan-satuan pendidikan non formal meliputi lembaga kursus, kelompok belajar, pusat kegiatan belajar masyarakat, dll
3. Penyediaan sarana prasarana pendidikan serta pendidik dan tenaga kependidikan
4. Pengembangan kurikulum, bahan ajar dan model pembelajaran pendidikan non formal yang mengacu pada standar nasional.

3.1.5. Program : Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan.

Indikasi Kegiatan :

1. Peningkatan rasio pelayanan pendidik dan tenaga kependidikan
2. Peningkatan kualitas layanan pendidik melalui diklat untuk memiliki kualifikasi minimum dan sertifikasi.
3. Peningkatan kesejahteraan dan perlindungan hukum bagi pendidik dan tenaga kependidikan



3.1.6. Program : Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan.

Indikasi Kegiatan :

1. Membangun dan meningkatkan kualitas layanan perpustakaan daerah
2. Mendorong tumbuhnya perpustakaan masyarakat
3. Peningkatan penggunaan teknologi informasi dan komunikasi untuk memperluas akses masyarakat terhadap bahan bacaan yang bermutu secara tepat waktu.
4. Peningkatan intensitas pelaksanaan kampanye dan promosi budaya baca.

3.2. Prioritas : Pemerataan dan Peningkatan Kualitas Pelayanan Kesehatan

3.2.1. Program : Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat.

Program ini ditujukan untuk memberdayakan individu, keluarga, dan masyarakat agar mampu menumbuhkan perilaku hidup sehat dan mengembangkan upaya kesehatan bersumber masyarakat.

Indikasi Kegiatan :

1. Pemantapan media promosi kesehatan dan teknologi komunikasi, informasi, dan edukasi (KIE)
2. pemantapan upaya kesehatan bersumber masyarakat (seperti Posyandu, pondok bersalin desa, dan UKS) dan generasi muda; dan
3. Meningkatkan pendidikan kesehatan masyarakat.



3.2.2. Program : Pengembangan Lingkungan Sehat

Program ini ditujukan untuk mewujudkan mutu lingkungan hidup yang lebih sehat melalui pengembangan sistem kesehatan kewilayahan untuk menggerakkan pembangunan lintas-sektor berwawasan kesehatan.

Indikasi Kegiatan :

- a. Penyediaan sarana air bersih dan sanitasi dasar
- b. Pemeliharaan dan pengawasan kualitas lingkungan
- c. Peningkatan kewaspadaan dini dalam penanggulangan KLB
- d. Pengendalian dampak resiko pencemaran lingkungan
- e. Pemantapan model kesehatan lingkungan kabupaten sehat

3.2.3. Program : Upaya Kesehatan Masyarakat

Program ini ditujukan untuk meningkatkan jumlah, pemerataan, dan kualitas pelayanan kesehatan melalui puskesmas dan jaringannya meliputi puskesmas pembantu, puskesmas keliling dan bidan di desa.

Indikasi Kegiatan :

1. Pelayanan kesehatan penduduk miskin di puskesmas dan jaringannya
2. Pengadaan, peningkatan, dan perbaikan sarana dan prasarana puskesmas dan jaringannya
3. Pemantapan UKBK bagi kelompok potensial, Bintek dan evaluasi pelayanan kesehatan



4. Penyediaan bantuan/dukungan pada puskesmas berupa peralatan dan perbekalan kesehatan termasuk obat generik esensial serta biaya operasional dan pemeliharaan.
5. Pembinaan pemberdayaan kesehatan masyarakat
6. Peningkatan pelayanan kesehatan dasar yang mencakup sekurang-kurangnya promosi kesehatan, kesehatan ibu dan anak, keluarga berencana, perbaikan gizi, kesehatan lingkungan, pemberantasan penyakit menular, dan pengobatan dasar

3.2.4. Program : Pelayanan Kesehatan Perorangan

Program ini ditujukan untuk meningkatkan akses, keterjangkauan dan kualitas pelayanan kesehatan perorangan.

Indikasi Kegiatan :

1. Pembangunan sarana dan prasarana rumah sakit.
2. Perbaikan sarana dan prasarana rumah sakit
3. Pengadaan obat dan perbekalan rumah sakit
4. Pemantapan pelayanan kesehatan rujukan
5. Pelayanan kesehatan bagi penduduk miskin di kelas III rumah sakit.
6. Melakukan advokasi dan sosialisasi kebijakan upaya kesehatan perorangan
7. Melakukan kajian dan monev terhadap kegiatan kesehatan perorangan
8. Penyediaan biaya operasional dan pemeliharaan
9. Peningkatan peran serta sektor swasta dalam upaya kesehatan perorangan



3.2.5. Program : Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit

Program ini ditujukan untuk menurunkan angka kesakitan, kematian, dan kecacatan akibat penyakit menular dan penyakit tidak menular. Prioritas penyakit menular yang akan ditanggulangi adalah malaria, demam berdarah, diare, folio, tuberkulosis paru, HIV/AIDS, dan penyakit yang bisa dicegah dengan imunisasi. Prioritas penyakit tidak menular yang ditanggulangi adalah penyakit jantung dan gangguan sirkulasi, diabetes melitus, dan kanker.

Indikasi Kegiatan :

1. Pencegahan dan penanggulangan faktor risiko
2. Peningkatan mutu dan pelayanan imunisasi
3. Penemuan dan tata laksana penderita
4. Peningkatan surveilans epidemiologi dan penanggulangan wabah
5. Peningkatan komunikasi, informasi dan edukasi pencegahan dan pemberantasan penyakit

3.2.6. Program : Perbaikan Gizi Masyarakat

Program ini ditujukan untuk meningkatkan kesadaran gizi keluarga dalam upaya meningkatkan status gizi masyarakat terutama pada ibu hamil, bayi, dan anak balita.

Indikasi Kegiatan :

1. Peningkatan SDM pengelola program gizi masyarakat
2. Penanggulangan kurang energi protein (KEP), anemia gizi besi, gangguan akibat kurang yodium (GAKY), kurang vitamin A, dan kekurangan zat gizi mikro lainnya
3. Penanggulangan gizi lebih



4. Peningkatan surveilens gizi
5. Pemberdayaan masyarakat untuk pencapaian keluarga sadar gizi
6. Pengadaan obat program gizi masyarakat
7. Peningkatan peranserta kelompok potensial dalam meningkatkan status gizi masyarakat

3.2.7. Program : Peningkatan Sumber Daya Kesehatan

Program ini ditujukan untuk meningkatkan jumlah, mutu dan penyebaran tenaga kesehatan, sesuai dengan kebutuhan pembangunan kesehatan.

Indikasi Kegiatan :

1. Perencanaan kebutuhan tenaga kesehatan
2. Peningkatan keterampilan dan profesionalisme tenaga kesehatan melalui pendidikan dan pelatihan tenaga kesehatan
3. Pemenuhan kebutuhan tenaga kesehatan, terutama untuk pelayanan kesehatan di puskesmas dan jaringannya, serta rumah sakit kabupaten
4. Pembinaan tenaga kesehatan termasuk pengembangan karir tenaga kesehatan
5. Penyusunan standar kompetensi dan regulasi profesi kesehatan
6. Pemerataan penempatan tenaga kesehatan

3.2.8. Program : Obat dan Pembekalan Kesehatan

Program ini ditujukan untuk menjamin ketersediaan, pemerataan, mutu, keterjangkauan obat dan perbekalan kesehatan termasuk obat tradisional, perbekalan kesehatan rumah tangga, dan kosmetika.



Indikasi Kegiatan :

1. Penyediaan obat sangat esensial dan *butter stock*
2. Peningkatan kemampuan dan manajemen obat publik pada sarana pelayanan kesehatan dasar, sarana farmasi dan kesehatan lingkungan
3. Pembinaan dan pengendalian alat kesehatan dan perbekalan rumah tangga (PKRT)
4. Peningkatan keterjangkauan harga obat dan perbekalan kesehatan terutama untuk penduduk miskin
5. Peningkatan mutu pelayanan farmasi komunitas dan rumah sakit
6. Peningkatan kemampuan dan pemahaman masyarakat tentang bahaya penyalah-gunaan narkoba

3.2.9. Program : Pengawasan Obat dan Makanan

Program ini ditujukan agar terjaminnya persyaratan mutu, keamanan dan kemanfaatan/ khasiat produk terapeutik/ obat, perbekalan kesehatan rumah tangga, obat tradisional, kosmetika, produk komplemen dan produk pangan dalam rangka perlindungan konsumen/ masyarakat.

Indikasi Kegiatan :

- a. Peningkatan pengawasan keamanan pangan dan bahan berbahaya.
- b. Peningkatan pengawasan penyalahgunaan narkotika, psikotropika, zat adiktif (NAFZA)
- c. Peningkatan pengawasan mutu, khasiat dan keamanan produk terapeutik/ obat, perbekalan kesehatan rumah tangga, obat tradisional, suplemen makanan dan produk kosmetika.

3.2.10. Program : Kebijakan dan Manajemen Pembangunan Kesehatan



Program ini ditujukan untuk mengembangkan kebijakan dan manajemen pembangunan kesehatan guna mendukung penyelenggaraan sistem kesehatan.

Indikasi Kegiatan :

1. Penyempurnaan penyusunan dan perencanaan sumber daya kesehatan
2. Peningkatan dan pemantapan sistim informasi kesehatan
3. Peningkatan kualitas perencanaan kesehatan, dan peningkatan sarana kesehatan
4. Pengembangan sistem perencanaan dan penganggaran, pelaksanaan dan pengendalian, pengawasan dan penyempurnaan administrasi keuangan, serta hukum kesehatan

3.3. Pembangunan Keluarga Berencana

3.3.1. Program : Keluarga Berencana

Indikasi Kegiatan :

2. Pengembangan kebijakan tentang pelayanan KB, KIE, peran serta masyarakat dalam KB dan kesehatan reproduksi
3. Peningkatan akses dan kualitas pelayanan KB dan kesehatan reproduksi
4. Peningkatan penggunaan kontrasepsi yang efektif dan efisien.
5. Penyediaan alat, obat dan cara kontrasepsi dengan memprioritaskan keluarga miskin serta kelompok rentan lainnya.
6. Penyelenggaraan promosi dan pemenuhan hak-hak dan kesehatan reproduksi termasuk advokasi, komunikasi, informasi, edukasi dan konseling.



7. Pengembangan sistem pengelolaan dan peningkatan kemampuan tenaga lapangan KB.

3.3.2. Program : Kesehatan Reproduksi Remaja

Indikasi Kegiatan :

1. Pengembangan kebijakan pelayanan kesehatan reproduksi remaja.
2. Penyelenggaraan promosi kesehatan produksi remaja, pemahaman dan pencegahan HIV/ AIDS, bahaya NAPZA
3. Pelayanan Advokasi, komunikasi, informasi, edukasi dan konseling bagi masyarakat , keluarga dan remaja.
4. Penguatan dukungan dan partisipasi masyarakat terhadap penyelenggaraan program kesehatan reproduksi remaja yang mandiri.

3.3.3. Program : Ketahanan dan Pemberdayaan Keluarga

Indikasi Kegiatan :

1. Pengembangan dan pemantapan ketahanan dan pemberdayaan keluarga.
2. Penyelenggaraan advokasi, KIE, dan konseling bagi keluarga tentang pola asuh dan tumbuh kembang anak, kebutuhan dasar keluarga, akses terhadap sumber daya ekonomi dan peningkatan kualitas lingkungan keluarga.
3. Pengembangan pengetahuan dan keterampilan kewirausahaan melalui pelatihan teknis dan manajemen usaha terutama bagi keluarga miskin dalam kelompok UPPKS.
4. Pengembangan cakupan dan kualitas kelompok Bina Keluarga Balita, Remaja dan lanjut usia.



3.4. Prioritas : Peningkatan Partisipasi Perempuan dan Kesejahteraan Keluarga

3.4.1. Program : Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan

Tujuan program ini adalah untuk meningkatkan kualitas hidup, partisipasi perempuan dan anak di berbagai bidang kehidupan; dan meningkatkan perlindungan bagi perempuan dan anak dari berbagai bentuk kekerasan, eksploitasi dan diskriminasi.

Indikasi Kegiatan :

1. Peningkatan kualitas hidup perempuan, terutama di bidang pendidikan, kesehatan, hukum, ketenagakerjaan, sosial, politik, dan ekonomi.
2. Peningkatan upaya perlindungan perempuan dari berbagai tindak kekerasan, eksploitasi dan diskriminasi, termasuk usaha pencegahan dan penangulangannya
3. Pengembangan dan penyempurnaan perangkat hukum dan kebijakan peningkatan kualitas hidup dan perlindungan perempuan di berbagai bidang pembangunan
4. Pelaksanaan komunikasi, informasi, dan edukasi (KIE) peningkatan kualitas hidup dan perlindungan perempuan
5. Penyusunan sistem pencatatan dan pelaporan, dan sistem penanganan dan penyelesaian kasus tindak kekerasan, eksploitasi dan diskriminasi terhadap perempuan
6. Pembangunan pusat pelayanan terpadu berbasis rumah sakit dan berbasis masyarakat di tingkat kabupaten sebagai sarana perlindungan perempuan dan anak korban kekerasan, termasuk korban kekerasan dalam rumah tangga



7. Peningkatan peran masyarakat dan media dalam penanggulangan pornografi dan pornoaksi

3.4.2. Program : Peningkatan Kesejahteraan dan Perlindungan Anak

Tujuan program ini untuk meningkatkan kesejahteraan anak dan mewujudkan anak yang sehat, cerdas, ceria, dan berakhlak mulia; serta melindungi anak dari berbagai bentuk kekerasan, dan eksploitasi.

Indikasi Kegiatan :

1. Pengembangan berbagai kebijakan dan peraturan perundang-undangan dalam rangka pemenuhan hak-hak anak, terutama di bidang pendidikan, kesehatan, sosial, hukum, dan ketenagakerjaan
2. Pelaksanaan komunikasi, informasi, dan edukasi (KIE) peningkatan kesejahteraan dan perlindungan anak
3. Pelaksanaan kebijakan dan peraturan perundang-undangan untuk menjamin dan melindungi hak-hak anak
4. Peningkatan upaya-upaya dalam rangka pemenuhan hak anak, seperti: penyediaan akte kelahiran dan penyediaan ruang publik yang aman untuk bermain
5. Pengembangan sistem dan prosedur penanganan hukum anak yang ramah, termasuk peningkatan upaya khusus terhadap anak dalam situasi darurat, konflik dengan hukum, eksploitasi, dan *trafficking*

3.4.3. Program : Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak

Tujuan program ini untuk memperkuat kelembagaan dan jaringan pengarusutamaan gender (PUG) dan Pengarusutamaan Anak (PUA) di berbagai bidang pembangunan.

Indikasi Kegiatan :

Kegiatan pokok :

1. Pengembangan materi dan pelaksanaan komunikasi, informasi, dan edukasi tentang kesetaraan gender dan keadilan gender, dan kesejahteraan dan perlindungan anak



2. Penyempurnaan kebijakan pemberdayaan perempuan di berbagai sektor
3. Pemantauan dan evaluasi pelaporan terhadap sektor perempuan dan anak.

3.5. Peningkatan Kualitas Pemuda

3.5.1. Program : Pengembangan Partisipasi dan Potensi Pemuda

Tujuan umum program ini untuk meningkatkan kualitas pemuda menjadi mandiri dan berprestasi serta berpartisipasi aktif di berbagai bidang pembangunan.

Indikasi Kegiatan :

1. Pengembangan kemitraan pemerintah dan masyarakat dalam pembangunan kepemudaan.
2. Peningkatan peran serta pemuda dalam kegiatan pembangunan
3. Peningkatan wawasan dan sikap mental pemuda dalam pembangunan
4. Peningkatan kreativitas, inovasi pemuda sebagai wadah penyaluran minat dan bakat dan mewujudkan kemandirian.
5. Peningkatan sarana dan prasarana pembangunan kepemudaan.
6. Peningkatan advokasi dan penyelamatan pemuda dari bahaya NAFZA dan HIV/AIDS.

3.6. Pengembangan Kebijakan dan Manajemen Olahraga

3.6.1. Program : Pembangunan Olahraga.

Indikasi Kegiatan :

1. Pengembangan olahraga masal bagi generasi muda dan masyarakat.
2. Peningkatan pemanduan bakat dan pembibitan olahraga
3. Peningkatan prestasi olahraga



4. Pembinaan Manajemen Olahraga.
5. Peningkatan profesionalisme pelatih, manajer dan tenaga keolahragaan
6. Pengembangan sistem penghargaan dan kesejahteraan bagi atlet, pelatih dan tenaga keolahragaan.
7. Dukungan pembangunan sarana dan prasarana olahraga.
8. Pembinaan kemitraan dan kewirausahaan pengembangan olahraga.

4. Agenda : Mewujudkan Masyarakat Religius yang Bertaqwa kepada Tuhan yang Maha Esa, Rukun Penuh Kedamaian, Berbudaya serta didukung oleh Supremasi Hukum dan Stabilitas Politik yang Handal;

4.1. Peningkatan Kualitas Pemahaman dan Pengamalan Ajaran Agama

4.1.1. Program : Peningkatan Pelayanan Kehidupan Beragama

Program ini bertujuan untuk meningkatkan pelayanan dan kemudahan bagi umat beragama dalam melaksanakan ajaran agama, mendorong dan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam kegiatan pelayanan kehidupan beragama.

Indikasi Kegiatan :

1. Pemberian bantuan untuk pembangunan dan rehabilitasi tempat ibadah;
2. Meningkatkan fungsi dan peran tempat ibadah sebagai pusat pembelajaran dan pemberdayaan masyarakat melalui bantuan untuk pengembangan perpustakaan; koperasi masjid, BMT,
3. Meningkatkan mutu pembinaan, pelayanan, jemaah haji;
4. Meningkatkan pelayanan dan pengelolaan zakat dan wakaf serta ibadah sosial lainnya;



5. Memberdayakan lembaga-lembaga sosial keagamaan, seperti kelompok jemaah keagamaan, majelis taklim, organisasi keagamaan, Badan Amil Zakat, dan petugas wakaf;

4.1.2. Program : Peningkatan Pemahaman, Penghayatan, Pengamalan dan Pengembangan Nilai-nilai Keagamaan.

Program ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman, penghayatan, pengamalan, dan pengembangan nilai-nilai ajaran agama bagi setiap individu, keluarga, masyarakat dan penyelenggara negara.

Indikasi Kegiatan :

1. Penyuluhan dan bimbingan keagamaan bagi masyarakat dan aparat pemerintah.
2. Penyelenggaraan Musabaqah Tilawatil Qur'an.
3. Peningkatan kerjasama secara terpadu untuk memberantas pornografi, pornoaksi, KKN, Penyalahgunaan Narkoba, perjudian, prostitusi dan praktik asusila lainnya.
4. Penyelenggaraan pesantren kilat, lomba karya ilmiah agama, pembinaan dan pengembangat bakan kepemimpinan keagamaan, dll
5. Pemberian bantuan sarana, peralatan, buku pelajaran agama dan buku bernuansa agama pada sekolah umum
6. Melaksanakan pelatihan bagi tenaga penyuluh, pembimbing, mubaligh/dai dan orientasi bagi pemuka agama;
7. Memberikan bantuan paket dakwah untuk daerah tertinggal, terpencil dan bencana alam;



8. Pengembangan wawasan dan pendalaman materi bagi pendidik dan tenaga kependidikan agama dan keagamaan melalui lokakarya, workshop, seminar, studi banding dan orientasi;

4.2. Pemberantasan Maksiat dan Penyakit Masyarakat

4.2.1. Program : Pencegahan dan pemberantasan Maksiat dan Penyakit Masyarakat.

Indikasi Kegiatan :

1. Peningkatan fungsi kontrol dan peran serta seluruh komponen masyarakat dalam mencegah dan menanggulangi maksiat dan penyakit masyarakat.
2. Pembinaan dan Sosialisasi tentang penyakit masyarakat dan upaya penanggulangannya terhadap generasi muda & anak sekolah.
3. Meningkatkan koordinasi antar pemerintah dan masyarakat dalam pencegahan, penanganan dan pemberantasan perbuatan Maksiat dan Penyakit Masyarakat.
4. Fasilitasi dan operasional Badan Narkotika Daerah (BND)
5. Penegakan sanksi hukum positif & hukum adat terhadap pelaku.

4.3. Pengembangan Kebudayaan

4.3.1. Program : Pengelolaan Kekayaan Budaya

Indikasi Kegiatan :

1. Pelestarian kekayaan budaya yang meliputi sejarah, kepurbakalaan dan benda cagar budaya.
2. Pengembangan sistem informasi dan database bidang kebudayaan.



3. Pengembangan kelembagaan dan kapasitas sdm pengelola kekayaan budaya.
4. Pengembangan peran serta masyarakat dan swasta dalam pengelolaan budaya.
5. Pengembangan pendidikan multikultural untuk meningkatkan toleransi dalam masyarakat.
6. Meningkatkan kecintaan masyarakat terhadap asset budaya daerah.

4.4. Perlindungan dan Kesejahteraan Sosial

4.4.1. Program : Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial

Indikasi Kegiatan :

1. Peningkatan kualitas pelayanan, sarana dan prasarana rehabilitasi kesejahteraan sosial bagi PMKS
2. Penyusunan kebijakan pelayanan dan rehabilitasi sosial bagi PMKS
3. Peningkatan pembinaan, pelayanan dan perlindungan sosial dan hukum bagi anak terlantar, lanjut usia, penyandang cacat dan tuna sosial.
4. Penyelenggaraan pelatihan keterampilan dan praktek belajar kerja bagi PMKS

4.4.2. Program : Pemberdayaan Fakir Miskin dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial Lainnya.

Indikasi Kegiatan :

1. Penyusunan data base kemiskinan di tingkat nagari setiap tahun serta penertiban kartu keluarga miskin
2. Penyusunan strategi penanggulangan kemiskinan secara terpadu baik sektor maupun daerah
3. Pemberdayaan sosial keluarga, fakir miskin dan PMKS lainnya melalui peningkatan Usaha Ekonomi Produktif (UEP) dan Usaha Kesejahteraan Sosial (UKS) serta Kelompok Usaha Bersama (KUBE)
4. Peningkatan kerjasama kemitraan antara pengusaha dengan KUBE



5. Peningkatan kemampuan petugas dan pendamping pemberdayaan sosial keluarga, fakir miskin dan PMKS lainnya.

BAB VIII P E N U T U P

Sesuai dengan paradigma, visi, misi, tujuan dan program kerja, maka seluruh unsur dan elemen yang terkait dan terlibat dalam jalannya pemerintahan perlu bekerjasama dan saling menguatkan. Tanpa dukungan semua pihak, tidak mungkin visi dan misi ini dapat terwujud.

8.1. Kaedah Pelaksanaan

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Dharmasraya Tahun 2006 - 2010 merupakan penjabaran dari visi, misi dan program Bupati hasil Pemilihan Umum yang dilaksanakan secara langsung pada tahun 2005, yang selanjutnya merupakan pedoman bagi Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dalam menyusun Rencana Strategis (Renstra) SKPD. Untuk itu perlu ditetapkan kaidah-kaidah pelaksanaan sebagai berikut :

1. Satuan Kerja Perangkat Daerah dan masyarakat termasuk dunia usaha berkewajiban untuk melaksanakan program-program dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2006 - 2010 dengan sebaik-baiknya;



2. Satuan Kerja Perangkat Daerah berkewajiban untuk menyusun rencana strategis yang memuat visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pokok pembangunan sesuai dengan tugas dan fungsi Satuan Kerja Perangkat Daerah yang disusun dengan berpedoman kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2006 - 2010 yang nantinya akan menjadi Rencana Kerja Perangkat Daerah;
3. Satuan Kerja Perangkat Daerah berkewajiban menjamin konsistensi antara Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2006 - 2010 dengan Rencana Strategis SKPD.;
4. Dalam rangka meningkatkan efektifitas pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2006 - 2010 , Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Dharmasraya berkewajiban untuk melakukan pemantauan terhadap penjabaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2006 - 2010 ke dalam Rencana Strategis SKPD.
5. Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah merupakan dasar evaluasi dan laporan pelaksanaan atas kinerja lima tahunan.

8.1. Program Transisi

Dalam rangka menjaga kesinambungan pembangunan dan mengisi kekosongan rencana pembangunan daerah tahun 2011 (Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2011) yang diperlukan sebagai pedoman bagi penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2011 serta dengan mengingat waktu yang sempit bagi Bupati Terpilih hasil Pemilihan Umum Tahun 2010 nanti untuk menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2010-2015 serta Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2011, maka Pemerintah Kabupaten Dharmasraya menyusun Rancangan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2011 sesuai dengan jadwal dengan agenda *menyelesaikan masalah-masalah pembangunan yang belum seluruhnya*



tertangani sampai dengan tahun 2010 dan masalah-masalah pembangunan yang akan dihadapi dalam 2011. Disamping itu jika kondisi memungkinkan maka Rencana Kerja Pemerintah Daerah tahun 2011 juga diarahkan untuk memperkuat dan memantapkan Kabupaten Dharmasraya sebagai kabupaten perdagangan, industri dan pariwisata.

Selanjutnya Bupati Terpilih dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah hasil Pemilihan Umum Tahun 2010 tetap mempunyai ruang gerak yang luas untuk menyempurnakan Rancangan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2011 dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja daerah Tahun 2011 yang sudah disusun untuk pelaksanaan pembangunan daerah yang lebih baik.

BUPATI DHARMASRAYA,

H. MARLON MARTUA

MATRIK PROGRAM LIMA TAHUNAN

FUNGSI : EKONOMI
Sub Fungsi : Transportasi

Kebijakan	Program	Indikator Program (Hasil/Outcome)	Indikasi Kegiatan
1. Meningkatkan pembangunan dan Pemeliharaan sarana dan prasarana publik guna mendorong pemerataan pembangunan, percepatan, pertumbuhan ekonomi daerah.	1. Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan dan Jembatan	1. Meningkatnya jumlah prasarana yang terpelihara secara mantap dan berfungsi 2. Meningkatnya prosentase panjangmg jalan dan jumlah jembatan dalam kondisi baik dan sedang	1. Pemeliharaan, rehabilitasi jalan dan jembatan antar Kecamatan 2. Pemeliharaan dan rehabilitasi jalan/jembatan daerah potensial dan pengembangan daerah produksi
	2. Peningkatan Jalan dan Jembatan	1. Meningkatnya kapasitas, frekuensi dan waktu pelayanan yang memadai	1. Peningkatan jalan dan penggantian jemabatan kabupaten/kota 2. Pembangunan jalan baru guna membuka isolasi daerah 3. Pembangunan jalan dan jembatan guna pengembangan jaringan jalan pada daerahstrategis potensial.
	3. Penyediaan Peralatan Jalan	1. Terwujudnya efesiensi dan efektifitas pembangunan jalan dan jembatan	1. Pengadaan dan pemeliharaan peralatan jalan berat 2. Pengembangan laboratorium dan workshop.
2. Meningkatkan pelayanan jasa perhubungan secara efisiensi, handal, berkualitas dan aman	4. Pengembangan Fasilitas Lalu Lintas Jalan	1. Meningkatnya kelancaran dan ketertiban arus transportasi 2. Meningkatnya keamanan dan kenyamanan lalu lintas	1. Penyediaan, pemasangan dan pemeliharaan rambu-rambu lalu lintas jalan 2. Penyediaan dan pengaturan lapangan parkir kendaraan 3. Pembangunan dan pemeliharaan terminal dan sub terminal penumpang dan barang 4. Penyediaan dan pemeliharaan fasilitas penumpang terminal dan sub terminal penumpang dan barang

Sub Fungsi : Perdagangan, Pengembangan Usaha, Koperasi dan UKM

Kebijakan	Program	Indikator Program (Hasil/Outcome)	Indikasi Kegiatan
1	2	3	4
1. Peningkatan dan pengembangan perkoperasian, UKM	1. Penciptaan Iklim Usaha Kondusif	1. Meningkatnya kegiatan perekonomian rakyat yang tergabung dalam wadah koperasi	1. Pemberian insentif bagi pengembangan pengusaha kecil dan menengah
2. Mengembangkan sistem ekonomi kerakyatan yang bertumpu pada mekanisme pasar dengan pengembangan ekspor dan penguatan institusi pasar.	2. Peningkatan akses kepada sumber daya produktif	1. Meningkatkan produktifitas dan daya saing PKM	2. Penciptaan pelayanan perijinan.
3. Pengembangan iklim investasi pembukaanpeluang penanaman modal dan pengembangan perusahaan daerah	3. Pengembangan kewirausahaan.	1. Meningkatnya prosentase jumlah investasi PKM	1. Perluasan sumber pembiayaan koperasi, Pengusaha Kecil dan Menengah
	4. Pengembangan Perdagangan daerah	1. Meningkatnya prosentase jumlah investasi PKM	2. Peningkatan kemampuan pengembangan usaha
		1. Meningkatnya prosentase jumlah investasi PKM	1. Pengembangan kemitraan usaha koperasi dan PKM
	5. Pengembangan Ekspor.	1. Terkendalinya pengawasan perdagangan daerah	2. Pemasyarakatan kewirausahaan
		2. Terbinanya dan terlindungnya perdagangan daerah	1. Pengendalian dan pengawasan perdagangan daerah
		3. Meningkatnya sarana dan prasarana perdagangan daerah	2. Pembinaan dan perlindungan perdagangan daerah
	6. Penguatan Institusi Pasar.	1. Meningkatnya volume dan nilai ekspor	3. Peningkatan sarana dan prasarana perdagangan daerah.
		2. Meningkatnya produk-produk unggulan yang mempunyai keunggulan kompetitif	1. Fasilitasi perdagangan ekspor kepada pelaku usaha kecil dan menengah
		1. Meningkatnya sistem dan jaringan informasi ekspor	2. Penataan sistem informasi perdagangan
		2. Perluasan struktur dan pasar tujuan ekspor	1. Pengembangan jaringan informasi pasar barang dan jasa
	7. Pengembangan Perusahaan Daerah	1. Terwujudnya hubungan BUMD dengan usaha lain	2. Pembinaan kepastian berusaha dan stimulan bagi pedagang kecil
		2. Meningkatnya penerimaan daerah dari nilai tambah perusahaan daerah	3. Pemantapan lalu lintas perdagangan barang dan jasa.
			1. Peningkatan kualitas manajemen perusahaan daerah
			2. Pengembangan kemitraan BUMD dengan mitra usaha
			3. Peningkatan Usaha BUMD

1	2	3	4
	8. Penanaman Modal Daerah	1. Tersedianya prosedur investasi yang lebih efisien 2. Meningkatnya jumlah dan nilai penanaman modal daerah	1. Peningkatan promosi investasi pembangunan daerah 2. Peningkatan pelayanan perijinan penanaman modal

Sub Fungsi : Pertanian, Kehutanan, Perikanan dan Kelautan

Kebijakan	Program	Indikator Program (Hasil/Outcome)	Indikasi Kegiatan
1	2	3	4
1. Mengembangkan usaha pertanian dengan wawasan bisnis, menghasilkan nilai tambah dan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan pertanian 2. Mengembangkan sistem ketahanan pangan dan gizi melalui peningkatan ketersediaan komoditas pangan dalam jumlah yang cukup dan kualitas yang memadai. 3. Meningkatkan kemampuan dan produktivitas usaha melalui optimalisasi sumberdaya pertanian, perternakan dan perikanan.	1. Pertanian rakyat terpadu 2. Pengembangan Agribisnis 3. Ketahanan pangan dan gizi 4. Pengembangan usaha perkebunan	1. Meningkatnya produktifitas, kualitas dan produksi komoditas unggulan 2. Meningkatnya kesempatan kerja dan berusaha dalam pembangunan pertanian tanaman pangan 1. Meningkatnya ekspor produk-produk pertanian tanaman pangan 1. Meningkatnya ketersediaan beras dan konsumsi pangan sumber karbohidrat non beras 1. Meningkatnya ekspor produk perkebunan 2. Berkurangnya lahan-lahan kritis	1. Pemberdayaan petani dalam penerapan teknologi anjuran dan pemanfaatan informasi 2. Peningkatan akses petani dibidang permodalan 3. Peningkatan peran kelembagaan petani. 1. Pengembangan komoditas ekspor pertanian dan perikanan unggulan 2. Pembinaan pemasaran hasil produksi pertanian, perternakan dan perikanan. 3. Pengembangan kemitraan usaha tani tanaman pangan, perternakan dan perikanan. 1. Peningkatan produksi pertanian, perternakan dan perikanan 2. Pengembangan sistem kewaspadaan pangan 3. Pengembangan prasarana usaha tani pertanian, perternakan dan perikanan. 1. Peningkatan mutu dan penyediaan bibit tanaman perkebunan 2. Pengendalian lahan tanaman perkebunan 3. Peningkatan produksi tanaman perkebunan

4. Mengembangkan perekonomian yang berorientasi global berdasarkan keunggulan produk perkebunan	5. Pengelolaan dan pelestarian hutan	1. Terkendalnya hutan lindung, daerah tangkapan air dan daerah sumber air dan pengelolaan hutan	1. Pembangunan masyarakat desa sekitar hutan 2. Pelaksanaan reboisasi, penghijauan serta rehabilitasi hutan dan lahan kritis, daerah tangkapan air dan perlindungan mata air 3. Pengembangan kemitraan usaha dalam pengelolaan hutan bersama masyarakat
5. Mengembangkan perhutanan sosial sebagai penyeimbang ekosistem dan hutan pantai.	6. Pengembangan perhutanan sosial dan hutan pantai	1. Meningkatnya pengelolaan lahan hutan kurang produktif 2. Terkendalnya kelestarian hutan pantai	1. Pengembangan perhutanan sosial dan hutan kota 2. Pengembangan dan pelestarian hutan pantai 3. Pengembangan Agroforestry
6. Peningkatan pengamanan dan pengawasan dalam rangka pemanfaatan sumberdaya pesisir dan kelautan	7. Pengelolaan Sumberdaya Kelautan	1. Terciptanya peningkatan pendapatan nelayan.	1. Bantuan sarana dan prasarana penangkapan ikan 2. Fasilitas pengelolaan sumber daya kelautan
	8. Pengendalian Sumberdaya Kelautan	1. Terciptanya pemahaman dan kesadaran masyarakat dlm pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya pesisir dan lautan yang berkelanjutan	1. Peningkatan pengawasan terhadap pengelolaan sumber daya kelautan 2. Perencanaan dan pengendalian kawasan pantai.

Sub Fungsi : Tenaga Kerja

Kebijakan	Program	Indikator Program (Hasil/Outcome)	Indikasi Kegiatan
1. Memperluas lapangan kerja bagi pencari kerja	(1) Perluasan dan Pengembangan Kesempatan Kerja	1. Terciptanya perluasan lapangan kerja diberbagai bidang usaha bagi pencari kerja	1. Penyusunan rencana pembangunan ketenaga kerjaan 2. Penyebarluasan informasi lapangan kerja dan potensi tenaga kerja 3. pelayanan rekomendasi kepada pencari kerja
2. Meningkatkan kualitas SDM pencari kerja	(2) Peningkatan kualitas dan produktivitas tenaga kerja	1. Terciptanya standarisasi dan sertifikasi kompetensi tenaga kerja	1. Pembinaan dan pemanduan penempatan tenaga kerja 2. Pembinaan dan pemanduan terapan teknologi padat karya 3. Penyelenggaraan latihan ketrampilan

3. Meningkatkan mobilitas tenaga kerja	(3) Perlindungan Tenaga Kerja	1. Meningkatnya perlindungan, pengawasan dan keselamatan kerja.	kejuruan, institusional dan non institusional 4. Pemberian bantuan modal usaha mandiri dan pemberian kerja sementara bagi pengangguran 1. Pembinaan hubungan industrial dan perlindungan tenaga kerja 2. Peningkatan pengawasan norma kerja, keselamatan dan kesehatan kerja serta jamsostek 3. Peningkatan pembinaan syarat-syarat kerja.
--	-------------------------------	---	---

Sub Fungsi : Pertambangan

Kebijakan	Program	Indikator Program (Hasil/Outcome)	Indikasi Kegiatan
1. Mendorong tumbuh dan berkembangnya usaha di bidang sumber daya mineral.	1. Pengelolaan dan Pengendalian Usaha Pertambangan	1. Terwujudnya pola pengusahaan pertambangan yang berwawasan lingkungan	1. Inventarisasi dan promosi pertambangan daerah 2. Pengendalian, pengelolaan dan pengusahaan pertambangan, sumber daya mineral dan air bawah tanah.

Sub Fungsi : Industri dan Konstruksi

Kebijakan	Program	Indikator Program (Hasil/Outcome)	Indikasi Kegiatan
1. Mengembangkan sistem ekonomi kerakyatan yang bertumpu pada mekanisme pasar yang didukung oleh pembangunan industri, peningkatan pemanfaatan dan penguasaan teknologi.	1. Pengembangan Industri	1. Meningkatnya daya saing industri	1. Peningkatan kualitas sumber daya manusia pengrajin industri kecil 2. Pembinaan permodalan, pemasaran manajemen industri kecil 3. Pengembangan diversifikasi, kualitas dan desain produksi industri kecil 4. Peningkatan sarana dan prasarana pendukung industri rumah tangga, kecil dan menengah

	2. Peningkatan pemanfaatan dan pengausaan Teknologi industri 3. Peningkatan keterkaitan industri	1. Meningkatnya penggunaan teknologi tepat guna bagi industri kecil menengah 1. Meningkatnya peran dan kontribusi industri terhadap pertumbuhan ekonomi daerah	1. Peningkatan kualitas SDM dalam rangka alih teknologi industri 2. Pengembangan IPTEK dan teknologi tepat guna bagi industri kecil dan menengah 1. Pelayanan perijinan industri 2. Perencanaan dan pengembangan industri.
--	---	---	---

Sub Fungsi : Bahan Bakar dan Energi

Kebijakan	Program	Indikator Program (Hasil/Outcome)	Indikasi Kegiatan
1. Mendorong tumbuh dan berkembangnya usaha di bidang energi.	1. Pengembangan Tenaga Listrik dan Energi Alternatif	1. Terpenuhinya kebutuhan energi listrik bagi masyarakat di pedesaan 2. Terwujudnya penganekaragaman penggunaan energi alternatif	1. Pengembangan penggunaan energi alternatif sebagai energi tepat guna 2. Perluasan cakupan pelayanan energi listrik 3. Pengendalian pengembangan jaringan distribusi listrik.

Sub Fungsi : Pengairan

Kebijakan	Program	Indikator Program (Hasil/Outcome)	Indikasi Kegiatan
1. Meningkatkan pembangunan dan Pemeliharaan sarana dan prasarana publik guna mendorong pemerataan pembangunan, percepatan, pertumbuhan ekonomi daerah, pelayanan kebutuhan masyarakat.	1. Pengelolaan sarana dan prasarana sumber daya air dan irigasi	1. Meningkatnya pemanfaatan dan produktifitas sumber-sumber air	1. Perencanaan dan penetapan sistem penyediaan dan penggunaan air untuk pertanian, industri dan air bersih 2. Eksplotasi dan pemeliharaan jaringan irigasi dan drainase beserta bangunan pelengkap.

	2. Pengembangan sarana dan prasarana sumber daya air dan irigasi 3. Pengembangan kelembagaan sumber daya air dan irigasi	1. Meningkatnya jumlah prasarana yang terpelihara dan berfungsi 1. Terwujudnya kemandirian organisasi masyarakat pengelola air dalam pengelolaan jaringan irigasi	1. Perbaikan/rehabilitasi jaringan irigasi beserta bangunan pelengkapanya 2. Perencanaan sumber daya air dan jaringan irigasi 3. Pembangunan irigasi dan bangunan fasilitas irigasi. 1. Pembinaan terhadap petani pemakai air 2. Pemberdayaan himpunan petani pemakai air.
--	---	--	--

Sub Fungsi : Telekomunikasi dan Informatika

Kebijakan	Program	Indikator Program (Hasil/Outcome)	Indikasi Kegiatan
1. Meningkatkan pelayanan jasa telekomunikasi secara efisien, handal berkualitas dan aman 2. Mendorong masyarakat menggunakan informasi dan komunikasi guna peningkatan peran serta masyarakat dalam pembangunan daerah	1. Pengembangan sistem telekomunikasi. 2. Pengembangan informasi, komunikasi dan media massa 3. Pembangunan Perpustakaan dan Kearsipan	1. Terwujudnya peningkatan kualitas pelayanan telekomunikasi 1. Meningkatnya partisipasi masyarakat dan investasi swasta dalam penggunaan jasa informasi, komunikasi dan media massa 1. Meningkatnya kemampuan penyedia dan pelayanan informasi pembangunan	1. Peningkatan pelayanan perijinan telekomunikasi 2. Penyusunan dan penetapan jaringan telekomunikasi 3. Operasional rencana induk sistem telekomunikasi. 1. Peningkatan pemerataan informasi pembangunan 2. Pembinaan dan fasilitasi media massa dalam melakukan kontrol sosial dan pengawasan publik 1. Penerapan pola tata kearsipan modern 2. Peningkatan kemampuan SDM pengelola Perpustakaan dan Kearsipan.

Sub Fungsi : Pengembangan Pariwisata dan Budaya

Kebijakan	Program	Indikator Program (Hasil/Outcome)	Indikasi Kegiatan
1. Mengembangkan industri pariwisata yang di dukung pengembangan dan pengelolaan produk dan obyek wisata	1. Industri Pariwisata	1. Meningkatnya produk dan obyek wisata	1. Peningkatan kegiatan promosi pariwisata 2. Peningkatan SDM kepariwisataan yang berkualitas 3. Sosial sapta pesona 4. Peningkatan kerjasama antar pelaku pariwisata dan lembaga-lembaga pariwisata 5. Perluasan, pengembangan dan peningkatan kualitas obyek wisata dan produk pesona
2. Pengembangan kebudayaan dan kesenian secara profesional	2. Pengembangan budaya dan kesenian	1. Berkembangnya seni, budaya dan pesona alam	1. Peningkatan kegiatan promosi seni dan budaya daerah 2. Pelestarian dan pengembangan kebudayaan dan kesenian lokal 3. Pengembangan kreasi sastra, seni dan budaya

MATRIK PROGRAM LIMA TAHUNAN

FUNGSI : KESEHATAN

Sub Fungsi : Pelayanan Kesehatan Masyarakat

Kebijakan	Program	Indikator Program (Hasil/Outcome)	Indikasi Kegiatan
1. Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat melalui usaha-usaha pelayanan dan penyuluhan kesehatan yang terjangkau dan berkualitas	1. Lingkungan Sehat	1. Meningkatnya prosentase keluarga yang telah melaksanakan PHBS	1. Peningkatan promosi higienis dan sanitasi 2. Peningkatan kesehatan dan keselamatan kerja 3. Peningkatan kesehatan lingkungan dan pemukiman
	2. Perilaku sehat dan pemberdayaan masyarakat	1. Terlaksananya sosialisasi kebijakan hidup sehat	1. Penyuluhan kesehatan masyarakat
	3. Perbaikan gizi masyarakat	1. Meningkatnya prosentase keluarga sadar gizi	1. Penyuluhan dan dan penanggulangan gizi masyarakat 2. Pemantapan pelaksanaan SKPG

Sub Fungsi : Keluarga Berencana

Kebijakan	Program	Indikator Program (Hasil/Outcome)	Indikasi Kegiatan
1. Mengendalikan pertumbuhan penduduk, peningkatan kualitas melalui keluarga berencana	Keluarga Berencana	1. Meningkatnya jumlah peserta KB mandiri	1. Peningkatan pelayanan keluarga berencana 2. Pembinaan kesehatan reproduksi remaja

MATRIK PROGRAM LIMA TAHUNAN

FUNGSI : PERLINDUNGAN SOSIAL
Sub Fungsi : Perlindungan Sosial Lainnya

Kebijakan	Program	Indikator Program (Hasil/Outcome)	Indikasi Kegiatan
1. Membangun ketahanan sosial yang mampu memberikan bantuan penyelamatan dan pemberdayaan terhadap penyandang masalah sosial dalam rangka meningkatkan kesejahteraan sosial masyarakat	1. Pengembangan potensi kesejahteraan sosial 2. Peningkatan kualitas pelayanan sosial	1. Meningkatnya tenaga kerja sukarela masyarakat, orsos, LSM yang terlibat dalam pencegahan dan penanggulangan masalah sosial 1. Terwujudnya standarisasi pelayanan sosial	1. Rehabilitasi sosial bagi tuna sosial 2. Pemberdayaan pengemis, gelandangan, keluarga miskin dan perempuan rawan sosial ekonomi 1. Peningkatan sarana dan prasarana panti sosial 2. Peningkatan kualitas dan lembaga pelayanan sosial

Sub Fungsi : Pemberdayaan Perempuan

Kebijakan	Program	Indikator Program (Hasil/Outcome)	Indikasi Kegiatan
1. Meningkatkan kualitas SDM perempuan 2. Meningkatkan pemberdayaan perempuan dan pemenuhan perlindungan terhadap perempuan	1. Peningkatan Kualitas Hidup 2. Pemberdayaan Perempuan	1. Meningkatnya kualitas SDM perempuan 1. Meningkatnya jumlah dan peranan lembaga yang memperjuangkan hak-hak perempuan	1. Peningkatan kualitas SDM perempuan untuk mencapai kesetaraan dan keadilan 1. Peningkatan kedudukan dan peranan perempuan dalam kehidupan keluarga, masyarakat dan bernegara 2. Penyebarluasan informasi tentang hak dan perlindungan sosial bagi perempuan

MATRIK PROGRAM LIMA TAHUNAN

FUNGSI : PENDIDIKAN
 Sub Fungsi : Pendidikan Usia Dini

Kebijakan	Program	Indikator Program (Hasil/Outcome)	Indikasi Kegiatan
1. Mengupayakan perluasan kesempatan belajar	Pendidikan Pra Sekolah	1. Meningkatnya kesadaran masyarakat akan pentingnya pendidikan pra sekolah	1. Peningkatan kualitas pendidikan pra sekolah 2. Peningkatan kualitas SDM tenaga pendidik

Sub Fungsi : Pendidikan Dasar

Kebijakan	Program	Indikator Program (Hasil/Outcome)	Indikasi Kegiatan
1. Meningkatkan kualitas pendidikan.	Pendidikan Dasar	1. Meningkatnya angka partisipasi 2. Berkurangnya angka putus sekolah 3. Meningkatnya fasilitas sarana dan prasarana pendidikan dasar	1. Perbaikan sarana dan prasarana pendidikan sekolah 2. Penerapan manajemen berbasis sekolah 3. Peningkatan mutu pendidikan, kelulusan pendidikan 4. Pemberian bantuan operasional pengelolaan sekolah dasar

MATRIK PROGRAM LIMA TAHUNAN

FUNGSI : PERLINDUNGAN LINGKUNGAN HIDUP

Sub Fungsi : Konservasi Sumber Daya Alam

Kebijakan	Program	Indikator Program (Hasil/Outcome)	Indikasi Kegiatan
1. Mengendalikan pencemaran dan merusak lingkungan yang diimbangi dengan pengembangan sistem dan mekanisme pengelolaan sumber daya alam.	1. Pengelolaan, Konservasi dan Rehabiliatsi SDA	1. Meningkatnya efektifitas pengelolaan, konservasi dan rehabilitasi lahan	1. Pengakjian terhadap pengelolaan, konservasi dan rahabilitasi SDA
	2. Peningkatan Peran serta Masyarakat dalam Pengelolaan SDA dan LH	1. Meningkatkan Peran serta Masyarakat dalam Pengelolaan SDA dan pelestarian LH	2. Pengelolaan dan perlindungan keanekaragaman hayati darat dan Perairan
			1. Pengembangan pola kemitraan dalam pengelolaan SDA dan LH
			2. Pemasyarakatan pembangunan berwawasan lingkungan

Sub Fungsi : Tata Ruang dan Pertanahan

Kebijakan	Program	Indikator Program (Hasil/Outcome)	Indikasi Kegiatan
1. Mendorong pengembangan wilayah	1. Penataan Ruang Kota dan daerah	1. Terealisasinya penataan tata ruang kota dan daerah	1. Penyusunan rencana tata ruang kota dan daerah
2. Meningkatkan optimalisasi pemanfaatan dan penataan ruang kota	2. Penataan Pertanahan	2. Meningkatnya pelayanan tertib adminitrasi pertanahan	1. Peningkatan tertib administrasi pertanahan

MATRIK PROGRAM LIMA TAHUNAN

FUNGSI : PELAYANAN UMUM

Sub Fungsi : Pelayanan Umum Pemerintahan

Kebijakan	Program	Indikator Program (Hasil/Outcome)	Indikasi Kegiatan
- Meningkatkan kualitas penyelenggaraan administrasi negara melalui penataan ke lembaga, manajemen publik dan peningkatan kapasitas SDM aparatur; dan - Meningkatkan keberdayaan masyarakat dalam penyelenggaraan pembangunan melalui peningkatan kualitas pelayanan publik yang lebih baik.	1. Peningkatan Kapasitas Administrasi Publik	- Terwujudnya penyederhanaan dan kualitas pelayanan perijinan di semua bidang - Terinventarisirnya secara akurat semua aset pemerintah daerah	- Penataan administrasi kepegawaian - Peningkatan pelayanan birokrasi publik - Penataan administrasi pembangunan yang akuntabel
	2. Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Daerah	Tersedianya jumlah aparatur yang berkualitas yang mampu menjalankan tugas wajib.	- Penyelenggaraan diklat aparatur pemerintah daerah - Perencanaan, pengukuran dan evaluasi kinerja aparatur dalam rangka AKIP - Peningkatan kemampuan aparatur penyelenggaraan pemerintah desa/kelurahan
	3. Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pemerintah Daerah	Terwujudnya efektifitas dan efisiensi organisasi secara optimal dalam pelaksanaan tupoksi	- Pengkajian terhadap struktur lembaga pemerintah daerah - Penataan personil aparatur guna efektifitas dan efisiensi organisasi
	4. Peningkatan Pengawasan Fungsional Pemerintah Daerah	Efektifitasnya pelaksanaan pengawasan fungsional atas penyelenggaraan pemerintah daerah	- Pelaksanaan pengawasan kinerja aparatur pemerintah daerah - Penyediaan dukungan sarana dan prasarana pengawasan
	5. Peningkatan kualitas pelayanan publik	Terlaksananya pelayanan publik yang prima melalui deregulasi dan debirokratisasi pelayanan	- Pelaksanaan sistem pelayanan publik yang prima - Pengembangan sistem informasi manajemen dalam pelayanan publik - Pemberian dukungan sarana dan prasarana pelayanan publik

3. Memantapkan pengelolaan keuangan daerah berdasarkan kebijaksanaan desentralisasi keuangan. 4. Meningkatkan mutu hasil penelitian dan pendataan guna menunjang perencanaan dan pengembangan pembangunan daerah.	6. Pemantapan Otonomi Daerah	1. Terlaksananya restrukturisasi kelembagaan sesuai dengan tuntutan fungsi pelayanan publik	1. Pemantapan perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah 2. Pengembangan prasarana fisik unit kerja pemerintah daerah
	7. Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Pemerintah Daerah	1. Terwujudnya budaya kerja aparatur yang tinggi dalam pelaksanaan tupoksi organisasi	1. Peningkatan analisis jabatan dan kebutuhan jabatan 2. Pengembangan analisis organisasi dan tatalaksana organisasi
	8. Penguatan Lembaga Non Pemerintah	1. Terjalinnya kerjasama dengan lembaga/institusi diluar pemerintah daerah dalam rangka perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan daerah	1. Pemantapan proses perencanaan pembangunan dari bawah yang melibatkan komponen masyarakat 2. Peningkatan jalinan kerjasama dengan lembaga/institusi diluar pemerintah daerah dalam rangka pembangunan daerah
	9. Pengembangan dan peningkatan sumber keuangan daerah	1. Meningkatnya pendapatan asli daerah	1. Perluasan dan peningkatan sumber penerimaan daerah 2. Intensifikasi pemungutan pajak dan retribusi daerah 3. Pengkajian peningkatan penerimaan daerah
	10. Pemantapan manajemen pengelolaan keuangan daerah	1. Terwujudnya pengelolaan manajemen keuangan daerah secara akuntabel.	1. Pengembangan sistem pengelolaan keuangan daerah 2. Pemantapan koordinasi perencanaan dan penyusunan APBD 3. Penataan manajemen keuangan daerah secara akuntabel 4. Penyusunan pertanggungjawaban Kepala Daerah.
	11. Penelitian, pendataan dan pengkajian pengembangan daerah	1. Tersedianya perencanaan strategik sebagai dasar pertanggungjawab pembangunan	1. Pengembangan penelitian dan pengkajian pembangunan daerah 2. Penyediaan data, informasi dan laporan pembangunan daerah

MATRIK PROGRAM LIMA TAHUNAN

FUNGSI : KETERTIBAN DAN KEAMANAN
Sub Fungsi : Hukum, Ketertiban dan Keamanan Lainnya

Kebijakan	Program	Indikator Program (Hasil/Outcome)	Indikasi Kegiatan
1. Mewujudkan ketentraman dan ketertiban masyarakat dalam kehidupan bermasyarakat.	1. Peningkatan kemampuan Pelindungan Masyarakat	1. Meningkatnya kemampuan aparat dalam pelaksanaan perlindungan masyarakat	1. Peningkatanpelaksanaan sistem keamanan swakarsa 2. Peningkatan peran dan fungsi perlindungan masyarakat 3. Peningkatankemampuan SDM dan ketrampilan di bidang perlindungan masyarakat
	2. Penegakan Peraturan Daerah	1. Meningkatnya ketaatan masyarakat terhadap perda dalam rangka mensukseskan pembangunan	1. Peningkatan peran dan fungsi Satpol PP dan penyidik PNS 2. Operasional penegakan peraturan daerah 3. Operasional pembinaan ketentraman dan ketertiban 4. Pembinaan ketaatan masyarakat terhadap peraturan daerah.

MATRIK INDIKASI RENCANA PROGRAM PRIORITAS

Misi : Mewujudkan Pemerintahan yang Profesional dan Penuh Pengabdian (Good Corporate Governance) yang berbasis pada Good Governance, Good Government dan Clean Governance;

FUNGSI : PELAYANAN UMUM

Kebijakan	Sasaran Kebijakan	Program	Indikasi Kegiatan
<u>Peningkatan Kemampuan Pemerintah Daerah dan Nagari</u> 1. Menyempurnakan struktur kelembagaan dan ketatalaksanaan Pemerintah Daerah termasuk tugas pokok dan fungsi masing-masing unit kerja yang relevan untuk menciptakan struktur organisasi yang efisien, efektif dan responsif;	Terciptanya struktur organisasi dan tata kerja (SOTK) Pemerintah Kabupaten yang efisien, efektif, profesional, akuntabel dan adaptif.	Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Pemerintah Daerah.	1. Perumusan Kelembagaan Pemerintah Daerah yang efisien, efektif, profesional, akuntabel dan adaptif, serta perumusan Tugas Pokok dan fungsi. 2. Perumusan Ketatalaksanaan Pemerintah Daerah. 3. Perumusan Jabatan Fungsional 4. Peningkatan sistem akuntabilitas kinerja 5. Pengembangan budaya kerja Aparatur. 6. Pengembangan administrasi dan kearsipan yang efektif dan efisien;
2. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Aparatur sesuai tugas pokok dan fungsi pemerintahan, melakukan rasionalisasi jumlah pegawai serta penataan-ulang formasi, dan penempatan pegawai untuk peningkatan pelayanan yang profesional.	Meningkatkan pelayanan birokrasi pemerintahan dengan terlaksananya pola rekrutmen, promosi, mutasi di lingkungan pemerintahan yang objektif berdasarkan sistem meritokrasi.	Penataan Manajemen Sumber Daya Aparatur.	1. Menyempurnakan dan menciptakan mekanisme, standar rekrutmen aparatur, standarisasi jabatan, promosi dan mutasi yang objektif dan profesional 2. Penataan & pembinaan sumber daya aparatur sesuai dengan kewenangan dan beban kerja, kompetensi & perbaikan distribusi 3. Peningkatan disiplin aparatur 4. Meningkatkan kualitas dan kompetensi sumber daya aparatur dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawab.
3. Meningkatkan Kesejahteraan PNS dan Penyelenggara Pemerintahan;	Meningkatnya kesejahteraan PNS dan Penyelenggara Pemerintahan	Peningkatan Kesejahteraan PNS	1. Peningkatkan Pendapatan PNS . 2. Fasilitasi bantuan perumahan PNS 3. Pemberdayaan lembaga ekonomi PNS 4. Peningkatan bantuan sosial PNS.
4. Meningkatkan kualitas perencanaan dan pengawasan serta akuntabilitas kinerja aparatur .	Terwujudnya perencanaan daerah yang berkualitas, partisipatif dan akomodatif serta meningkatnya efektifitas pengawasan dan akuntabilitas kinerja aparatur dalam penyelenggaraan pemerintahan	Peningkatan Kualitas Perencanaan Daerah.	1. Merumuskan kebijakan teknis dalam bidang perencanaan pembangunan daerah 2. Mengkoordinasikan perencanaan jangka panjang, jangka menengah, dan tahunan.

			3. Mengkoordinasikan & mengintegrasikan kebijakan perencanaan di bidang perekonomian, fisik & prasarana, dan sosbud 4. Peningkatan pelaksanaan pengendalian dan Evaluasi pelaksanaan program pembangunan 5. Pemantapan proses perencanaan pembangunan dari bawah (bottom up) yang melibatkan komponen masyarakat
		Peningkatan Pengawasan dan Akuntabilitas Kinerja Aparatur	1. Mengembangkan tenaga aparatur pemeriksa yang profesional yang menjunjung tinggi aturan yang berlaku. 2. Peningkatan intensitas dan kualitas pengawasan, audit internal, eksternal dan kontrol publik; 3. Peningkatan tindak lanjut temuan pengawasan & penerapan <i>reward & punishment</i>. 4. Mengembangkan sistem akuntabilitas kinerja dan meningkatkan implementasinya di seluruh instansi; 5. Meningkatkan transparansi kualitas informasi hasil pengawasan, tindak lanjutnya serta dokumentasi <i>track record</i> aparatur yang akurat. 6. Melakukan peningkatan evaluasi berkala atas kinerja dan temuan hasil pengawasan
5. Meningkatkan kerjasama yang sinergis antara aparatur pemerintah daerah dan antar daerah maupun dengan NGO	Terjalannya kerjasama yang sinergis antara aparatur pemerintah daerah, antar daerah dan NGO	Peningkatan Koordinasi dan Kerjasama Pembangunan	1. Peningkatan koordinasi bidang perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan. 2. Pengembangan kerjasama wilayah perbatasan 3. Pengembangan Kerjasama antar daerah didalam kabupaten dan dengan kabupaten tetangga. 4. Pengembangan kerjasama daerah dengan Perguruan Tinggi dan NGO.
6. Membangun sistem informasi dan komunikasi pembangunan daerah yang didukung oleh teknologi informasi;	Terciptanya pelayanan informasi yang cepat, tepat dan akurat.	Pengembangan Sistem Informasi dan Komunikasi.	1. Peningkatan pemerataan informasi pembangunan melalui media cetak dan elektronik. 2. Pembinaan dan fasilitasi media masa dalam melakukan control social dan pengawasan public 3. Pengembangan Situs dan Website daerah 4. Peningkatan kinerja kehumasan daerah 5. Penerapan pola tata kearsipan modern 6. Pembangunan Perpustakaan daerah

<u>Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik</u> 1. Menyusun standar pelayanan yang cepat, murah, mudah dan transparansi, dalam setiap produk layanan pemerintah; 2. Menyiapkan ketersediaan aparatur pelayanan publik yang memiliki etos kerja, profesional dan cekatan 3. Meningkatkan kualitas pengawasan kinerja aparatur, melalui sistem kontrol multi pihak dengan cara pemberian penghargaan kepada yang berprestasi dan ganjaran kepada yang melakukan pengawasan.	Tersedianya sistem/prosedur pelayanan publik kepada masyarakat dan pelaku bisnis yang transparans, partisipatif dan akuntabel Meningkatnya etos kerja aparatur pemerintah yang profesional dan kompeten Optimalnya pelaksanaan tugas pelayanan publik oleh aparatur dengan penerapan <i>reward and punishment</i>	Penataan prosedur pelayanan publik Peningkatan kualitas aparatur pelayanan publik Peningkatan pengawasan aparatur pelayanan publik	1. Penataan sistem/prosedur penyelenggaraan pelayanan publik melalui deregulasi dan debirokratisasi; 2. Optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi dalam pelayanan perizinan; 3. Mengembangkan partisipasi masyarakat dalam perumusan program dan kebijakan layanan publik. 4. Penetapan standar pelayanan minimum (SPM) untuk masing-masing bidang pelayanan publik. 1. Peningkatan penerapan sistem meritokrasi dalam pola rekrutmen aparatur yang memberikan pelayanan publik 2. Peningkatan etos kerja aparatur pelayan publik 3. Pemberdayaan dan Pembinaan Aparatur Pelayanan Publik 1. Peningkatan koordinasi pembinaan dan pengawasan pelayanan publik serta pengembangan kualitas aparat pelayanan publik; 2. Membuka akses kontrol publik dan mengintensifkan penanganan pengaduan masyarakat; 3. Mengembangkan mekanisme pelaporan berkala pencapaian kinerja penyelenggaraan pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten/kota kepada publik.
<u>Kependudukan</u> 1. Penataan administrasi kependudukan guna mendorong terakomodasinya hak hak penduduk dan meningkatkan kualitas dokumen, data, dan informasi penduduk, dalam mendukung perencanaan dan pelaksanaan pembangunan berkelanjutan serta pelayanan publik.	Meningkatnya tertib administrasi kependukan serta tersedianya data kependudukan yang akurat untuk mendukung perencanaan pembangunan dan pelayanan publik	Penataan Administrasi Kependudukan	1. Penyempurnaan sistem pendaftaran penduduk, pencatatan sipil, dan pengelolaan informasi kependudukan melalui Sistem Administrasi Kependudukan (SAK). 2. Penataan kelembagaan administrasi kependudukan yang berkelanjutan 3. Peningkatan SDM aparatur pengelola kependudukan. 4. Peningkatan partisipasi masyarakat dalam bidang administrasi informal kependudukan.
<u>Pemberantasan Korupsi, Kolusi & Nepotisme</u> 1. Transparansi dan efektifitas pengawasan dalam penyelenggaraan pemerintahan, Peningkatan kerjasama antara aparatur penegak hukum dengan auditor serta keterlibatan masyarakat.	Terwujudnya pemerintahan yang bebas korupsi, kolusi, nepotisme.	Pemberantasan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.	1. Peningkatan sistem manajemen keuangan daerah 2. Penerapan sistem & prosedur pengadaan barang dan jasa pemerintah yang transparans & akuntabel 3. Peningkatan akuntabilitas kinerja pemerintah

MATRIK INDIKASI RENCANA PROGRAM PRIORITAS

Misi : Mewujudkan Masyarakat Religius yang Bertaqwa kepada Tuhan yang Maha Esa, Rukun Penuh Kedamaian, Berbudaya serta didukung oleh Supremasi Hukum dan Stabilitas Politik yang Handal;

FUNGSI : KETERTIBAN DAN KEAMANAN

Kebijakan	Sasaran Kebijakan	Program	Indikasi Kegiatan
<u>Pembangunan Hukum dan Perlindungan Hak Asasi Manusia (HAM)</u> 1. Penegakan supremasi hukum serta Dokumentasi dan informasi hukum dan perlindungan HAM dan Meningkatnya pemahaman & kesadaran aparaturnya / masyarakat terhadap produk hukum daerah	Terciptanya produk hukum daerah dan budaya hukum berdasarkan norma hukum yang berlaku dan menjunjung tinggi HAM ;	Peningkatan dan Penataan produk hukum daerah Peningkatan pemahaman & kesadaran hukum Penegakan Supremasi Hukum & Perlindungan HAM	1. Pembentukan dan penataan produk hukum daerah yang aspiratif dan akomodatif 2. Menyusun perencanaan produk hukum yang terpadu, aspiratif dan akomodatif 3. Pembinaan, penyusunan, dan pengawasan serta evaluasi produk hukum daerah 4. Peningkatan profesionalisme aparaturnya pengelola dalam penyusunan produk hukum. 5. dokumentasi dan informasi produk hukum daerah 1. Pendidikan dan Sosialisasi berbagai peraturan perundang-undangan dan HAM, 2. Perwujudan perilaku dan keteladanan dari penyelenggara pemerintahan dengan segenap jajaran untuk mentaati hukum. 3. Meningkatkan ruang partisipasi masyarakat dalam pembentukan produk hukum 1. Mendorong upaya peningkatan profesionalisme dalam pelaksanaan penegakan hukum 2. Menegakan hukum secara adil, dan konsekuen, serta tidak diskriminatif, 3. Memperkuat dan melakukan konsolidasi kehidupan demokrasi, pada semua tingkatan dan institusi yang ada.
<u>Pemberdayaan dan Pembinaan Organisasi Masyarakat dan Partai Politik</u> 1. Melakukan koordinasi dan fasilitasi antara pemerintah daerah dengan ormas dan parpol dalam rangka peningkatan kemandirian dan ketertiban serta pembinaan politik	Tercapainya kondisi yang kondusif ditengah-tengah masyarakat dengan mensinergikan peran pemerintah, ormas. & parpol dalam mewujudkan keamanan dan ketertiban	Pemberdayaan dan pematapan organisasi masyarakat dan partai politik	1. Pemberdayaan dan pembinaan organisasi masyarakat, LSM dan partai politik 2. Peningkatan koordinasi & sinergitas antara pemerintah dengan ormas dan parpol

<u>Peningkatan Keamanan dan Ketertiban</u> 1. Meningkatkan kapasitas Polisi Pamong Praja guna pemeliharaan kamtibmas dan penegakan peraturan daerah. 2. Peningkatan peran masyarakat dalam pencegahan kemungkinan konflik dan mengatasi konflik yang terjadi <u>Pemberantasan Maksiat dan Penyakit Masyarakat</u> 1. Meningkatkan peran serta seluruh komponen masyarakat terutama <i>Tigo Tungku Sajaringan - Tigo Tali Sapilin</i> dalam pemberantasan maksiat dan penyakit masyarakat serta Meningkatkan pemahaman masyarakat dan generasi muda tentang bahaya perbuatan maksiat & penyakit masyarakat <u>Penanggulangan Bencana Alam</u> 1. Mengurangi resiko/dampak yang ditimbulkan oleh bencana, khususnya bagi penduduk yang berada di daerah rawan bencana alam serta meningkatkan peran serta semua pihak, baik pemerintah, masyarakat dan swasta dalam penanggulangan bencana	Meningkatnya kinerja Pol PP dalam pemeliharaan kamtibmas dan penegakan peraturan daerah Meningkatnya peran serta masyarakat dalam upaya pencegahan & penyelesaian konflik yang terjadi Meningkatnya pemahaman, kesadaran dan peranserta masyarakat & generasi muda dalam mencegah dan memberantas serta meluasnya perbuatan maksiat maupun penyakit masyarakat Berkurangnya resiko dampak yang ditimbulkan oleh bencana, serta meningkatnya pemahaman masyarakat terhadap bencana alam;	Peningkatan upaya mewujudkan ketertiban dan keamanan Peningkatan dan Pemantapan Integrasi Bangsa Pencegahan dan pemberantasan Maksiat & Penyakit Masyarakat. Mitigasi dan Penanggulangan Bencana Alam	1. Peningkatan operasi penegakan produk hukum daerah 2. Pengamanan aset daerah 3. Peningkatan ketertiban dan keamanan masyarakat 4. Peningkatan kapasitas Pol PP 1. Pemantapan wawasan dan ketahanan bangsa 2. Fasilitasi dan Operasional Tim KOMINDA 3. Pemantapan komunikasi dan konsolidasi pembauran bangsa bagi generasi muda 1. Peningkatan fungsi kontrol dan peran serta seluruh komponen masyarakat dalam mencegah dan menanggulangi maksiat dan penyakit masyarakat. 2. Pembinaan dan Sosialisasi tentang penyakit masyarakat dan upaya penanggulangannya terhadap generasi muda & anak sekolah. 3. Meningkatkan koordinasi antar pemerintah dan masyarakat dalam pencegahan, penanganan dan pemberantasan perbuatan Maksiat dan Penyakit Masyarakat. 4. Fasilitasi dan operasional Badan Narkotika Daerah (BND) 5. Penegakan sanksi hukum positif & hukum adat terhadap pelaku. 1. Penyiapan sistem informasi dan peta daerah rawan bencana alam. 2. Penyiapan kelembagaan/satuan pelaksana penanganan bencana alam. 3. Penyediaan peralatan pendukung mitigasi dan penanganan bencana alam. 4. Peningkatan kapasitas personil dan lembaga untuk penanganan kondisi bencana alam. 5. Pemberdayaan masyarakat yang bermukim di kawasan rawan bencana; 6. Meningkatkan pengetahuan dan pemahaman masyarakat tentang pencegahan dan penanggulangan bencana 7. Pengendalian banjir dan pengamanan sungai; 8. Peningkatan penanganan pasca bencana.
--	---	---	--

MATRIK INDIKASI RENCANA PROGRAM PRIORITAS

Misi : Mewujudkan Masyarakat yang Produktif dan memiliki ekonomi yang tangguh.

FUNGSI : EKONOMI

Kebijakan	Sasaran Kebijakan	Program	Indikasi Kegiatan
<u>Revitalisasi Pertanian dan Pengembangan Agroindustri</u> 1. Membangun sistem ketahanan ketahanan pangan (hewani dan nabati) lokal dalam konteks peningkatan kemampuan produksi, distribusi, dan konsumsi.	Meningkatnya produksi, ketersediaan, dan konsumsi (daya beli masyarakat) terhadap bahan pangan dan protein yang bersumber dari ternak dan ikan.	Peningkatan Ketahanan Pangan	1. Pengembangan kelembagaan ketahanan pangan tingkat kabupaten dan nagari yang mempunyai fungsi penyediaan dan pengelolaan cadangan, penanganan kondisi rawan pangan, dan perdagangan bahan pangan. 2. Peningkatan distribusi pangan yang menjamin keterjangkauan masyarakat atas pangan. 3. Pengamanan ketersediaan pangan melalui pengendalian hama penyakit, pengamanan lahan sawah di daerah irigasi, peningkatan mutu intensifikasi serta optimalisasi dan perluasan areal pertanian. 4. Peningkatan paska panen dan pengolahan hasil untuk menurunkan kehilangan hasil (looses). 5. Peningkatan kesadaran masyarakat akan perlunya konsumsi pangan dan protein yang cukup untuk hidup sehat dan aktif. 6. Pencegahan dan penanggulangan masalah pangan melalui peningkatan bantuan pangan kepada keluarga miskin dan rawan pangan. 7. Diversifikasi pangan melalui peningkatan ketersediaan pangan hewani, buah dan sayuran, rekayasa sosial pola konsumsi masyarakat.
2. Merevitalisasi sistem kelembagaan dan pendekatan penyuluhan dan pendampingan pertanian, serta meningkatkan kemampuan / kualitas SDM pelaku usaha pertanian sehingga handal dalam pelaksanaan usaha dan mampu bersaing.	Tersedianya sistem dan kelembagaan penyuluhan pertanian yang	Revitalisasi Kelembagaan dan Sistem Penyuluhan Pertanian.	1. Revitalisasi sistem penyuluhan berkaitan dengan produksi pangan, perkebunan, peternakan dan perikanan, termasuk peningkatan kapasitas petani, penyuluh dan aparat pembina 2. Pengembangan sistem transfer teknologi (penyuluhan pertanian) yang bersifat demand-driven dan kompetitif untuk mendukung upaya perluasan basis produksi pertanian segar dan bahan baku agroindustri. 3. Penumbuhan dan penguatan lembaga pertanian ditingkat nagari/ jorong untuk meningkatkan posisi tawar petani. 4. Pendidikan dan pelatihan sumber daya manusia pertanian

3. Mengembangkan agribisnis dan agroindustri pada kawasan-kawasan sentra produksi yang dapat meningkatkan akses petani terhadap sumberdaya ekonomi produktif, serta memperkuat sistem pemasaran dan manajemen usaha untuk mengelola resiko usaha pertanian dan mendukung pengembangan agroindustri pedesaan.	Meningkatnya nilai tambah dan daya saing produk pertanian tanaman pangan dan hortikultura, perkebunan, peternakan, dan perikanan melalui pengembangan agroindustri, serta tersedianya sentra-sentra produksi pertanian.	Pengembangan Agribisnis dan Kawasan Sentra Produksi.	1. Pengembangan kawasan penghasil dan peningkatan produksi produk segar/bahan baku pertanian. 2. Peningkatan nilai tambah produk pertanian melalui peningkatan paska panen, mutu, pengolahan hasil dan pemasaran. 3. Peningkatan mutu perbenihan/ perbibitan pertanian yang bersertifikasi. 4. Peningkatan investasi dan pengembangan industri pendukung (industri penghasil bahan packing, peralatan, mesin, dll) 5. Pembangunan infrastruktur irigasi, jalan usaha tani, pasar produk pertanian, telekomunikasi, dll yang diperlukan untuk mendukung pengembangan kawasan/wilayah sentra produksi dan cluster agroindustri. 6. Pengembangan diversifikasi usaha tani, melalui pengembangan usaha tani dengan komoditas bernilai tinggi. 7. Pengembangan lembaga keuangan dan sumber daya produktif yang dapat memberikan dukungan permodalan bagi pelaku usaha agroindustri pedesaan.
4. Membangun dan merumuskan model kemitraan yang saling menguntungkan antara petani dan swasta dalam rangka optimalisasai pertumbuhan sektor pertanian	Terbangunnya model kemitraan yang saling menguntungkan antara petani dan swasta dalam rangka optimalisasai pertumbuhan sektor pertanian.	Pengembangan Kemitraan Pertanian	1. Membuat produk hukum yang akan menjadi dasar pelaksanaan model kemitraan dalam optimalisasi pemanfaatan potensi pertumbuhan di sektor pertanian. 2. Pengembangan kerjasama/kemitraan yang saling menguntungkan antara pelaku UMK pertanian dan swasta.
5. Mengembangkan usaha pertanian yang ramah lingkungan serta mengelola sumberdaya lahan dan air dengan mengacu kepada prinsip-prinsip pengelolaan terpadu dan berkelanjutan.	Diterapkannya praktek-praktek pertanian organik (ramah lingkungan) yang dapat menghasilkan komoditas yang bebas pestisida, serta meningkatnya kemampuan petani dalam mengelola sumberdaya lahan dan air secara berkelanjutan.	Pengembangan Usaha Pertanian Ramah Lingkungan	1. Pengembangan usaha pertanian ramah lingkungan untuk menghasilkan produk pertanian bebas pestisida 2. Pengelolaan sumber daya lahan dan air secara terintegrasi dan berkelanjutan.
<u>Pengembangan Industri.</u> 1. Mengembangkan industri kecil/ rumah tangga yang mengolah bahan-bahan baku lokal yang banyak menyerap tenaga kerja, pengolahan produk-produk pertanian, meningkatkan daya saing industri dalam rangka meningkatkan peran dan kontribusi industri terhadap pertumbuhan ekonomi daerah.	Meningkatnya daya saing produk industri kecil/ rumah tangga yang mengolah bahan-bahan lokal, produk-produk pertanian dan meningkatnya kontribusi sektor industri dalam Produk Domestik Regional Bruto	Pengembangan Industri Kecil/ Rumah Tangga.	1. Meningkatkan penggunaan teknologi tepat guna untuk memacu tingkat produksi industri agar beroperasi dengan lebih efisien dan menghasilkan produk yang bermutu. 2. Peningkatan daya saing industri sehingga akan mampu menghasilkan produk yang berkualitas tinggi dengan harga jual yang relatif murah. 3. Peningkatan intervensi langsung dan layanan publik

<u>Pengembangan Kelembagaan Ekonomi</u> 1. Pengembangan sistem dan kelembagaan pendukung pembinaan usaha kecil dan menengah dengan menetapkan pedoman dan mekanisme pembinaan yang dapat menciptakan keterpaduan antar instansi dan lembaga terkait. 2. Berkembangnya jiwa dan semangat kewirausahaan dan meningkatnya Peran kelembagaan UKM dan Koperasi agar dapat melakukan fasilitasi kegiatan organisasi dan perintisan pengembangan usaha, penguasaan dan penciptaan pasar dan sumber pembiayaan. <u>Peningkatan Investasi dan Pengembangan Kerjasama Antar Daerah</u> Menciptakan sistem, prosedur dan mekanisme investasi daerah yang mampu meningkatkan daya saing serta mendorong peningkatan investasi di daerah dalam upaya pengembangan investasi di daerah dengan mengedepankan prinsip kepastian hukum, deregulasi, simplifikasi, dan efisiensi baik biaya maupun waktu.	Terciptanya sistem dan kelembagaan yang kuat dalam rangka pemberdayaan pelaku usaha, baik koperasi, usaha mikro, kecil dan menengah. Meningkatnya peran dan kualitas Koperasi dan UKM untuk dapat mendorong peningkatan pemanfaatan teknologi, perbaikan manajemen usaha, akses pasar produk dan akses ke sumber modal Terwujudnya iklim investasi yang kondusif dan sehat dengan reformasi kelembagaan di berbagai-bagai tingkatan instansi yang mampu mengurangi praktik ekonomi biaya tinggi.	Penataan Sistem dan Kelembagaan Usaha Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Pemberdayaan Usaha Kecil dan Menengah dan Koperasi. Peningkatan Iklim Investasi	terhadap masyarakat pelaku industri dalam rangka pemecahan permasalahan-permasalahan yang muncul dalam kegiatan produksi 4. Peningkatan teknologi untuk melakukan desain produk dan kemasan produk industri. 5. Pengembangan industri pertanian, dan perkebunan yang dilengkapi dengan berbagai prasarana yang dibutuhkan oleh pelaku industri. 1. Regulasi peraturan-peraturan yang menghambat perkembangan pelaku usaha 2. Pembuatan sistem pembinaan yang dituangkan dalam bentuk Peraturan Daerah atau Peraturan Bupati. 3. Pembinaan dan fasilitasi tumbuhnya kelompok usaha atau asosiasi yang dapat meningkatkan akses pasar 4. Mendorong berdirinya lembaga keuangan pedesaan seperti Usaha Simpan Pinjam, Badan Kredit Pedesaan, Bank Perkreditan Rakyat dan lain sebagainya 1. Pemasyarakatan kewirausahaan dan fasilitasi serta pemberian dukungan serta kemudahan terhadap pelaku usaha/ wirausaha baru. 2. Pelatihan, bimbingan magang, pembinaan lapangan terhadap aparatur pembina dan pelaku usaha. 3. Pembinaan dan fasilitasi tumbuhnya kelompok-kelompok usaha yang tangguh dalam kegiatan produksi (kelompok tani, kelompok industri kecil dan kerajinan, dll). 1. Penyediaan kemudahan perizinan dan pembinaan. 2. Penyediaan skim-skim pembiayaan alternatif seperti sistim bagi hasil dana bergulir, sistim tanggung renteng, dll. 3. Penyelenggaraan pelatihan kewirausahaan dan bimbingan tekhnis manajemen usaha 4. Penyediaan infrastruktur dan jaringan pendukung usaha serta kemitraan usaha 5. Peningkatan Administrasi dan Pengawasan Badan Hukum 1. Pembuatan Peraturan Daerah yang mampu mendorong perkembangan dan peningkatan investasi di daerah. 2. Penyederhanaan prosedur pelayanan penanaman modal dan pemberian insentif yang menarik bagi penanaman modal, 3. Koordinasi perencanaan investasi dengan daerah kabupaten tetangga.
---	---	--	---

1. Mengembangkan sarana prasarana pendukung dalam penanaman investasi, serta memperkuat koordinasi antar instansi yang terkait dalam pelayanan dan perizinan penanaman modal untuk terciptanya investasi yang lancar dan aman.	Meningkatnya investasi, sehingga mampu memberikan konstribusi yang sesuai dengan target tingkat pertumbuhan daerah.	Peningkatan Kerjasama Investasi./ Penanaman Modal.	4. Pengawasan (pemantauan, dan evaluasi) dan pengendalian pelaksanaan investasi baik PMA maupun PMDN, 5. Pemantapan kelembagaan penanaman modal dan pengembangan sistim informasi investasi. 6. Penyusunan profil investasi daerah menurut potensi sumber daya untuk menentukan peluang dan prioritas investasi di daerah Kabupaten Dharmasraya.
<u>Pembangunan Infra Struktur Transportasi</u> 1. Pemeliharaan, Pengembangan dan peningkatan prasarana jalan dalam rangka mempertahankan sistim jaringan jalan dan meningkatkan aksesibilitas antar wilayah yang diperlukan untuk pengembangan perekonomian daerah dan pelayanan masyarakat.	Terpeliharanya dan meningkatnya daya dukung, kapasitas, maupun kualitas pelayanan prasarana jalan, serta meningkatnya aksesibilitas wilayah yang sedang dan belum berkembang dalam kerangka pengembangan ekonomi wilayah.	Rehabilitasi/ Pemeliharaan jalan dan Jembatan	1. Penyiapan sarana dan prasarana daerah untuk mendorong investasi, 2. Fasilitasi kerjasama strategis antara perusahaan besar (PMA & PMDN) dengan UKMK, 3. Mendorong peningkatan koordinasi dan kerjasama antara instansi pemerintah dengan dunia usaha dalam upaya peningkatan investasi di daerah. 4. Penataan Pola Kerjasama Investasi yang produktif. 5. Pengembangan kerjasama investasi antara perusahaan yang berlokasi di perkotaan dengan usaha yang ada di pedesaan/kenagarian,
1. Meningkatkan Sarana dan Prasarana Angkutan Jalan Raya dalam rangka peningkatan keselamatan lalu lintas, kenyamanan pengguna jalan serta melakukan penataan sistem jaringan angkutan jalan dan manajemen lalu lintas,.	Tersedianya Sarana dan Prasarana Angkutan Jalan Raya untuk peningkatan keselamatan lalu lintas, kenyamanan pengguna jalan serta tertatanya sistem jaringan angkutan jalan dan manajemen lalu lintas,.	Peningkatan/ Pembangunan Jalan dan Jembatan Pembangunan dan Peningkatan Prasarana Lalu Lintas Jalan Raya	1. Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rutin Jalan kabupaten 2. Rehabilitasi dan Pemeliharaan Periodik Jalan Kabupaten 3. Pengadaan alat-alat berat pemelihara jalan 1. Peningkatan dan Pembangunan Ruas Jalan dan Jembatan Kabupaten 2. Pebangunandan Peningkatan ruas jalan terutama ke daerah terpencil 3. Peningkatan peran swasta di dalam penyediaan sarana dan prasarana transportasi 1. Peningkatan sarana prasarana penunjang pengamanan lalu lintas 2. Pembangunan Terminal 3. Peningkatan profesionalisme petugas pengatur lalu lintas 4. Pengembangan Master Plan sistem dan jaringan transportasi.

<u>Pembangunan Sumber Daya Air</u> 1. Pendaya gunaan sumber daya air untuk pemenuhan kebutuhan air baku untuk pemenuhan kebutuhan rumah tangga, permukiman, pertanian dan industri 2. Penanggulangan banjir, pengamanan sungai, terutama pada daerah yang berpenduduk padat dan wilayah strategis, <u>Pengembangan BUMD</u> 1. Mengupayakan pendirian Perusahaan Daerah dalam upaya meningkatkan PAD, dan mendorong perekonomian masyarakat, terutama pengusaha kecil, menengah, dan koperasi (corporate social responsibility). <u>Pembangunan Ketenagakerjaan</u> 1. Peningkatan kualitas keterampilan, kompetensi dan kemandirian tenaga kerja melalui pendidikan dan pelatihan tenaga kerja dan pengembangannya di tempat kerja	Tersedianya pola pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya air yang terpadu dan berkelanjutan serta meningkatnya fungsi jaringan irigasi dalam rangka mendukung peningkatan produksi pertanian. Meningkatnya keamanan masyarakat dari bahaya banjir. Tersedianya Perusahaan Daerah yang dapat memberikan kontribusi dalam peningkatan PAD dan dan mendorong perekonomian masyarakat. Meningkatnya kualitas dan produktifitas tenaga kerja melalui pelatihan dan pemagangan	Pengembangan, pengelolaan sumber air baku. Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi Pengendalian banjir dan pengamanan sungai Pengembangan BUMD Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja.	1. Penatagunaan sumber daya air. 2. Penyelenggaraan konservasi air tanah pada wilayah kritis air. 3. Pembangunan waduk, embung dan sarana penampung air lainnya. 4. Penyediaan, pengelolaan dan perlindungan sumber-sumber air baku; 1. Pemeliharaan dan Peningkatan jaringan Irigasi 2. Pembangunan baru Irigasi 3. Optimalisasi pemanfaatan lahan irigasi yang telah dikembangkan. 4. Pemberdayaan Petani Pemakai Air 1. Pemeliharaan dan perbaikan alur sungai 2. Pembangunan prasarana pengendali banjir dan pengamanan sungai terutama pada daerah rawan banjir 3. Melaksanakan reboisasi sepanjang daerah aliran sungai yang rawan banjir 1. Pendirian Perusahaan Daerah dalam upaya meningkatkan PAD. 2. Peningkatan peranan BUMD / Perusahaan Daerah dalam mendorong perekonomian masyarakat, terutama pengusaha kecil, menengah, dan koperasi (corporate social responsibility). 3. Peningkatan efisiensi dan efektifitas organisasi dan manajemen perusahaan daerah, serta membangun praktek yang sehat dalam pengelolaan perusahaan. 1. Peningkatan kualitas pendidikan menengah, terutama pendidikan menengah kejuruan yang sesuai dengan kebutuhan pasar kerja; 2. Pengembangan standar kompetensi kerja dan sistem sertifikasi kompetensi tenaga kerja; 3. Penguatan satuan pendidikan non formal yang meliputi lembaga kursus, pusat kegiatan belajar masyarakat dan satuan pendidikan yang sejenis; 4. Peningkatan profesionalisme tenaga pelatih dan instruktur latihan kerja;
---	--	--	--

2. Peningkatan perluasan kesempatan kerja, untuk mendorong kesempatan kerja pada industri padat karya, serta meningkatnya kualitas dokumen data dan informasi ketenagakerjaan, melalui sistem terpadu dan sinergi antar instansi terkait. 3. Peningkatan sistem jaminan sosial tenaga kerja untuk mendapatkan perlindungan keamanan dan keselamatan kerja <u>Pembangunan Pertambangan dan Energi.</u> Optimalisasi pemanfaatan sumber daya mineral, batubara melalui usaha pertambangan dengan prinsip good mining practice, serta menjamin kepastian hukum melalui penyerasian aturan dan penegakan hukum secara konsekwen. Meningkatkan pemerataan pemenuhan kebutuhan energi dan listrik ke daerah daerah terpencil, serta mendorong tumbuh dan berkembangnya upaya penggunaan energi alternatif..	Menurunnya Tingkat Angka Pengangguran (TAP) dan Tingkat Setengah Pengangguran (TSP), serta berkurangnya jumlah penduduk miskin, serta tertatanya sistem informasi dan penyaluran tenaga kerja secara baik Terciptanya hubungan yang harmonis antara pekerja dan pengusaha 1. Meningkatnya eksplorasi dan eksploitasi sumber daya mineral dan batubara, serta terjaminnya kepastian hukum melalui penyerasian aturan dan penegakan hukum secara konsisten. Terpenuhinya kebutuhan energi dan listrik bagi masyarakat terutama di pedesaan dan terwujudnya penggunaan energi alternatif	Perluasan dan Pengembangan Kesempatan Kerja Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Tenaga Kerja. Pengelolaan dan Pengendalian Usaha Pertambangan Pengembangan Energi dan ketenagalistrikan.	5. Penyusunan standar latihan; dan 6. Peningkatan sarana dan prasarana latihan kerja. 1. Penyusunan dan penyempurnaan peraturan ketenagakerjaan; 2. Peningkatan pembinaan dan pengawasan tenaga kerja; 3. Penyusunan data tenaga kerja dan informasi pasar kerja; dan 4. Pengembangan manajemen usaha mandiri dan produktivitas kerja. 1. perlindungan dan penyelesaian perselisihan ketenagakerjaan, 2. Pembentukan dan pengoptimalan fungsi lembaga tenaga kerja; 3. Peningkatan sosialisasi hubungan industrial yang harmonis dan berkeadilan; dan 4. Peningkatan penegakan hukum, standar upah, dan kesejahteraan serta perlindungan tenaga kerja. 1. Penyusunan regulasi, pedoman teknis, dan standar pertambangan mineral dan batubara. 2. Pembinaan dan pengawasan kegiatan penambangan. 3. Pengawasan produksi, pemasaran dan pengelolaan mineral dan batubara. 4. Evaluasi perencanaan produksi dan pemasaran mineral dan batubara, serta program pengembangan masyarakat di wilayah pertambangan. 5. Pembinaan, evaluasi, pengawasan dan penertiban pertambangan rakyat yang berpotensi mencemari lingkungan, termasuk PETI. 6. Pemulihan lingkungan pasca tambang dan penerapan kebijakan produksi dan pengelolaan pasca tambang yang berwawasan lingkungan. 7. Penyelidikan umum potensi pertambangan serta pemetaan geologi dan geohidrologi 1. Perluasan cakupan pelayanan energi listrik 2. Pengendalian pengembangan jaringan distribusi listrik. 3. Peningkatan Pengelolaan Usaha Ketenagalistrikan dan Air Bawah Tanah 4. Pembangunan Jaringan Listrik di pedesaan yang tidak terjangkau listrik PLN
---	---	--	---

			5. Koordinasi Penanggulangan penyalahgunaan BBM dan kerusakan instalasi listrik PLN 6. Inventarisasi dan pemetaan sumber ketenagalistrikan dan air tanah 7. Pengembangan penggunaan energi alternatif sebagai energi tepat guna
--	--	--	--

MATRIK INDIKASI RENCANA PROGRAM PRIORITAS

Misi : Mewujudkan Masyarakat yang sehat dalam Lingkungan yang Bersih, Aman dan Nyaman.

FUNGSI : KESEHATAN

Kebijakan	Sasaran Kebijakan	Program	Indikasi Kegiatan
<u>Pemerataan dan Peningkatan Kualitas Pelayanan Kesehatan</u> Meningkatkan jumlah, jaringan dan kualitas puskesmas; Meningkatkan kualitas dan kuantitas tenaga kesehatan; Mengembangkan sistem jamian kesehatan terutama bagi penduduk miskin; Meningkatkan sosialisasi kesehatan lingkungan dan pola hidup sehat; Meningkatkan pendidikan kesehatan pada masyarakat sejak usia dini; dan Meningkatkan pemerataan dan Meningkatkan kualitas fasilitas kesehatan dasar.	Meningkatnya pengetahuan individu, keluarga, dan masyarakat agar mampu menumbuhkan prilaku hidup sehat dan mengembangkan upaya kesehatan bersumber masyarakat.	Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat.	1. Pemantapan media promosi kesehatan dan teknologi komunikasi, informasi, dan edukasi (KIE) 2. pemantapan upaya kesehatan bersumber masyarakat (seperti Posyandu, pondok bersalin desa, dan UKS) dan generasi muda; dan 3. Meningkatkan pendidikan kesehatan masyarakat.
	Terwujudnya mutu lingkungan hidup yang lebih sehat melalui pengembangan sistem kesehatan kewilayahan untuk menggerakkan pembangunan lintas-sektor berwawasan kesehatan.	Pengembangan Lingkungan Sehat	1. Penyediaan sarana air bersih dan sanitasi dasar 2. Pemeliharaan dan pengawasan kualitas lingkungan 3. Peningkatan kewaspadaan dini dalam penanggulangan KLB 4. Pengendalian dampak resiko pencemaran lingkungan 5. Pemantapan model kesehatan lingkungan kabupaten sehat
	Meningkatkan jumlah, pemerataan, dan kualitas pelayanan kesehatan melalui puskesmas dan jaringannya meliputi puskesmas pembantu, puskesmas keliling dan bidan di desa.	Upaya Kesehatan Masyarakat	1. Pelayanan kesehatan penduduk miskin di puskesmas dan jaringannya 2. Pengadaan, peningkatan, dan perbaikan sarana dan prasarana puskesmas dan jaringannya 3. Pemantapan UKBK bagi kelompok potensial, Bintek dan evaluasi pelayanan kesehatan 4. Penyediaan bantuan/dukungan pada puskesmas berupa peralatan dan perbekalan kesehatan termasuk obat generik esential serta biaya operasional dan pemeliharaan. 5. Pembinaan pemberdayaan kesehatan masyarakat 6. Peningkatan pelayanan kesehatan dasar yang mencakup sekurang-kurangnya promosi kesehatan, kesehatan ibu dan anak, keluarga berencana, perbaikan gizi, kesehatan lingkungan, pemberantasan penyakit menular, dan pengobatan dasar

	Meningkatkan akses, keterjangkauan dan kualitas pelayanan kesehatan perorangan.	Pelayanan Kesehatan Perorangan	1. Pembangunan sarana dan prasarana rumah sakit. 2. Perbaikan sarana dan prasarana rumah sakit 3. Pengadaan obat dan perbekalan rumah sakit 4. Pemantapan pelayanan kesehatan rujukan 5. Pelayanan kesehatan bagi penduduk miskin di kelas III rumah sakit. 6. Melakukan advokasi dan sosialisasi kebijakan upaya kesehatan perorangan 7. Melakukan kajian dan monev terhadap kegiatan kesehatan perorangan 8. Penyediaan biaya operasional dan pemeliharaan 9. Peningkatan peran serta sektor swasta dalam upaya kesehatan perorangan
	menurunkan angka kesakitan, kematian, dan kecacatan akibat penyakit menular dan penyakit tidak menular	Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit	1. Pencegahan dan penanggulangan faktor risiko 2. Peningkatan mutu dan pelayanan imunisasi 3. Penemuan dan tata laksana penderita 4. Peningkatan surveilens epidemiologi dan penanggulangan wabah 5. Peningkatan komunikasi, informasi dan edukasi pencegahan dan pemberantasan penyakit
	Meningkatkan kesadaran gizi keluarga dalam upaya meningkatkan status gizi masyarakat terutama pada ibu hamil, bayi, dan anak balita	Perbaikan Gizi Masyarakat	1. Peningkatan SDM pengelola program gizi masyarakat 2. Penanggulangan kurang energi protein (KEP), anemia gizi besi, gangguan akibat kurang yodium (GAKY), kurang vitamin A, dan kekurangan zat gizi mikro lainnya 3. Penanggulangan gizi lebih 4. Peningkatan surveilens gizi 5. Pemberdayaan masyarakat untuk pencapaian keluarga sadar gizi 6. Pengadaan obat program gizi masyarakat 7. Peningkatan peranserta kelompok potensial dalam meningkatkan status gizi masyarakat
	Meningkatkan jumlah, mutu dan penyebaran tenaga kesehatan, sesuai dengan kebutuhan pembangunan kesehatan.	Peningkatan Sumber Daya Kesehatan	1. Perencanaan kebutuhan tenaga kesehatan 2. Peningkatan keterampilan dan profesionalisme tenaga kesehatan melalui pendidikan dan pelatihan tenaga kesehatan 3. Pemenuhan kebutuhan tenaga kesehatan, terutama untuk pelayanan kesehatan di puskesmas dan jaringannya, serta rumah sakit kabupaten 4. Pembinaan tenaga kesehatan termasuk pengembangan karir tenaga kesehatan

		Terjaminnya ketersediaan, pemerataan, mutu, keterjangkauan obat dan perbekalan kesehatan termasuk obat tradisional, perbekalan kesehatan rumah tangga, dan kosmetika.	Obat dan Pembekalan Kesehatan	5. Penyusunan standar kompetensi dan regulasi profesi kesehatan 6. Pemerataan penempatan tenaga kesehatan
		Terjaminnya terpenuhinya persyaratan mutu, keamanan dan kemanfaatan/ khasiat produk terapetik/ obat, perbekalan kesehatan rumah tangga, obat tradisional, kosmetika, produk komplemen dan produk pangan dalam rangka perlindungan konsumen/ masyarakat.	Pengawasan Obat dan Makanan	1. Peningkatan ketersediaan obat sangat esensial dan <i>butter stock</i> 2. Peningkatan kemampuan dan manajemen obat publik pada sarana pelayanan kesehatan dasar, sarana farmasi dan kesehatan lingkungan 3. Pembinaan dan pengendalian alat kesehatan dan perbekalan rumah tangga (PKRT) 4. Peningkatan keterjangkauan harga obat dan perbekalan kesehatan terutama untuk penduduk miskin 5. Peningkatan mutu pelayanan farmasi komunitas dan rumah sakit 6. Peningkatan kemampuan dan pemahaman masyarakat tentang bahaya penyalah-gunaan narkoba
		Tersedianya kebijakan dan manajemen pembangunan kesehatan guna mendukung penyelenggaraan sistem kesehatan.	Kebijakan dan Manajemen Pembangunan Kesehatan	1. Peningkatan pengawasan keamanan pangan dan bahan berbahaya. 2. Peningkatan pengawasan penyalahgunaan narkotika, psikotropika, zat adiktif (NAFZA) 3. Peningkatan pengawasan mutu, khasiat dan keamanan produk terapetik/ obat, perbekalan kesehatan rumah tangga, obat tradisional, suplemen makanan dan produk kosmetika.
	<u>Pembangunan Keluarga Berencana</u> 1. Mengendalikan tingkat kelahiran penduduk melalui upaya memaksimalkan akses dan kualitas pelayanan KB terutama bagi keluarga miskin dan rentan serta daerah terpencil.	1. Terkendalnya tingkat kelahiran penduduk dan meningkatnya keluarga kecil berkualitas.	Keluarga Berencana	1. Penyempurnaan penyusunan dan perencanaan sumber daya kesehatan 2. Peningkatan dan pemantapan sistim informasi kesehatan 3. Peningkatan kualitas perencanaan kesehatan, dan peningkatan sarana kesehatan 4. Pengembangan sistem perencanaan dan penganggaran, pelaksanaan dan pengendalian, pengawasan dan penyempurnaan administrasi keuangan, serta hukum kesehatan 1. Pengembangan kebijakan tentang pelayanan KB, KIE, peran serta masyarakat dalam KB dan kesehatan reproduksi

2. Meningkatkan pemahaman, pengetahuan, sikap dan perilaku positif remaja tentang kesehatan dan hak-hak produksi, guna meningkatkan derajat kesehatan reproduksinya dan mempersiapkan kehidupan berkeluarga dalam mendukung upaya peningkatan kualitas generasi mendatang 3. Meningkatkan pemberdayaan dan ketahanan keluarga dalam kemampuan pengasuhan dan penumbuhkembangan anak, peningkatan pendapatan keluarga pra sejahtera dan sejahtera I dan peningkatan kualitas lingkungan keluarga.	2. Meningkatnya kualitas kesehatan reproduksi remaja dalam rangka menyiapkan kehidupan berkeluarga yang lebih baik, serta pendewasaan usia perkawinan 3. Meningkatnya kesejahteraan dan ketahanan keluarga dengan memperhatikan kelompok usia penduduk berdasarkan siklus hidup, yaitu mulai dari janin dalam kandungan sampai dengan lanjut usia, dalam rangka membangun keluarga kecil yang berkualitas	Kesehatan Reproduksi Remaja Ketahanan dan Pemberdayaan Keluarga	2. Peningkatan akses dan kualitas pelayanan KB dan kesehatan reproduksi 3. Peningkatan penggunaan kontrasepsi yang efektif dan efisien. 4. Penyediaan alat, obat dan cara kontrasepsi dengan memprioritaskan keluarga miskin serta kelompok rentan lainnya. 5. Penyelenggaraan promosi dan pemenuhan hak-hak dan kesehatan reproduksi termasuk advokasi, komunikasi, informasi, edukasi dan konseling. 6. Pengembangan sistem pengelolaan dan peningkatan kemampuan tenaga lapangan KB. 1. Pengembangan kebijakan pelayanan kesehatan reproduksi remaja. 2. Penyelenggaraan promosi kesehatan produksi remaja, pemahaman dan pencegahan HIV/ AIDS, bahaya NAPZA 3. Pelayanan Advokasi, komunikasi, informasi, edukasi dan konseling bagi masyarakat, keluarga dan remaja. 4. Penguatan dukungan dan partisipasi masyarakat terhadap penyelenggaraan program kesehatan reproduksi remaja yang mandiri. 1. Pengembangan dan pementapan ketahanan dan pemberdayaan keluarga. 2. Penyelenggaraan advokasi, KIE, dan konseling bagi keluarga tentang pola asuh dan tumbuh kembang anak, kebutuhan dasar keluarga, akses terhadap sumber daya ekonomi dan peningkatan kualitas lingkungan keluarga. 3. Pengembangan pengetahuan dan keterampilan kewirausahaan melalui pelatihan teknis dan manajemen usaha terutama bagi keluarga miskin dalam kelompok UPPKS. 4. Pengembangan cakupan dan kualitas kelompok Bina Keluarga Balita, Remaja dan lanjut usia.
--	---	---	--

MATRIK INDIKASI RENCANA PROGRAM PRIORITAS

Misi : Mewujudkan Masyarakat yang Berpendidikan dan Menguasai Teknologi;

FUNGSI : PENDIDIKAN

Kebijakan	Sasaran Kebijakan	Program	Indikasi Kegiatan
<u>Pemerataan dan Peningkatan Kualitas Pendidikan</u> 1.Meningkatkan perluasan pendidikan anak usia dini dalam rangka membina, menumbuhkan dan mengembangkan seluruh potensi anak usia dini secara optimal agar memiliki kesiapan untuk memasuki jenjang pendidikan selanjutnya 2.Menyelenggarakan wajib belajar pendidikan dasar sembilan tahun untuk mewujudkan pemerataan pendidikan dasar yang bermutu, serta memberikan akses yang lebih besar kepada masyarakat tidak mampu, terisolir, penyandang kelainan fisik dan mental	Agar anak usia dini memiliki kesempatan tumbuh dan berkembang optimal sesuai dengan potensi yang dimilikinya dan tahap-tahap perkembangan atau tingkat usia mereka dan merupakan persiapan untuk mengikuti pendidikan jenjang sekolah dasar. Meningkatnya akses dan pemerataan pelayanan pendidikan dasar yang bermutu dan terjangkau baik melalui jalur formal maupun non formal yang mencakup SD termasuk SDLB, MI, Paket A serta SMP, MTs dan Paket B.	Pendidikan Anak Usia Dini Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun	1. Penyediaan sarana prasarana pendidikan dan optimalisasi sarana yang ada 2. Dukungan penyelenggaraan pendidikan seperti pendidik dan tenaga kependidikan, biaya operasional 3. Penumbuhan partisipasi masyarakat untuk penyelenggaraan pendidikan anak usia dini. 1. Penyediaan sarana dan prasarana pendidikan yang berkualitas (USB, RKB, Laboratorium, Perpustakaan, Buku Pelajaran dan peralatan peraga pendidikan). 2. Rehabilitasi dan revitalisasi sarana dan prasarana pendidikan yang rusak. 3. Penyediaan tenaga pendidik dan kependidikan secara lebih merata, bermutu, tepat lokasi terutama untuk daerah terpencil 4. Penyediaan dukungan biaya operasional pendidikan 5. Penyediaan alternatif layanan pendidikan dasar baik jalur formal maupun non formal untuk memenuhi kebutuhan, kondisi dan potensi anak termasuk anak dari keluarga miskin dan anak yang memiliki potensi kecerdasan dan bakat istimewa. 6. Peningkatan upaya penarikan kembali siswa putus sekolah yang tidak melanjutkan dan menurunkan angka putus sekolah 7. Menyediakan bantuan beasiswa bagi peserta didik berprestasi dan dari keluarga yang tidak mampu 8. Pengembangan kurikulum nasional dan lokal yang disesuaikan dengan perkembangan iptek, budaya dan seni termasuk pendidikan kecakapan hidup. 9. Pembinaan minat, bakat dan kreatifitas peserta didik. 10. Penerapan manajemen pendidikan berbasis sekolah yang berorientasi mutu;

3. Meningkatkan perluasan dan pemerataan pendidikan menengah jalur formal dan non formal baik umum maupun kejuruan untuk mengantisipasi meningkatnya lulusan SMP sebagai dampak keberhasilan program wajar, dan penyediaan tenaga kerja lulusan pendidikan menengah yang berkualitas dengan meningkatkan relevansi pendidikan menengah dengan kebutuhan tenaga kerja. 4. Menyelenggarakan pendidikan non formal yang bermutu untuk memberikan pelayanan pendidikan kepada warga masyarakat yang tidak mungkin terpenuhi kebutuhan pendidikannya melalui jalur formal.	Meningkatnya akses dan pemerataan pelayanan pendidikan menengah yang bermutu dan terjangkau bagi penduduk melalui jalur formal maupun non formal yang mencakup SMA, SMK, MA dan Paket C. Tersedianya layanan pendidikan sebagai pengganti, penambah dan atau pelengkap pendidikan formal guna mengembangkan potensi peserta didik dengan penekanan pada penguasaan pengetahuan dan keterampilan fungsional.	Pendidikan Menengah Pendidikan Non Formal	11. Penyediaan informasi pendidikan yang memadai 12. Peningkatan partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan 13. Pengembangan sistem evaluasi pendidikan yang akuntabel dan transparan bagi lembaga pendidikan dan peserta didik. 1. Penyediaan sarana dan prasarana pendidikan yang berkualitas (USB, RKB, Laboratorium, Perpustakaan, Buku Pelajaran dan peralatan peraga pendidikan). 2. Rehabilitasi dan revitalisasi sarana dan prasarana pendidikan yang rusak. 3. Penyediaan tenaga pendidik dan kependidikan secara lebih merata, bermutu, dan tepat lokasi. 4. Penyediaan dukungan biaya operasional pendidikan 5. Penyediaan alternatif layanan pendidikan menengah baik jalur formal maupun non formal untuk menampung kebutuhan penduduk miskin dan yang tinggal di wilayah terpencil. 6. Penataan bidang keahlian pada pendidikan menengah kejuruan yang disesuaikan dengan kebutuhan lapangan kerja, yang didukung dengan peningkatan kerjasama dengan dunia usaha dan dunia industri. 7. Menyediakan bantuan beasiswa bagi peserta didik berprestasi dan dari keluarga yang tidak mampu. 8. Pengembangan kurikulum nasional dan lokal, bahan ajar dan model pembelajaran yang mengacu standar nasional yang disesuaikan dengan perkembangan iptek, budaya dan seni termasuk pendidikan kecakapan hidup. 9. Pembinaan minat, bakat dan kreatifitas peserta didik. 10. Penerapan manajemen berbasis sekolah 11. Penyediaan informasi pendidikan yang memadai 12. Peningkatan partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan 13. Pengembangan sistem evaluasi pendidikan yang akuntabel dan transparan bagi lembaga pendidikan dan peserta didik. 1. Peningkatan intensifikasi perluasan akses dan kualitas penyelenggaraan pendidikan keaksaraan fungsional bagi penduduk butu aksara 2. Penguatan satuan-satuan pendidikan non formal meliputi lembaga kursus, kelompok belajar, pusat kegiatan belajar masyarakat, dll
---	---	---	---

5. Meningkatkan jumlah dan kualitas pendidik dan tenaga kependidikan dengan mempertimbangkan peningkatan jumlah peserta didik, ketepatan lokasi, serta meningkatkan kesejahteraan dan perlindungan hukum bagi pendidik. 6. Mengembangkan budaya baca, bahasa, sastra Indonesia dan daerah dalam masyarakat termasuk peserta didik dan masyarakat umum guna membangun masyarakat berpengetahuan, berbudaya, maju dan mandiri.	Meningkatnya kecukupan jumlah, kualitas, kompetensi dan profesionalisme pendidik pada satuan pendidikan formal dan non formal, negeri maupun swasta. Berkembangnya budaya baca, bahasa, sastra Indonesia dan daerah dalam masyarakat termasuk peserta didik dan masyarakat umum guna membangun masyarakat berpengetahuan, berbudaya, maju dan mandiri.	Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan. Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan	3. Penyediaan sarana prasarana pendidikan serta pendidik dan tenaga kependidikan 4. Pengembangan kurikulum, bahan ajar dan model pembelajaran pendidikan non formal yang mengacu pada standar nasional. 1. Peningkatan rasio pelayanan pendidik dan tenaga kependidikan 2. Peningkatan kualitas layanan pendidik melalui diklat untuk memiliki kualifikasi minimum dan sertifikasi. 3. Peningkatan kesejahteraan dan perlindungan hukum bagi pendidik dan tenaga kependidikan 1. Membangun dan meningkatkan kualitas layanan perpustakaan daerah 2. Mendorong tumbuhnya perpustakaan masyarakat 3. Peningkatan penggunaan teknologi informasi dan komunikasi untuk memperluas akses masyarakat terhadap bahan bacaan yang bermutu secara tepat waktu. 4. Peningkatan intensitas pelaksanaan kampanye dan promosi budaya baca.
--	--	--	--

MATRIK INDIKASI RENCANA PROGRAM PRIORITAS

Misi : Mewujudkan Masyarakat yang sehat dalam Lingkungan yang Bersih, Aman dan Nyaman.

FUNGSI : PERUMAHAN DAN FASILITAS UMUM

Kebijakan	Sasaran Kebijakan	Program	Indikasi Kegiatan
<u>Prasarana Perumahan dan Permukiman.</u> Meningkatkan penyediaan prasarana dan sarana dasar bagi kawasan rumah sederhana dan rumah sederhana sehat; Meningkatkan fasilitasi dan pemberdayaan masyarakat berpendapatan rendah dalam penyediaan lahan, sumber pembiayaan dan prasarana dan sarana lingkungan melalui pembangunan perumahan yang bertumpu pada masyarakat; Mengembangkan kredit mikro dan pola subsidi baru yang lebih tepat sasaran.	Terpenuhinya kebutuhan hunian bagi masyarakat melalui pasar primer yang sehat, efisien, akuntabel, tidak diskriminatif dan terjangkau oleh seluruh lapisan masyarakat yang didukung oleh sistem pembiayaan perumahan jangka panjang yang market friendly, efisien dan akuntabel, serta	Pembangunan Perumahan dan Pemberdayaan Komunitas Perumahan	1. Penyediaan prasarana dan sarana dasar bagi kawasan rumah sederhana sehat, termasuk perumahan PNS, TNI/Polri dan masyarakat berpendapatan rendah 2. Pembangunan rumah baru layak huni bagi masyarakat miskin yang belum memiliki rumah. 3. Pengembangan pola subsidi yang tepat sasaran, efisien dan efektif dalam pembangunan rumah sederhana sehat. 4. Fasilitasi dan stimulasi pembangunan perumahan swadaya yang berbasis pemberdayaan masyarakat 5. Fasilitasi dan bantuan teknis perbaikan rumah pada kawasan kumuh, desa tradisional dan desa eks transmigrasi. 6. Peningkatan kualitas lingkungan pada kawasan kumuh, desa tradisional dan desa eks transmigrasi. 7. Pengembangan dan peningkatan pemukiman dan sarana prasarana pendukung transmigrasi
Meningkatkan upaya perluasan cakupan pelayanan air minum dan pengelolaan limbah rumah tangga	Meningkatnya cakupan pelayanan air minum perpipaan untuk penduduk, serta Pengelolaan limbah rumah tangga.	Pembangunan Air Minum dan Pengelolaan Limbah	1. Penyiapan dan pengembangan sistem dan kelembagaan pengelolaan Air Minum dan pengelolaan limbah 2. Pengembangan sistem pelayanan air minum dan air limbah; 3. Penyediaan fasilitas dan jaringan air bersih yang memadai, baik dari segi kualitas maupun kuantitas dan terdistribusi secara merata, 4. Pengadaan sarana prasarana pengelolaan limbah rumah tangga. 5. Peningkatan kampanye publik, mediasi, dan fasilitasi kepada masyarakat mengenai perlunya perilaku hidup bersih dan sehat 6. Peningkatan peran sekolah dalam mendukung perilaku hidup bersih dan sehat

Meningkatkan upaya pelayanan persampahan dan drainase yang berkualitas, terjangkau, efisien menjangkau seluruh lapisan masyarakat, serta berwawasan lingkungan.	Meningkatnya volume sampah yang terangkut, meningkatnya kinerja pengelolaan TPA yang berwawasan lingkungan serta berkurangnya genangan air dengan meningkatnya fungsi saluran drainase dan terbebasnya saluran-saluran drainase dari sampah	Pembangunan Persampahan dan Drainase	7. Pengembangan peran masyarakat dalam menjaga kelestarian sumber air baku 1. Pengembangan master plan sistem drainase dan persampahan kabupaten 2. Peningkatan kesadaran masyarakat dan stake holders terhadap pentingnya pelayanan persampahan dan drainase. 3. Pembangunan sarana prasarana pengelolaan persampahan 4. Pembangunan jaringan drainase primer dan sekunder, peningkatan dan normalisasi saluran drainase. 5. Pengembangan teknologi tepat guna bidang persampahan dan drainase. 6. Penyiapan dan pengembangan sistem dan kelembagaan pengelolaan Persampahan dan Drainase 7. Pengembangan SDM pengelola persampahan dan drainase.
---	---	--------------------------------------	---

MATRIK INDIKASI RENCANA PROGRAM PRIORITAS

Misi : Mewujudkan Masyarakat Religius yang Bertaqwa kepada Tuhan yang Maha Esa, Rukun Penuh Kedamaian, Berbudaya serta didukung oleh Supremasi Hukum dan Stabilitas Politik yang Handal;

FUNGSI : PARIWISATA DAN BUDAYA

Kebijakan	Sasaran Kebijakan	Program	Indikasi Kegiatan
<u>Pengembangan Pariwisata</u> Pengembangan Objek-objek wisata potensial di daerah, peningkatan partisipasi masyarakat pelaku usaha pariwisata dalam membangun dan mengembangkan kepariwisataan, dan meningkatkan atraksi-atraksi wisata yang berkaitan dengan seni dan budaya daerah, serta atraksi anak nagari. <u>Peningkatan Kualitas Pemuda</u> Meningkatkan partisipasi pemuda dan mewujudkan keserasian kebijakan pemuda di berbagai bidang pembangunan, meningkatkan potensi pemuda dalam kewirausahaan, kepeloporan dan kepemimpinan. <u>Pengembangan Kebijakan dan Manajemen Olah Raga.</u> Meningkatkan akses dan partisipasi masyarakat secara luas dan merata untuk meningkatkan kesehatan dan kebugaran jasmani, mengembangkan kebijakan dan manajemen olahraga dalam upaya mewujudkan penataan sistem pembinaan dan pengembangan olahraga secara terpadu dan berkelanjutan.	Terwujudnya perencanaan kawasan wisata terpadu yang lengkap untuk lima tahun yang akan datang, meningkatnya kunjungan wisatawan dan meningkatnya pendapatan masyarakat yang tinggal pada lingkungan objek pariwisata. Meningkatnya kualitas pemuda sebagai insan pelopor penggerak pembangunan, SDM yang mampu menghadapi berbagai tantangan dan memanfaatkan peluang untuk berperan serta dalam pembangunan, serta terwujudnya keserasian berbagai kebijakan pembangunan bidang pemuda. Meningkatnya budaya olahraga, kesehatan jasmani, mental dan rohani bagi pemuda, masyarakat dan pelajar; meningkatnya upaya pemanduan bakat dan pembibitan olahraga serta pencapaian prestasi olahraga untuk meningkatkan citra daerah.	Pengembangan Pariwisata. Pengembangan Partisipasi dan Potensi Pemuda Pembangunan Olahraga	1. Pengembangan Rencana Induk Pengembangan Pariwisata 2. Pembangunan dan Pengembangan Objek Wisata, 3. Pembangunan Sarana dan prasarana penunjang wisata 4. Pengembangan iven-iven pariwisata. 5. Pembangunan masyarakat sadar wisata. 6. Pengembangan sistem informasi kepariwisataan yang efisien dan efektif. 7. Mendorong pertumbuhan dan perkembangan investasi dalam industri pariwisata. 8. Peningkatan kemampuan aparatur pengelola pariwisata. 1. Pengembangan kemitraan pemerintah dan masyarakat dalam pembangunan kepemudaan. 2. Peningkatan peran serta pemuda dalam kegiatan pembangunan 3. Peningkatan wawasan dan sikap mental pemuda dalam pembangunan 4. Peningkatan kreativitas, inovasi pemuda sebagai wadah penyaluran minat dan bakat dan mewujudkan kemandirian. 5. Peningkatan sarana dan prasarana pembangunan kepemudaan. 6. Peningkatan advokasi dan penyelamatan pemuda dari bahaya NAFZA dan HIV/AIDS. 1. Pengembangan olahraga masal bagi generasi muda dan masyarakat. 2. Peningkatan pemanduan bakat dan pembibitan olahraga 3. Peningkatan prestasi olahraga 4. Pembinaan Manajemen Olahraga. 5. Peningkatan profesionalisme pelatih, manajer dan tenaga keolahragaan

<u>Pengembangan Kebudayaan</u> Pengembangan nilai budaya untuk meningkatkan pemahaman dan rasa kebanggaan terhadap nilai-nilai tradisional, seni dan budaya daerah, serta meningkatnya pelestarian dan pengembangan kekayaan budaya daerah	Meningkatnya apresiasi dan kecintaan masyarakat terhadap asset budaya daerah baik yang kasat mata maupun yang tidak kasat mata.	Pengelolaan Kekayaan Budaya	6. Pengembangan sistem penghargaan dan kesejahteraan bagi atlet, pelatih dan tenaga keolahragaan. 7. Dukungan pembangunan sarana dan prasarana olahraga. 8. Pembinaan kemitraan dan kewirausahaan pengembangan olahraga. 1. Pelestarian kekayaan budaya yang meliputi sejarah, kepurbakalaan dan benda cagar budaya. 2. Pengembangan sistem informasi dan database bidang kebudayaan. 3. Pengembangan kelembagaan dan kapasitas sdm pengelola kekayaan budaya. 4. Pengembangan peran serta masyarakat dan swasta dalam pengelolaan budaya. 5. Pengembangan pendidikan multikultural untuk meningkatkan toleransi dalam masyarakat. 6. Meningkatkan kecintaan masyarakat terhadap asset budaya daerah.
---	--	------------------------------------	---

MATRIK INDIKASI RENCANA PROGRAM PRIORITAS

Misi : Mewujudkan Masyarakat yang sehat dalam Lingkungan yang Bersih, Aman dan Nyaman.

FUNGSI : LINGKUNGAN HIDUP

Kebijakan	Sasaran Kebijakan	Program	Indikasi Kegiatan
<u>Pengelolaan Sumber Daya Alam</u> Memperbaiki sistem pengelolaan hutan dengan meningkatkan keterlibatan masyarakat secara langsung dan pengelolaan hutan, meningkatkan koordinasi dan penguatan kelembagaan dalam wilayah DAS,	Terwujudnya pemanfaatan potensi hutan secara lebih efisien, adil dan berkelanjutan dengan mewujudkan unit-unit pengelolaan hutan produksi lestari dan memenuhi kaidah Sustainable Forest Management (SMF) serta didukung oleh industri kehutanan yang kompetitif, serta terwujudnya dampak pemanfaatan SDA untuk kesejahteraan/kemakmuran dalam kaitan dengan pengentasan kemiskinan dan pembangunan ekonomi	Pemantapan Pemanfaatan potensi Sumber Daya Hutan	1. Penatagunaan hutan dan pengendalian alih fungsi dan status kawasan hutan. 2. Pengembangan hutan kemasyarakatan dan usaha perhutanan rakyat. 3. Pengembangan hasil hutan non kayu dan jasa lingkungan 4. Penetapan kawasan hutan dan kesatuan pengelolaan hutan 5. Pembinaan kelembagaan hutan produksi 6. Konservasi sumber daya hutan 7. Penerapan model pengelolaan sumberdaya alam terpadu (<i>integrated natural resources management</i>) dengan menetapkan unit kesatuan sumberdaya alam (seperti daerah aliran sungai/DAS sebagai basis pengelolaan dan pengembangan kelembagaan pendukung. 8. Pengembangan produk hukum untuk memberi basis bagi pelaksanaan sistem pengelolaan sumberdaya alam terpadu dengan partisipasi masyarakat. 9. Peningkatan kapasitas kelembagaan dan personil untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi-fungsi pengelolaan.
Meningkatkan pengawasan dan pengendalian pemanfaatan SDA Meningkatnya areal/ kawasan yang dilindungi serta meningkatkan pengawasan dan penegakan hukum.	Terwujudnya perlindungan sumber daya alam dari kerusakan dan terkelolanya kawasan konservasi yang sudah ada untuk menjamin kualitas ekosistem, agar fungsinya sebagai penyangga sistem kehidupan dapat terjaga dengan baik	Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam	1. Pengkajian dan perumusan model pengelolaan terpadu sumberdaya alam sesuai dengan kondisi fisik dan sosial budaya masyarakat. 2. Perlindungan sumber daya alam dari pemanfaatan yang eksploitatif dan tidak terkendali terutama di kawasan konservasi dan kawasan yang rentan terhadap kerusakan.

Meningkatkan pelaksanaan rehabilitasi dan pemulihan cadangan sumberdaya alam yang rusak/terdegradasi dan mengendalikan pencemaran dalam rangka memperbaiki kerusakan sumberdaya alam dan merehabilitasi ekosistem dan keanekaragaman hayati yang rusak. Mengembangkan sistem informasi sumberdaya alam untuk mendukung pengambilan keputusan dan mitigasi bencana (banjir, kekeringan, longsor, gempa bumi, tsunami dan bencana alam lainnya) dan pengendalian daya rusak air. Meningkatkan Kualitas lingkungan hidup dalam upaya mencegah perusakan dan atau pencemaran lingkungan hidup baik di darat, air / sungai atau udara sehingga masyarakat memperoleh kualitas lingkungan hidup yang bersih dan sehat.	Terjaganya kondisi fisik sumberdaya alam pada tingkat yang dapat memberikan manfaat dalam jangka panjang yang ditunjukkan oleh semakin menguatnya basis sumberdaya dan semakin berkurangnya tingkat kerusakan sumberdaya alam yang dapat menurunkan manfaat atau menimbulkan bencana. Meningkatnya penyebaran data dan informasi lingkungan, termasuk informasi wilayah-wilayah rentan dan rawan bencana lingkungan dan informasi kewaspadaan dini terhadap bencana. Meningkatnya Kualitas lingkungan hidup dengan terkendalinya perusakan dan atau pencemaran lingkungan hidup baik di darat, air / sungai atau udara sehingga masyarakat memperoleh kualitas lingkungan hidup yang bersih dan sehat.	Rehabilitasi dan Pemulihan Cadangan Sumber Daya Alam Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup. Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup	3. Pengembangan koordinasi pengelolaan DAS terpadu. 4. Pengembangan kemitraan dengan Perguruan Tinggi, masyarakat setempat, LSM, Legislatif dan dunia usaha dalam perlindungan dan pelestarian sumber daya alam. 5. Peningkatan pemberdayaan masyarakat dan dunia usaha dalam perlindungan SDA. 1. Penetapan wilayah prioritas rehabilitasi hutan dan lahan 2. Peningkatan kapasitas kelembagaan, sarana dan prasarana rehabilitasi hutan dan lahan. 3. Peningkatan efektivitas reboisasi yang dilaksanakan secara terpadu 4. Pengkayaan atau restocking sumber daya pertanian dan perikanan. 5. Rehabilitasi daerah hulu untuk menjamin pasokan air irigasi pertanian dan mencegah terjadinya erosi dan sedimentasi di wilayah sungai. 1. Penyusunan data sumber daya alam baik data potensi maupun data daya dukung kawasan ekosistem. 2. Penyusunan neraca sumber daya alam dan neraca lingkungan hidup. 3. Penyusunan data potensi sumber daya hutan dan neraca sumber daya hutan. 4. Pendataan dan penyelesaian tata batas hutan dan kawasan perbatasan dengan daerah tetangga. 1. Pemantauan kualitas air tanah dan air permukaan terutama pada daerah pemukiman, kawasan industri. 2. Pengawasan penataan baku mutu air limbah, emisi gas buang dan pengelolaan limbah B3 (Bahan Berbahaya Beracun) dari sumber institusi dan non institusi. 3. Pembangunan/ peningkatan sarana prasarana labor lingkungan
---	---	--	---

<u>Penataan Ruang & Pertanahan</u> Mewujudkan penataan ruang yang efisien dan terarah sehingga mampu menciptakan keuntungan lokasi yang dapat merangsang investasi dan menciptakan kondisi lingkungan hidup yang sehat serta mewujudkan pertumbuhan ekonomi yang optimal dan merata melalui pengaturan ruang dan interaksi kegiatan sosial ekonomi antar wilayah	Terkendalnya pemanfaatan ruang yang efektif dengan menerapkan prinsip pembangunan berkelanjutan dan keseimbangan pembangunan antar fungsi, meningkatnya partisipasi masyarakat dalam pengendalian pemanfaatan ruang serta berfungsi/ berperannya BKPRD.	Penataan Ruang	4. Penyusunan regulasi dalam pengendalian pencemaran dan perusakan lingkungan hidup, pedoman teknis, baku mutu lingkungan hidup 5. Penyelesaian kasus pencemaran dan perusakan lingkungan hidup. 6. Pengembangan penggunaan teknologi ramah lingkungan dalam pengelolaan SDA, limbah dan teknologi industri. 7. Peningkatan produksi dan penggunaan pupuk kompos 8. Peningkatan peran masyarakat dan sektor informal dalam upaya pengendalian pencemaran dan perusakan LH 9. Peningkatan pengelolaan dan sarana prasarana persampahan. 1. Penyusunan rencana tata ruang yang memperhatikan ketentuan perundangan, Norma Standar Pedoman dan Manual, dan melihat keterpaduan antar wilayah secara fungsional. 2. Pelaksanaan sosialisasi Rencana Tata Ruang secara komprehensif kepada masyarakat untuk menciptakan penyamaan persepsi dalam mengimplementasikannya. 3. Penetapan rencana tata ruang wilayah kabupaten yang memperjelas status peruntukan sehingga pengelolaan untuk masing-masing peruntukan dapat dilakukan dengan efektif, efisien dan berkeadilan. 4. Menyediakan rencana tata ruang yang lebih terinci pada kawasan fungsional seperti kawasan pariwisata, kawasan wilayah tertinggal, kawasan cepat tumbuh, kawasan andalan, kawasan pertambangan, kawasan perbatasan dan kawasan lainnya. 5. Memberikan penyuluhan dan sosialisasi secara intensif kepada masyarakat tentang pentingnya tata ruang untuk selalu dipedomani dalam berbagai kegiatan pembangunan yang dilakukan. 6. Pengendalian pemanfaatan ruang untuk menjamin kesesuaian rencana dengan pelaksanaan,
---	--	-----------------------	---

Mengembangkan sistem pengelolaan dan administrasi pertanahan yang transparan, terpadu, efektif dan efisien; Meningkatkan kepastian hukum hak atas tanah kepada masyarakat; Melakukan penataan kembali penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah secara berkelanjutan sesuai dengan RTRW.	Meningkatnya tertib pelayanan administrasi pertanahan, meningkatnya kepastian hukum dan hak atas tanah serta tertatanya kembali penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah secara berkelanjutan sesuai dengan RTRW.	Pengelolaan Pertanahan	penerapan prinsip pembangunan berkelanjutan, dan peningkatan keseimbangan pembangunan antar fungsi melalui peningkatan fungsi koordinasi BKPRD di Kabupaten 1. Pembangunan sistem pendaftaran tanah yang efisien dan transparan 2. Penataan penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah yang berkeadilan, berkelanjutan dan menjunjung supremasi hukum dengan mengacu kepada rencana tata ruang wilayah dan kepentingan rakyat. 3. Peningkatan kualitas dan kapasitas kelembagaan dan SDM pertanahan. 4. Penegakan hukum pertanahan yang adil dan transparan untuk meningkatkan kepastian hukum hak atas tanah kepada masyarakat 5. Pengembangan sistem informasi pertanahan yang handal dalam rangka peningkatan koordinasi, pelayanan dan pengelolaan pertanahan.
---	---	-------------------------------	--

MATRIK INDIKASI RENCANA PROGRAM PRIORITAS

Misi : Mewujudkan Masyarakat Religius yang Bertaqwa kepada Tuhan yang Maha Esa, Rukun Penuh Kedamaian, Berbudaya serta didukung oleh Supremasi Hukum dan Stabilitas Politik yang Handal;

FUNGSI : PERLINDUNGAN SOSIAL

Kebijakan	Sasaran Kebijakan	Program	Indikasi Kegiatan
<u>Peningkatan Kualitas Pemahaman dan Pengamalan Ajaran Agama</u> Meningkatkan pemahaman, penghayatan, pengamalan dan pengembangan nilai-nilai agama bagi setiap individu, keluarga, masyarakat dan penyelenggara pemerintahan	Meningkatnya kualitas pemahaman, penghayatan dan pengamalan ajaran agama dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara	Peningkatan pemahaman, penghayatan, pengamalan dan pengembangan nilai-nilai keagamaan	1. Penyuluhan dan bimbingan keagamaan bagi masyarakat dan aparatur pemerintah. 2. Penyelenggaraan Musabaqah Tilawatil Qur'an. 3. Peningkatan kerjasama secara terpadu untuk memberantas pornografi, pornoaksi, KKN, Penyalahgunaan Narkoba, perjudian, prostitusi dan praktik asusila lainnya. 4. Penyelenggaraan pesantren kilat, lomba karya ilmiah agama, pembinaan dan pengembang bakan kepemimpinan keagamaan, dll 5. Pemberian bantuan sarana, peralatan, buku pelajaran agama dan buku bernuansa agama pada sekolah umum 6. Melaksanakan pelatihan bagi tenaga penyuluh, pembimbing, mubaligh/dai dan orientasi bagi pemuka agama; 7. Memberikan bantuan paket dakwah untuk daerah tertinggal, terpencil dan bencana alam; 8. Pengembangan wawasan dan pendalaman materi bagi pendidik dan tenaga kependidikan agama dan keagamaan melalui lokakarya, workshop, seminar, studi banding dan orientasi;
Meningkatkan pelayanan dan kemudahan bagi umat beragama dalam melaksanakan ajaran agama, mendorong dan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam kegiatan pelayanan kehidupan beragama	Terciptanya iklim pembangunan keagamaan mengakomodasikan sebanyak mungkin hasrat umat bergama untuk sebanyak-banyaknya melaksanakan ajaran agamanya,.	Peningkatan Pelayanan Kehidupan Beragama	1. Pemberian bantuan untuk pembangunan dan rehabilitasi tempat ibadah; 2. Meningkatkan fungsi dan peran tempat ibadah sebagai pusat pembelajaran dan pemberdayaan masyarakat melalui bantuan untuk

<u>Peningkatan Partisipasi Perempuan dan Kesejahteraan Keluarga</u> Meningkatkan kualitas hidup, peran dan kedudukan perempuan di berbagai bidang kehidupan dan pembangunan, dan meningkatkan perlindungan bagi perempuan terhadap berbagai bentuk kekerasan, eksploitasi dan diskriminasi.	Meningkatnya kualitas SDM perempuan, kedudukan dan peranan perempuan termasuk dalam perumusan kebijakan dan pengambilan keputusan secara adil dan profesional di berbagai bidang kehidupan, serta terlaksananya berbagai upaya perlindungan perempuan yang ditandai dengan menurunnya tindak kekerasan terhadap perempuan serta meningkatnya kesejahteraan perempuan.	Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan	pengembangan perpustakaan; koperasi masjid, BMT, 3. Meningkatkan mutu pembinaan, pelayanan, jemaah haji; 4. Meningkatkan pelayanan dan pengelolaan zakat dan wakaf serta ibadah sosial lainnya; 5. Memberdayakan lembaga-lembaga sosial keagamaan, seperti kelompok jemaah keagamaan, majelis taklim, organisasi keagamaan, Badan Amil Zakat, dan petugas wakaf; 1. Peningkatan kualitas hidup perempuan, terutama di bidang pendidikan, kesehatan, hukum, ketenagakerjaan, sosial, politik, dan ekonomi. 2. Peningkatan upaya perlindungan perempuan dari berbagai tindak kekerasan, eksploitasi dan diskriminasi, termasuk usaha pencegahan dan penanggulangannya 3. Pengembangan dan penyempurnaan perangkat hukum dan kebijakan peningkatan kualitas hidup dan perlindungan perempuan di berbagai bidang pembangunan 4. Pelaksanaan komunikasi, informasi, dan edukasi (KIE) peningkatan kualitas hidup dan perlindungan perempuan 5. Penyusunan sistem pencatatan dan pelaporan, dan sistem penanganan dan penyelesaian kasus tindak kekerasan, eksploitasi dan diskriminasi terhadap perempuan 6. Pembangunan pusat pelayanan terpadu berbasis rumah sakit dan berbasis masyarakat di tingkat kabupaten sebagai sarana perlindungan perempuan dan anak korban kekerasan, termasuk korban kekerasan dalam rumah tangga 7. Peningkatan peran masyarakat dan media dalam penanggulangan pornografi dan pornoaksi
---	--	--	--

Meningkatkan kesejahteraan anak dan mewujudkan anak Indonesia yang sehat, cerdas dan ceria dan berakhlak mulia, serta melindungi anak terhadap berbagai bentuk kekerasan, eksploitasi dan diskriminasi.	Meningkatkan kesejahteraan dan perlindungan anak, terutama di bidang pendidikan, kesehatan, meningkatkan kampanye anti kekerasan terhadap anak	Peningkatan Kesejahteraan dan Perlindungan Anak	1. Pengembangan berbagai kebijakan dan peraturan perundang-undangan dalam rangka pemenuhan hak-hak anak, terutama di bidang pendidikan, kesehatan, sosial, hukum, dan ketenagakerjaan 2. Pelaksanaan komunikasi, informasi, dan edukasi (KIE) peningkatan kesejahteraan dan perlindungan anak 3. Pelaksanaan kebijakan dan peraturan perundang-undangan untuk menjamin dan melindungi hak-hak anak 4. Peningkatan upaya-upaya dalam rangka pemenuhan hak anak, seperti: penyediaan akte kelahiran dan penyediaan ruang publik yang aman untuk bermain 5. Pengembangan sistem dan prosedur penanganan hukum anak yang ramah, termasuk peningkatan upaya khusus terhadap anak dalam situasi darurat, konflik dengan hukum, eksploitasi, dan <i>trafiking</i>
Meningkatkan peran kelembagaan, koordinasi dan jaringan pengarusutamaan gender dan anak dalam perencanaan pembangunan di tingkat kabupaten, serta menyempurnakan perangkat hukum yang lebih lengkap dalam melindungi perempuan dan anak dari berbagai tindak kekerasan, eksploitasi, dan diskriminasi, termasuk kekerasan dalam keluarga	Tersusunnya kebijakan dan program pembangunan daerah yang responsif gender dan peduli anak serta tersedianya data dan statistik gender dan anak yang lengkap	Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak	1. Pengembangan materi dan pelaksanaan komunikasi, informasi, dan edukasi tentang kesetaraan gender dan keadilan gender, dan kesejahteraan dan perlindungan anak 2. Penyempurnaan kebijakan perberdayaan perempuan di berbagai sector 3. Pemantauan dan evaluasi pelaporan terhadap sektor perempuan dan anak.
<u>Perlindungan dan Kesejahteraan Sosial</u> Memulihkan fungsi sosial, memberikan pelayanan dan rehabilitasi sosial bagi para PMKS, termasuk lanjut usia terlantar, penyandang cacat, dan anak terlantar untuk kelangsungan hidup dan tumbuh kembangnya.	Meningkatnya kualitas pelayanan dan bantuan dasar kesejahteraan sosial bagi PMKS	Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial	1. Peningkatan kualitas pelayanan, sarana dan prasarana rehabilitasi kesejahteraan sosial bagi PMKS 2. Penyusunan kebijakan pelayanan dan rehabilitasi sosial bagi PMKS 3. Peningkatan pembinaan, pelayanan dan perlindungan sosial dan hukum bagi anak terlantar, lanjut usia, penyandang cacat dan tuna sosial.

Meningkatkan kemampuan, keberdayaan sosial dan kualitas hidup keluarga, fakir miskin dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial Lainnya.	Meningkatnya pemberdayaan fakir miskin, penyandang cacat dan kelompok rentan sosial lainnya.	Pemberdayaan Fakir Miskin dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial lainnya.	4. Penyelenggaraan pelatihan keterampilan dan praktek belajar kerja bagi PMKS 1. Penyusunan data base kemiskinan di tingkat nagari setiap tahun serta penertiban kartu keluarga miskin 2. Penyusunan strategi penanggulangan kemiskinan secara terpadu baik sektor maupun daerah 3. Pemberdayaan sosial keluarga, fakir miskin dan PMKS lainnya melalui peningkatan Usaha Ekonomi Produktif (UEP) dan Usaha Kesejahteraan Sosial (UKS) serta Kelompok Usaha Bersama (KUBE) 4. Peningkatan kerjasama kemitraan antara pengusaha dengan KUBE 5. Peningkatan kemampuan petugas dan pendamping pemberdayaan sosial keluarga, fakir miskin dan PMKS lainnya.
---	--	--	--

BUPATI DHARMASRAYA,

H. MARLON MARTUA